

**SISTEM PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN
KUMUH DI KECAMATAN KEMAYORAN
JAKARTA PUSAT**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh:

BUDIYONO
NIM L4D006075



**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**SISTEM PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN
KUMUH DI KECAMATAN KEMAYORAN
JAKARTA PUSAT**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

BUDIYONO
NIM L4D006075

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 23 Desember 2008

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 23 Desember 2008

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

Ir. Rina Kurniati, M.T

Ir. Holi Bina Wijaya, MUM

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Dr. Ir Joesron Alie Syahbana, M.Sc

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelas kejarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan Saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 12 Desember 2008

BUDIYONO
L4D006075

IMPOSSIBLE BUKANLAH FAKTA, TETAPI SEBUAH OPINI.
IMPOSSIBLE BUKANLAH SUATU PERNYATAAN,
TETAPI SUATU TANTANGAN, IMPOSSIBLE ADALAH POTENSI.
IMPOSSIBLE TIDAKLAH KEKAL.

IMPOSSIBLE IS NOTHING !!!

(Dikutip dari iklan ADIDAS versi media cetak)

PADA SETIAP BATU CADAS, SELALU TERKANDUNG PATUNG YANG
INDAH. (Michael Angelo)

Tesis ini kupersembahkan untuk :

Istriku tersayang *Anggun Cahyani* dan buah hati kami *Elang Arka Manggala*
sebagai anugerah terindah yang kumiliki; untuk sekedar menjadi bukti bahwa
belajar wajib dilakukan selama hayat masih dikandung badan

Bapak dan Ibuku tercinta Subari dan almarhumah Ibu Marinah yang berada di
surga, (beliau belum sempat melihat anaknya meraih magister), atas segala kasih
sayangnya

Kakak, adik dan keponakan Sriwahyuningsih SPd, Widodo SE, Sudirman SPd, Ita
dan Dian

Keluarga besar Drs. H. Sukirno, Drs. H. Sukarmin, Dr. Ir Suyanto Simoen, M.Sc,
dan H. Sumartono, SH; sebagai orang tuaku, penggungah inspirasi dan semangat

Almamaterku tercinta Universitas Diponegoro, disana saya memperoleh kekayaan
yang tak ternilai

Bangsa dan negara tempat tumpah darahku.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Teknik pada Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang. Adapun judul Tesis adalah “**Sistem Pendidikan Non Formal Pada Kawasan Kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat**”. Tema ini perlu dibahas mengingat begitu rendahnya partisipasi masyarakat kawasan kumuh di pendidikan non formal pada kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

Sehubungan dengan itu, penulis menyadari bahwa tulisan ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan banyak pihak, untuk itu sudah selayaknya penulis menyampaikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional yang telah memberikan kesempatan dan dukungan fasilitas Beasiswa Unggulan;
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan, Menengah dan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku pembina pegawai yang telah memberikan ijin belajar;
3. Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc, sebagai Ketua Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota dan seluruh pengelola, dosen pengampu dan staf administrasi program.
4. Pembimbing utama Ir. Holi Bina Wijaya, MUM dan Pembimbing Pendamping Ir. Rina Kurniati, MT atas segala bimbingan dan arahnya;
5. Ir. Mardwi Rahdriawan, MT, Dr. Ing. Asnawi Manaf dan Ir. Sunarti, MT selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan bagi kesempurnaan tesis.
6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah pada Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.
7. Istriku tersayang Anggun, permata hatiku Elang Arka Manggala, orang tua, atas kasih sayang dan dorongan semangat.
8. Seluruh mahasiswa beasiswa unggulan DIKNAS angkatan I yang seide dan seperjuangan atas kebersamaan, dan toleransinya
9. Seluruh staf Sudin Dikmenti Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah memberikan kelonggaran dan kerjasamanya;

Guna penyempurnaan Tesis ini, kritik dan saran tetap kami harapkan dari semua pihak.

Semarang, 23 Desember 2008

Penyusun

ABSTRAK

Pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar yang sangat mendasar, yaitu krisis ekonomi, era globalisasi dan otonomi daerah. Karena hal tersebut, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional. Disamping kondisi masyarakat Indonesia yang sangat kompleks baik dipandang dari segi ekonomi maupun strata sosial. Masyarakat kawasan kumuh, pendidikan formal dan informal kurang memberikan kepuasan akan kebutuhan pendidikan yang diperlukan. Masyarakat kawasan kumuh dengan segala kekurangannya, mengikuti pendidikan non formal menjadi sebuah masalah besar. Hal ini disebabkan belum tersedia sistem pendidikan non formal yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat pada kawasan kumuh.

Untuk menentukan sistem pendidikan non formal yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat kawasan kumuh, dilakukan penelitian yang tersusun dalam sebuah tesis yang berjudul “**Sistem Pendidikan Non Formal pada Kawasan Kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat**”. Tesis ini bertujuan untuk menentukan jenis sistem pendidikan non formal yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat kawasan kumuh. Hal yang dilakukan adalah menganalisis komponen sistem pendidikan non formal dan kondisi masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Sedangkan sasaran penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi sekaligus analisis komponen sistem pendidikan non formal dan komponen masyarakat kawasan kumuh.

Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pendekatan analisis kualitatif. Data didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Nara sumber dalam penelitian ini 33 orang dari masyarakat kawasan kumuh, pemerintah dan LSM yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan pendidikan non formal pada masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Analisis akan dilakukan terhadap komponen sistem pendidikan non formal dan komponen-komponen masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

Kesimpulan penelitian ini bahwa sistem pendidikan non formal *eksisting* pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat adalah sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada lingkungan sosial budaya. Artinya sistem pendidikan non formal yang mempunyai program dan kegiatan di sesuaikan dengan lingkungan sosial budayanya. Jika lembaga pendidikan non formal berada pada masyarakat perkotaan, maka program diarahkan pada bidang yang cepat terkena dampak perkembangan ilmu dan teknologi.

Kondisi masyarakat kawasan kumuh dengan keterbatasan akses ke pendidikan formal, pendidikan non formal adalah sebuah pilihan ideal. Namun jenis pendidikan non formal yang disediakan adalah sistem pendidikan yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Sistem pendidikan non formal yang sesuai adalah sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada pelayanan, yaitu sistem pendidikan yang bertujuan untuk melayani masyarakat sekitarnya baik program, tujuan, metode, waktu pelaksanaan sesuai dengan kemauan, kemampuan, karakteristik dan kondisi masyarakat.

Rekomendasi : seyogyanya pemerintah daerah dan masyarakat menerapkan sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada pelayanan, dengan demikian, diharapkan masyarakat kawasan kumuh mendapatkan layanan pendidikan dengan baik.

Kata kunci: sistem pendidikan non formal, kawasan kumuh

ABSTRACT

Education in Indonesia facing three major challenges the very fundamental, such as the economic crisis, the era of globalization and regional autonomy. Because of this, then need to be adjustments and changes in national education system. Not with the conditions of a very complex, both are seen in terms of economic and social strata, especially the area of slums, formal and informal education to provide less satisfaction on the human needs of education will be needed. Community slums of the area with all the drawbacks, the desire will enter non-formal education to become a major problem. This is because availability is not yet a non-formal education system in accordance with the conditions and characteristics of people in the slums area.

To determine the non-formal education system in accordance with the conditions and characteristics of the community area slums, in which the research is done in a thesis entitled "Non-Formal Education System in the slums area Kemayoran in Central Jakarta District." This thesis aims to analyze the component of non-formal education system and the existing conditions in the slums area Kemayoran Central Jakarta District. While the target of this research is to make the identification of system components and non-formal education component of the slums area.

Research conducted using qualitative methods, with the technical approach of qualitative analysis. In this research data obtained from interviews, observation and documentation. Sources in this research area is the slums, the government and NGOs are involved either directly or indirectly against the existence of non-formal education in slums in the area of Kemayoran Central Jakarta District for 33 people. Analysis of the components will be non-formal education systems and components in the slums area Kemayoran Central Jakarta District.

Conclusion of this research that non-formal education system in the slums area in Kemayoran Central Jakarta District is a non-formal education system that is based on the socio-cultural environment. Is non-formal education system that is based on the socio-cultural environment. This means that the system of non-formal education program in the match with the social cultural environment, if non-formal education institutions located in urban communities, the program focused on a program that quickly impact the development of science and technology.

Conditions with all the dirty areas of limited access to formal education, non formal education system does not fit above. Non-formal education system is the appropriate non-formal education system that is based on the service, the education system that aims to serve the community surrounding the program, goals, methods, execution time in accordance with the will, capability, characteristics and conditions.

Recommendations: should local governments and communities to apply non-formal education system that is based on the service, as such, the expected the slums area can follow the program correctly.

Keywords: non-formal education system, the slums area.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah dan Research Question	5
1.3. Tujuan dan Sasaran	6
1.3.1. Tujuan	6
1.3.2. Sasaran	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	8
1.5.1. Ruang Lingkup Substansial	8
1.5.2. Ruang Lingkup Spasial.....	9
1.6. Keaslian Penelitian	9
1.7. Kerangka Pemikiran	11
1.8. Metodologi Penelitian	13
1.8.1. Pendekatan Studi.....	13
1.8.1.1. Metode Penelitian.....	13
1.8.1.2. Tahapan Penelitian.....	14
1.8.2. Metode Analisis Data.....	16
1.8.2.1. Teknik Analisis	16
1.8.2.2. Substansi Analisis	16
1.8.2.3. Teknik Pengolahan Data	17
1.8.2.4. Kerangka Analisis	19
1.8.3. Kebutuhan Data.....	21
1.8.3.1. Jenis Data	21
1.8.3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.9. Sistematika Penulisan	28

BAB II SISTEM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN KAWASAN KUMUH

2.1. Pendidikan.....	30
2.1.1. Pengertian Pendidikan	30
2.1.2. Teori Pendidikan.....	31

2.1.3. Konsep Pendidikan	32
2.2. Jenis Pendidikan.....	33
2.2.1. Pendidikan Luar Sekolah	34
2.2.2. Pendidikan Non Formal	36
2.2.2.1 Asas Pendidikan Non Formal	38
2.2.2.2 Tugas-tugas Pendidikan Non Formal.....	39
2.2.2.3 Karakteristik Pendidikan Non Formal	40
2.2.2.4 Syarat-syarat Pendidikan Non Formal	41
2.2.3. Pendidikan Non Formal Terorganisir.....	41
2.2.4. Pendidikan Sosial.....	43
2.2.4.1 Pendidikan Masyarakat	44
2.2.4.2 Pembangunan Masyarakat Desa	45
2.2.4.3 Pekerjaan Sosial	46
2.2.5. Sistem Pendidikan Non Formal	47
2.2.6. Komponen dan Jenis Sistem Pendidikan Non Formal	49
2.3. Teori Lokasi dan Pelayanan	52
2.3.1. Teori Lokasi.....	52
2.3.2. Sarana Pelayanan.....	53
2.3.3. Teori Pelayanan Publik.....	55
2.4. Kawasan Kumuh	56
2.4.1. Pengertian	56
2.4.2. Penyebab Kawasan Kumuh	57
2.4.2.1. Pendekatan. Teori Marginalitas	59
2.4.2.2. Pendekatan Teori Ketergantungan	60
2.5. Klasifikasi Kawasan Pemukiman Kumuh	62
2.6. Sistem Aktivitas.....	63
2.7. Landasan Operasional Pelaksanaan Pendidikan Non Formal.....	63
2.7.1. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional	63
2.7.2. Strategi Penuntasan Renstra dalam Bidang Pendidikan Non Formal	65
2.7.3. Pokok-pokok Pembangunan Pendidikan Non Formal.....	66
2.8. Sistem Pendidikan Non Formal pada Kawasan Kumuh.	67
2.9. Sintesis Kajian Literatur	69

BAB III TINJAUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DI KAWASAN KUMUH KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

3.1. Pemukiman Kumuh di Jakarta Pusat	77
3.1.1. Lokasi Kawasan Kumuh di Jakarta Pusat	77
3.1.2. Sejarah dan Penyebab Kawasan Kumuh Kemayoran.	79
3.2. Kondisi Masyarakat Kawasan Kumuh Kemayoran Jakarta Pusat	80

3.2.1. Kependudukan Masyarakat Kawasan Kumuh di Kemayoran.....	80
3.2.2. Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Kumuh di Kemayoran.....	81
3.2.3 Sistem Aktivitas Sosial Masyarakat Kawasan Kumuh Di Kemayoran.....	89
3.2.4. Latar Belakang Pendidikan Masyarakat Kawasan Kumuh di Kemayoran	90
3.3. Karakteristik Masyarakat Kawasann Kumuh di Kemayoran	92
3.4 Pendidikan di Kemayoran Jakarta Pusat	98
3.4.1. Pendidikan Formal	98
3.4.2. Pendidikan Non Formal	100
3.5. Pendidikan Non Formal Kawasan Kumuh di Kemayoran	103
3.5.1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ...	103
3.5.2. Lembaga Kursus Keterampilan.....	104
3.6. Layanan Pendidikan Non Formal pada Kawasan Kumuh Kemayoran Jakarta Pusat	106
3.7. Peranan Institusi Terkait dengan Pendidikan Non Formal	107
3.8. Permasalahan Masyarakat Kawasan Kumuh dalam Bidang Pendidikan Non Formal	108

BAB IV ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH DI KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

4.1. Analisis Permasalahan Masyarakat Kawasan Kumuh Terhadap Pendidikan Non Formal..	110
4.2. Analisis Pemecahan Masalah Masyarakat Kawasan Kumuh Terhadap Pendidikan Non Formal	114
4.3. Analisis Layanan Pendidikan Non Formal pada Masyarakat Kawasan Kumuh	118
4.4. Analisis Lokasi Pendidikan Non Formal pada Masyarakat Kawasan Kumuh	121
4.5. Analisis Komponen Sistem Pendidikan Non Formal pada Masyarakat Kawasan Kumuh	128
4.5.1 Analisis Tujuan Pendidikan Non Formal Pada Kawasan Kumuh	128
4.5.2 Analisis Metode Pendidikan Non Formal Pada Kawasan Kumuh	131
4.5.3 Analisis Jadwal Belajar Pendidikan Non Formal Pada Kawasan Kumuh	136
4.5.4 Analisis Isi Pendidikan Non Formal Pada Kawasan Kumuh	140
4.5.5 Analisis Pelaksana Pendidikan Non Formal	

	Pada Kawasan Kumuh	145
4.5.6	Analisis Fasilitas Pendidikan Non Formal Pada Kawasan Kumuh	149
4.5.7	Rekapitulasi Analisis Komponen Sistem Pendidikan Non Formal	154
4.6.	Sintesis Terhadap Hasil Analisis.....	155
BAB V	KESIMPULAN	
5. 1.	Kesimpulan	170
5.2.	Saran.....	172

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 : Daftar warga belajar non formal di Kemayoran Jakarta Pusat	4
2. Tabel 1.2 : Penelitian tentang masyarakat kawasan kumuh.....	10
3. Tabel 1.3 : Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data	24
4. Tabel 1.4 : Sasaran, Komponen, Kebutuhan, Jenis, Kegunaan dan Sumber Data	25
5. Tabel 1.5 : Daftar Nara Sumber	28
6. Tabel 2.1 : Perbedaan antara pendidikan non formal dengan in formal	37
7. Tabel 2.2 : Perbedaan antara pendidikan formal dengan non formal	37
8. Tabel 2.3 : Sintesis aspek kajian dan komponen	75
9. Tabel 3.1 : Kampung kumuh di Jakarta Pusat	78
10. Tabel 3.2 : Luas wilayah Kecamatan Kemayoran	80
11. Tabel 3.3 : Kampung kumuh di Kecamatan Kemayoran	81
12. Tabel 3.4 : Jumlah penduduk miskin di Kecamatan Kemayoran	81
13. Tabel 3.5 : Jumlah rumah tangga miskin menurut lapangan pekerjaan di Kecamatan Kemayoran	90
14. Tabel 3.6 : Jumlah kepala rumah tangga miskin menurut pendidikan tertinggi di Kemayoran	92
15. Tabel 3.7 : Daftar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di kawasan kumuh Kemayoran Jakarta Pusat	103
16. Tabel 3.8 : Daftar peserta warga belajar PKBM di kawasan kumuh Kemayoran Jakarta Pusat	104
17. Tabel 3.9 : Daftar lembaga kursus di Kecamatan Kemayoran	105
18. Tabel 3.10: Daftar warga belajar lembaga kursus di Kemayoran Jakarta Pusat	106
19. Tabel 3.11: Permasalahan umum masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat terhadap keberadaan pendidikan non formal	109
20. Tabel 4.1 : Prioritas masalah pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat	110
21. Tabel 4.2 : Distribusi prioritas pemecahan masalah pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat	114
22. Tabel 4.3 : Layanan pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat	119
23. Tabel 4.4 : Lokasi pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat	122
24. Tabel 4.5 : Frekuensi tujuan pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat	129
25. Tabel 4.6 : Frekuensi kesesuaian tujuan pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat	130

26. Tabel 4.7 : Frekuensi metode pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat	132
27. Tabel 4.8 : Frekuensi kesesuaian metode pendidikan non formal pada Kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat	133
28. Tabel 4.9 : Frekuensi waktu pelaksanaan pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat	136
29. Tabel 4.10: Frekuensi kesesuaian jadwal pelaksanaan pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat	137
30. Tabel 4.11: Frekuensi isi dan bahan pengajaran pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat	140
31. Tabel 4.12: Frekuensi kesesuaian isi pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat	141
32. Tabel 4.13: Frekuensi tutor pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat	145
33. Tabel 4.14: Frekuensi kesesuaian tutor pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat	146
34. Tabel 4.15: Frekuensi fasilitas pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat	149
35. Tabel 4.16: Frekuensi kesesuaian fasilitas pendidikan non formal pada Kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat	151
36. Tabel 4.17: Rekapitulasi analisis komponen sistem pendidikan non formal pada masyarakat kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat	154
37. Tabel 4.18: Rekapitulasi perbandingan sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat	156

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar	1.1	: Kerangka pemikiran	12
2.	Gambar	1.2	: Kerangka Analisis.....	20
3.	Gambar	2.1	: Bagan jenis pendidikan	34
4.	Gambar	2.2	: Hubungan unsur pokok pendidikan non formal	49
5.	Gambar	2.3	: Bagan sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh	69
6.	Gambar	2.4	: Konsep pendekatan sistem pendidikan non formal Kawasan kumuh	72
7.	Gambar	2.5	: Bagan analisis sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh	73
8.	Gambar	2.6	: Diagram sintesis sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh	74
9.	Gambar	3.1	: Peta administrasi Jakarta Pusat	83
10.	Gambar	3.2	: Peta kepadatan penduduk Jakarta Pusat	84
11.	Gambar	3.3	: Peta lokasi kawasan kumuh di Jakarta Pusat	85
12.	Gambar	3.4	: Peta administrasi Kecamatan Kemayoran	86
13.	Gambar	3.5	: Peta lokasi kawasan kumuh di Kecamatan kemayoran	87
14.	Gambar	3.6	: Foto aktivitas masyarakat kawasan kumuh Jakarta Pusat	88
15.	Gambar	3.7	: Foto pemukiman kawasan kumuh Kemayoran	95
16.	Gambar	3.8	: Foto udara lokasi pemotretan masyarakat kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran	96
17.	Gambar	3.9	: Peta lokasi pemotretan masyarakat kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran	97
18.	Gambar	3.10:	Peta lokasi sekolah formal pada kawasan kumuh	99
19.	Gambar	3.11:	Foto aktivitas pendidikan masyarakat kawasan kumuh Kemayoran	101
20.	Gambar	3.12:	Peta lokasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus	102
21.	Gambar	4.1	: Grafik prioritas permasalahan masyarakat kawasan kumuh bidang pendidikan non formal	112
22.	Gambar	4.2	: Prioritas pemecahan masalah pendidikan non formal di kawasan kumuh Jakarta Pusat	116
23.	Gambar	4.3	: Grafik layanan dan pengaruh pendidikan non formal Pada kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran	121
24.	Gambar	4.4	: Grafik lokasi dan pengaruh pendidikan non formal pada kawasan kumuh Kemayoran Jakarta Pusat	125
25.	Gambar	4.5	: Peta lokasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus	127
26.	Gambar	4.6	: Grafik kesesuaian tujuan pendidikan non formal pada kawasan kumuh Kemayoran Jakarta Pusat	131
27.	Gambar	4.7	: Kesesuaian metode pendidikan non formal pada	

		kawasan kumuh Kemayoran Jakarta Pusat.....	135
28. Gambar	4.8 :	Kesesuaian waktu pelaksanaan pendidikan non formal pada kawasan kumuh Kemayoran Jakarta Pusat	139
29. Gambar	4.9 :	Kesesuaian bahan pengajaran pendidikan non formal pada kawasan kumuh Kemayoran Jakarta Pusat	144
30. Gambar	4.10:	Kesesuaian tutor pendidikan non formal pada kawasan kumuh Kemayoran Jakarta Pusat	148
31. Gambar	4.11:	Kesesuaian fasilitas pendidikan non formal pada kawasan kumuh Kemayoran Jakarta Pusat	153
32. Gambar	4.12:	Frekuensi pendapat narasumber tentang sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh.....	165
33. Gambar	4.13:	Bagan sintesis hasil analisis.....	168

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan yang sangat besar. Tantangan pertama adalah akibat krisis ekonomi, dimana dunia pendidikan dituntut untuk mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional. Dengan demikian diharapkan dapat terwujud suatu proses pendidikan yang lebih demokratis, dengan memperhatikan keberagaman kebutuhan dan keadaan daerah, peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Untuk menghadapi hal tersebut pemerintah telah meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan formal.

Sementara itu kondisi masyarakat yang sangat kompleks baik dipandang dari segi ekonomi maupun strata sosial, pendidikan formal dan informal kurang memberikan kepuasan pada setiap manusia akan kebutuhan pendidikan yang diperlukan. Kebutuhan akan pengetahuan yang dapat diperoleh melalui keterampilan membaca, tulis dan berhitung serta memahami

berbagai lambang digit dan ikon pendidikan lainnya menjadi mutlak yang kurang bisa dipenuhi pada pendidikan formal.

Masyarakat kawasan kumuh, yang biasanya memiliki karakteristik kurang beruntung dari segi ekonomi, lebih memilih dan menekankan kebutuhan keterampilan yang memudahkan orang bergerak dalam jenjang dan jangkauan pekerjaan serta penghidupan yang lebih luas. Hal ini menyebabkan pendidikan formal kurang dibutuhkan oleh masyarakat kawasan kumuh. Selain karena keterbatasan aksesibilitas untuk menjangkau pendidikan formal, masyarakat kawasan kumuh lebih memilih pendidikan non formal. Apalagi dengan adanya perluasan kesempatan anak didik menjadi tenaga berpendidikan yang terlatih. Hal ini merupakan faktor yang tidak bisa dikerjakan oleh pendidikan formal.

Pendidikan formal mengakibatkan seseorang hanya menguasai bidang tertentu dan buta bidang-bidang lain dan terus menerus berada pada seting buatan yang bersifat modern. Bahkan terkadang membahayakan psikologi anak didik, yakni menjadi golongan manusia tersendiri dalam masyarakat yang menjadikan anak-anak menjadi terasing dari masyarakat (Joesoef, 2004:69).

Terdapat berbagai faktor yang pada hakekatnya pendidikan non formal sangat diperlukan oleh masyarakat pada kawasan kumuh antara lain: (1) kemajuan teknologi membuat usangnya hasil penemuan masa lampau, menyebabkan perlunya penyegaran yang sifatnya remedial; (2) lahirnya persoalan baru yang tidak bisa diserahkan hanya kepada lembaga pendidikan formal dan informal; (3) keinginan untuk maju masyarakat kawasan kumuh

yang kian meningkat terutama bagi mereka yang tidak pernah bersekolah pada pendidikan formal; (4) perkembangan pendidikan yang memperluas kemungkinan masyarakat pada kawasan kumuh untuk mengikuti pendidikan tanpa harus pada waktu jam kerja; (5) terbentuknya beberapa organisasi yang menginginkan penambahan pengetahuan dan keterampilan (Joesoef, 2004:70).

Dengan melihat kegagalan penerapan pendidikan formal dan betapa unggulnya pendidikan non formal pada masyarakat kawasan kumuh, maka perlu dilakukan pengembangan dan usaha mendorong masyarakat kawasan kumuh untuk menempuh pendidikan non formal.

Ironis dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Jakarta Pusat telah hilang minat belajar ke pendidikan non formal. Hal ini diakibatkan oleh minim dukungan atau motivasi keluarga, kesempatan dan akses masyarakat kawasan kumuh untuk menempuh pendidikan non formal. Disamping masih jarang lembaga pendidikan non formal yang membuat program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya banyak lembaga pendidikan non formal yang tidak mendapatkan warga belajar atau minim warga belajar.

Hal ini ditunjukkan dengan statistik penduduk usia sekolah pada kawasan kumuh di Kecamatan Jakarta Pusat. Penduduk usia sekolah di Kecamatan Kemayoran berjumlah 3.208 orang, yang masih bersekolah di pendidikan formal sebanyak 2.329 orang, yang terdaftar sebagai warga belajar

pendidikan non formal hanya berjumlah 254 orang (Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kota Jakarta Pusat, 2007).

Masyarakat pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat sebagian besar beranggapan bahwa pendidikan bukan merupakan kebutuhan. Keluarga yang memiliki tingkat ekonomi rendah, biasanya lebih mengutamakan mencari nafkah dibanding bersekolah.

Minimnya jumlah peserta belajar di pendidikan non formal pada kawasan kumuh dapat dilihat pada tabel I.1 di bawah ini.

TABEL I.1
DAFTAR WARGA BELAJAR PENDIDIKAN NON FORMAL DI
KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

No	Nama Lembaga	Program	Asal Warga Belajar		Jumlah
			Kumuh	Bukan	
1	Komputer Kreatif	Komputer	2	38	40
2	LPMK Global	Komputer	0	16	16
3	LPK Stanford	Komputer	1	19	20
4	Modern English C	B. Inggris	2	10	12
5	Friendship	Musik & Vokal	0	9	9
6	Yuliana Jaya	Menjahit	1	11	12
7	Mita Salon	Tata Kecantikan Rambut	0	38	38
8	Yayasan Ilmu Manajemen	Manajemen	0	18	18
9	LP. Meidia	Tata Kecantikan Rambut	1	35	36
10	Global Language	B. Inggris	0	26	26
11	The Meredia Training	B. Inggris	0	17	17
12	Nina Busana	Menjahit	0	10	10
	Jumlah		7	247	254

Sumber: Data Pendidikan Luar Sekolah Jakarta Pusat, 2007

Banyak hal yang dilakukan pemerintah Jakarta Pusat dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan non formal pada masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh, baik segi akademik maupun non akademik. Diantaranya

adalah dengan memperbaiki manajemen pendidikan non formal. Hal ini dilakukan agar pendidikan non formal lebih produktif dan efisien serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Bahkan pada tahun 2007 pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah memberikan program beasiswa kepada 10.825 siswa kurang mampu, pembenahan dan pembangunan gedung sekolah baru dan sarana pendidikan non formal lainnya. Program yang lainnya adalah mendirikan lembaga-lembaga non formal dan mempermudah masyarakat mendapatkan izin mendirikan lembaga pendidikan non formal. Hal ini ternyata belum cukup efektif untuk meningkatkan angka warga belajar pada pendidikan non formal (Dikmenti Jakarta, 2007).

1.2 Perumusan Masalah dan *Research Question*

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dianalisis dalam kajian ini, yaitu:

- a. Persoalan yang dihadapi pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat adalah masih rendahnya jumlah masyarakat yang memasuki lembaga pendidikan non formal. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan lembaga pendidikan non formal adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lembaga kursus dibawah pembinaan Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Jakarta Pusat;

- b. Hal ini disebabkan sistem pendidikan non formal yang ada belum sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat kawasan kumuh;
- c. Oleh karena itu memerlukan pengkajian. Usaha yang dilakukan pemerintah dengan penyediaan fasilitas, pembenahan manajemen dan prasarana pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Jakarta Pusat belum dapat membuahkan hasil maksimal.

Dari rumusan permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Jakarta Pusat belum maksimal. Keberadaan lembaga pendidikan non formal pada kawasan kumuh yang diharapkan dapat menjadikan sarana belajar yang utama, ternyata belum dapat mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu *Research Question* yang dikemukakan dalam studi ini adalah: *Bagaimanakah sistem pendidikan non formal pada masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.*

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap sistem pendidikan non formal di lembaga pendidikan non formal pada masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

1.3.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Melakukan identifikasi sistem pendidikan non formal pada lembaga pendidikan non formal, dengan sub sasarnya meliputi:
 - Identifikasi layanan pendidikan non formal;
 - Identifikasi lokasi pendidikan non formal;
 - Identifikasi komponen sistem pendidikan non formal;
2. Melakukan identifikasi masyarakat kawasan kumuh, sub sasarnya meliputi:
 - Identifikasi sistem aktivitas masyarakat kawasan kumuh;
 - Identifikasi kondisi kependudukan masyarakat kawasan kumuh;
 - Identifikasi latar belakang pendidikan masyarakat kawasan kumuh;
 - Identifikasi sosial ekonomi masyarakat kawasan kumuh
3. Melakukan analisis sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
4. Menyimpulkan sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

1.4 Manfaat Penelitian

Studi terhadap sistem pendidikan non formal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kawasan kumuh ini diharapkan akan memberikan

manfaat bagi pemerintah, masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Manfaat-manfaat tersebut diantaranya adalah :

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan sistem pendidikan non formal pada masyarakat kawasan kumuh;
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi sistem pendidikan non formal pada masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh di Jakarta Pusat;
- c. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan Pembangunan Wilayah dan Kota.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Substansial.

Secara substansial lingkup kajian yang akan menjadi pijakan studi tentang sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat adalah melakukan analisis terhadap:

1. Sistem pendidikan non formal;
 - Layanan pada lembaga pendidikan non formal, dalam hal ini adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus;
 - Komponen sistem pendidikan non formal;

- Lokasi lembaga pendidikan non formal dalam hal ini PKBM dan Lembaga Kursus.
2. Masyarakat kawasan kumuh;
 - Sistem aktivitas masyarakat kawasan kumuh;
 - Latar belakang pendidikan masyarakat kawasan kumuh;
 - Kondisi sosial ekonomi masyarakat kawasan kumuh;
 - Kondisi kependudukan kawasan kumuh.
 3. Sistem pendidikan non formal pada masyarakat kawasan kumuh.

1.5.2 Ruang Lingkup Spasial

Dalam penelitian kualitatif suatu gejala tidak dapat dipandang secara terpisah, tetapi merupakan keseluruhan situasi sosial yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Dalam hal ini, tempat penelitian diambil di salah satu wilayah permukiman kumuh di Jakarta Pusat, yaitu Kecamatan Kemayoran. Di kecamatan ini terdapat kawasan kumuh paling luas di Jakarta Pusat. Penulis menganggap bahwa lokasi yang dipilih telah mewakili penelitian ini, mengingat karakteristik dari masing-masing kawasan kumuh sama. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mengetahui sistem pendidikan non formal pada masyarakat permukiman kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

1.6 Keaslian Penelitian

Sistem pendidikan merupakan bagian dari sistem pembangunan pada suatu wilayah yang biasanya diwujudkan dengan pembangunan sarana dan

prasarana pendidikan yang berfungsi sebagai sarana dan prasarana belajar mengajar. Studi dengan melakukan kajian terhadap kawasan kumuh telah banyak dilakukan. Secara ringkas, beberapa penelitian yang mengambil objek masyarakat kawasan kumuh yang telah dilakukan antara lain seperti terangkum dalam Tabel I.2.

TABEL I.2
PENELITIAN TENTANG MASYARAKAT KAWASAN KUMUH

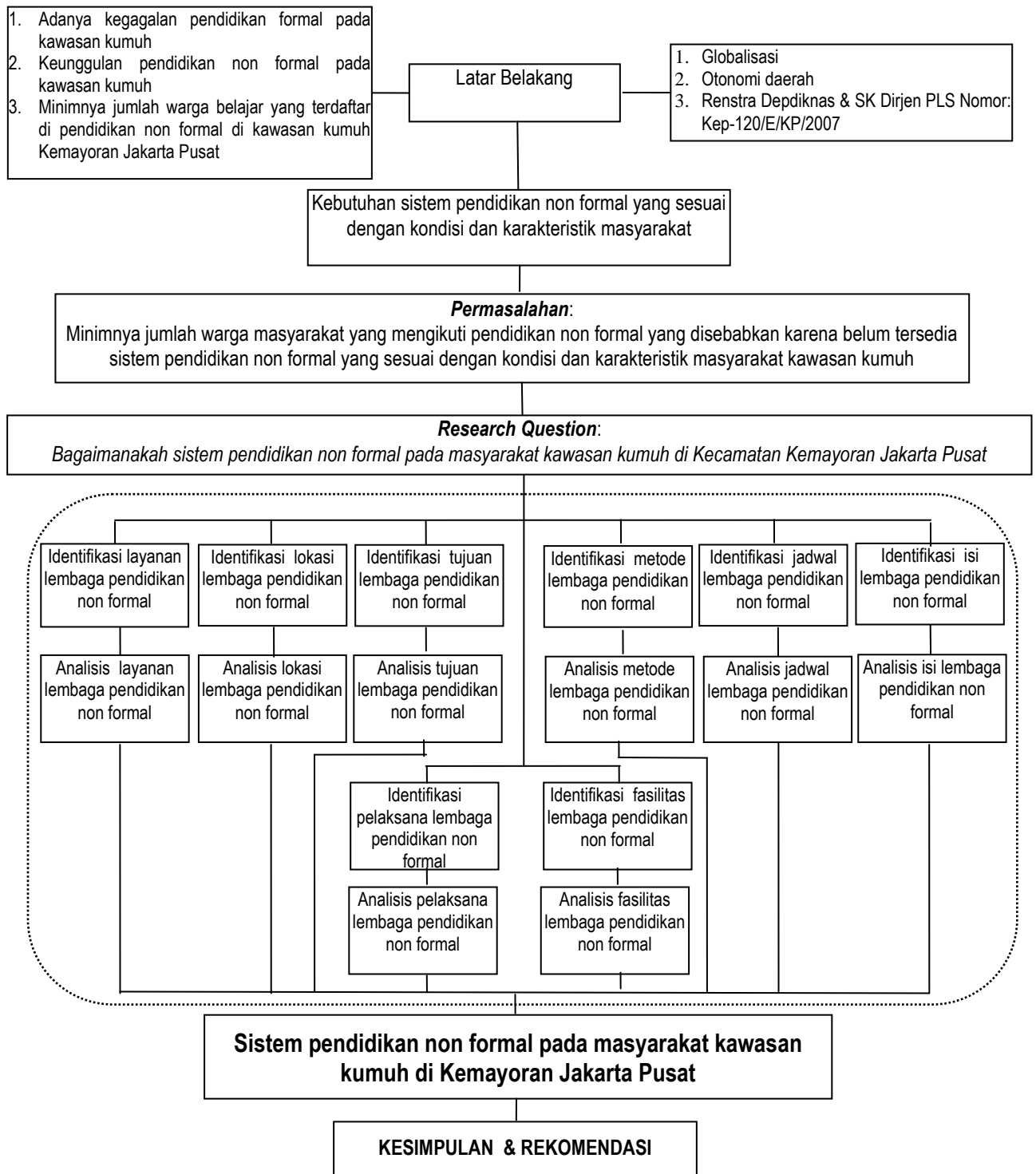
No	Peneliti	Judul	Tahun	Lokasi	Pendekatan/ Metode
1	Ariati	Kajian Karakteristik Permukiman Kumuh dalam Upaya Peremajaan. (Studi Kasus: Kampung Pahandut Kota Palangkaraya)	2001	Palangkaraya	Deskriptif kualitatif & kuantitatif
2	Mohammad Agung Ridlo	Karakteristik Kemiskinan Perkotaan Pada Permukiman Kumuh dan Liar Kota Semarang	2002	Semarang	Diskriptif Kualitatif
3	Sigit Widyonindito	Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Rejowinangun Selatan Kota Magelang	2003	Magelang	Kualitatif

Sumber: Hasil kajian (2008)

Namun penelitian mengenai kajian tentang sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat sepanjang penelusuran peneliti, belum pernah ada yang melakukan, meskipun isu tersebut telah muncul dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian.

1.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan atau sasaran dan ruang lingkup serta keaslian penelitian sebagaimana telah diuraikan di muka maka penelitian ini berpijak pada kerangka pemikiran seperti dalam Gambar 1.1



GAMBAR 1.1
KERANGKA PEMIKIRAN
Sumber: Analisis Peneliti (2008)

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan Studi

1.8.1.1 Metode Penelitian

Tema penelitian ini bertolak dari permasalahan empiris dalam bidang pendidikan yang ditemukan di lapangan, khususnya pendidikan non formal di wilayah Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Yaitu rendahnya jumlah masyarakat kawasan kumuh yang menempuh pendidikan non formal. Padahal pada kawasan seperti ini, pendidikan non formal merupakan pendidikan pilihan, jika dibanding dengan pendidikan formal. Hal ini ironis dengan kondisi Jakarta Pusat, yang merupakan pusat pemerintahan dan barometer pendidikan di Indonesia, namun masih terdapat anak-anak yang tidak bersekolah baik formal maupun non formal.

Kondisi ini menimbulkan suatu pemikiran, bahwa sistem pendidikan non formal yang ada belum sesuai dengan kemauan, kebutuhan, kehendak dan karakteristik masyarakat kawasan kumuh di Jakarta Pusat. Untuk menemukan jawaban sistem pendidikan non formal seperti apa yang dianggap paling sesuai dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh di Jakarta Pusat, maka dilakukan penelitian di kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Wilayah ini dianggap dapat mewakili kawasan kumuh yang lain mengingat karakteristik masyarakat kawasan kumuh di Jakarta Pusat relatif sama.

Metode penelitian yang sesuai digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai

situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2008:68). Penelitian kualitatif dilandasi oleh pemikiran rasionalistik yang menghendaki adanya pembahasan holistik, sistemik, dan mengungkapkan makna di balik fakta empiris.

Penelitian kualitatif dengan pendekatan rasionalistik menuntut agar obyek yang diteliti tidak dilepaskan dari konteksnya, atau setidaknya obyek diteliti dengan fokus atau aksentuasi tertentu, tetapi tidak mengeliminasi konteksnya. Pertanyaan yang mengemuka saat sekarang bagaimanakah sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Jakarta Pusat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merupakan pemaknaan dari interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, sistem pendidikan non formal pada masyarakat di kawasan kumuh merupakan bentuk dari interaksi sosial yang lebih tepat dipandang secara rasional dan dapat diteliti dengan cara kualitatif.

1.8.1.2 Tahapan Penelitian

Yang dimaksud dengan penelitian adalah suatu proses atau serangkaian langkah yang dilakukan secara terencana atau terprogram dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu (Wirartha, 2006 : 181). Penelitian selain terencana dan

sistematis, harus memenuhi syarat mengikuti konsep ilmiah (Arikunto, 1998: 15).

Sehubungan dengan hal tersebut maka penelitian ini terdiri dari tahapan sebagai berikut:

1. Pembuatan rencana penelitian atau Pra-tesis, yang terdiri dari:
 - a. Merumuskan permasalahan dan *research question*;
 - b. Menetapkan tujuan dan sasaran;
 - c. Membuat kerangka fikir;
 - d. Mengkaji teori-teori;
 - e. Melakukan kajian wilayah;
 - f. Memilih pendekatan metode penelitian dan merancang instrumen pengumpulan data;
 - g. Merencanakan jadwal penelitian.
2. Pelaksanaan penelitian, dalam tahapan ini dilakukan langkah-langkah yaitu:
 - a. Melakukan pengumpulan data, baik primer maupun sekunder.
 - b. Melakukan identifikasi sistem pendidikan non formal;
 - c. Melakukan identifikasi masyarakat kawasan kumuh;
 - d. Melakukan analisis sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh.
 - e. Menyimpulkan sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.
3. Penyusunan laporan hasil penelitian (Tesis).

1.8.2 Metode Analisis Data

1.8.2.1 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, merupakan teknik analisis yang mentransformasikan data mentah kedalam bentuk data yang mudah dimengerti dan diinterpretasikan, serta menyusun, memanipulasi dan menyajikan data menjadi suatu informasi yang jelas (Kusmayadi, 2000:178).

Teknik analisis ini digunakan untuk menganalisa hasil wawancara dengan nara sumber tentang kebijakan dan keinginan masyarakat tentang sistem pendidikan non formal yang paling sesuai

1.8.2.2 Substansi Analisis

Sedangkan substansi analisis dalam penelitian ini, mencakup:

- a. Analisis deskriptif kualitatif sistem pendidikan non formal. Analisis ini untuk mengetahui layanan, lokasi lembaga pendidikan non formal dan komponen-komponen pendidikan non formal pada pendidikan non formal di kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.
- b. Analisis deskriptif kualitatif kawasan kumuh yang meliputi aktifitas sosial, kependudukan, latar belakang pendidikan orang tua murid pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Analisis ini untuk mengetahui pekerjaan orang tua, lapangan kerja anak usia sekolah, kependudukan, keadaan sosial, latar belakang pendidikan orang tua masyarakat kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

- c. Analisis diskriptif kualitatif sistem pendidikan non formal di kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Analisis ini untuk mengetahui sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Jakarta Pusat.

1.8.2.3 Teknik Pengolahan Data

Kegiatan pengolahan data sebagai suatu proses yang mencakup tahapan-tahapan pemilihan data yang tepat atau relevan dengan permasalahan yang akan diteliti serta menggolongkan atau mengklasifikasikan data berdasarkan kategori tertentu sesuai kebutuhan analisis.

Pengolahan data merupakan cara mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga data dapat dibaca (*readable*) dan dapat ditafsirkan (*interpretable*). Kegiatan pengolahan data, baik kualitatif maupun kuantitatif, diawali dengan tabulasi yaitu proses pembuatan tabel induk yang memuat susunan data penelitian berdasarkan klasifikasi yang sistematis sehingga lebih mudah dianalisis (Wirartha, 2006: 259).

Sesuai dengan pendekatan dan metode penelitian, maka pengolahan data akan dilakukan sebagai berikut:

1. Reduksi Data.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan-tahapan reduksi selanjutnya (membuat

ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo).

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya

2. Klasifikasi

Merupakan kegiatan penggolongan data yang diperoleh melalui kegiatan survai ke dalam kelompok data berdasarkan sumber dan kategori tertentu. Klasifikasi dilakukan dengan memberikan kode pada data-data yang diperoleh.

3. Verifikasi

Merupakan kegiatan pemeriksaan data secara umum dengan mengacu kepada daftar kebutuhan data yang telah disusun sebelumnya. Untuk memudahkan kegiatan verifikasi data akan disusun tabel daftar periksa (*checklist*). Dalam verifikasi data, peneliti melakukan pengecekan informasi antar responden, dengan pihak-pihak yang terkait.

4. Validasi

Dalam kegiatan ini, data-data yang telah terkumpul kemudian dinilai apakah data-data yang sudah ada cukup valid dan representatif mewakili kondisi yang diamati.

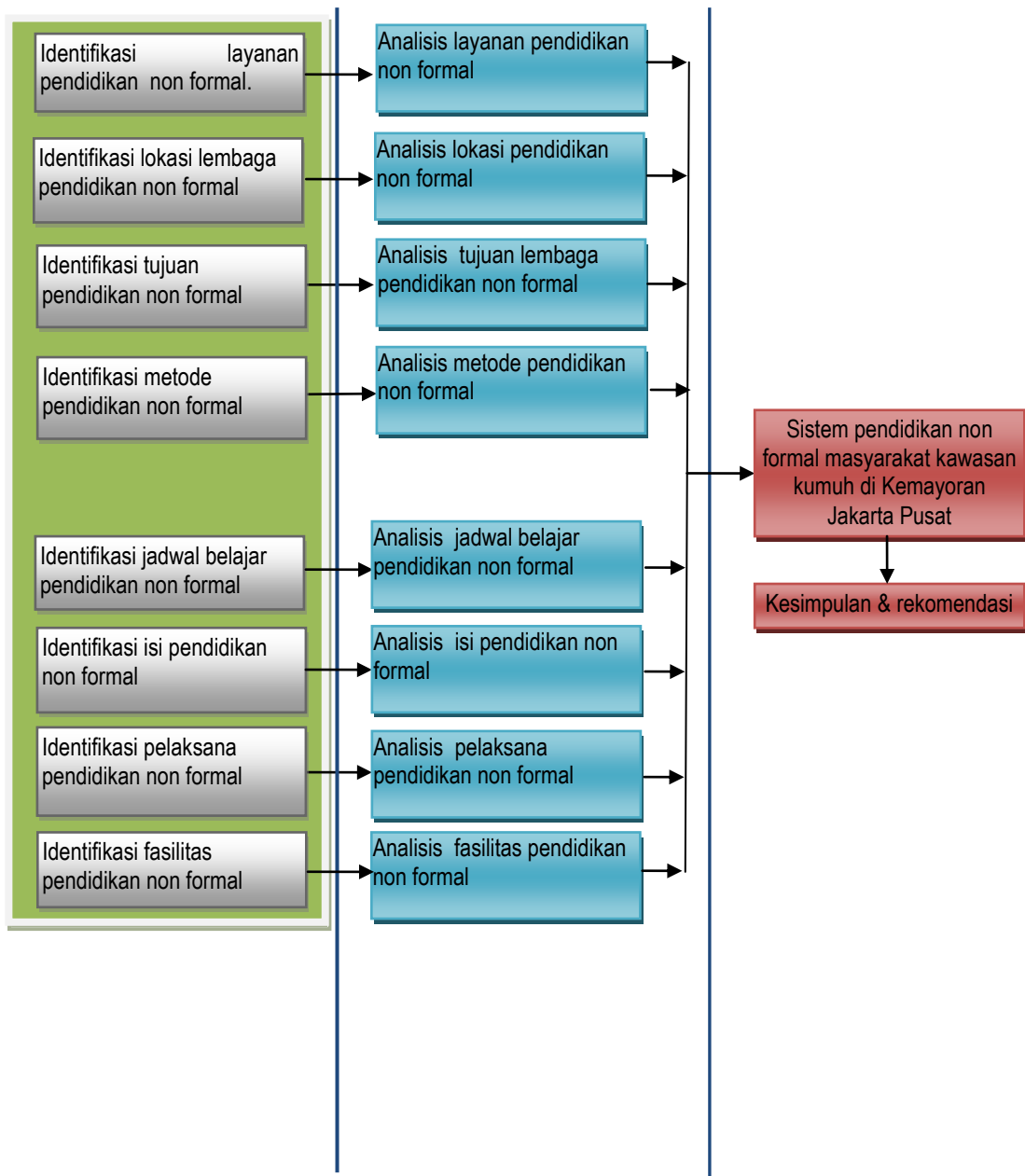
5. Tabulasi

Proses tabulasi merupakan proses akhir dalam penyusunan data agar mudah dibaca, dimengerti dan digunakan sesuai dengan tujuan penelitian (Kartono, 1996).

1.8.2.4 Kerangka Analisis

Untuk menghindari melebar nya analisis sehingga keluar dari sasaran dan tujuan penelitian, maka diperlukan kerangka analisis yang berfungsi sebagai kerangka kerja logis (*logical frame work*) dalam penelitian. Kerangka analisis menggambarkan proses analisis terhadap *input* data sehingga menghasilkan *output* dari setiap variabel yang dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Yang menjadi masukan utama dalam penelitian ini adalah kondisi eksisting bidang pendidikan non formal di kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran. Yaitu rendahnya jumlah warga belajar pada pendidikan non formal. Padahal cukup tersedia sarana dan prasarana pendidikan non formal. Seharusnya pada lokasi seperti ini pendidikan non formal merupakan pilihan utama masyarakat. Secara diagramatis, alur analisis tersebut digambarkan dengan bagan seperti pada Gambar 1.2.



INPUT

PROSES

OUTPUT

GAMBAR 1.2
KERANGKA ANALISIS

Sumber: Analisis Peneliti (2008)

1.8.3 Kebutuhan Data

1.8.3.1 Jenis Data

Data berasal dari kata datum adalah adalah sebuah informasi atau keterangan yang berbentuk kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan suatu fakta (Danim, 2002: 48). Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber individu atau kelompok seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini data primer adalah hasil wawancara dan observasi (pengamatan langsung) dengan masyarakat pada kawasan kumuh, pengelola lembaga pendidikan non formal, lembaga swadaya masyarakat dan Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi.

Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan antara lain adalah : data jumlah warga belajar pada pendidikan non formal yang diperoleh dari Pendidikan Luar Sekolah dan Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi, serta data jumlah penduduk yang tinggal di kawasan kumuh diperoleh dari Biro Pusat Statistik.

1.8.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan kebutuhan data, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, wawancara dan observasi dengan menggunakan beberapa instrumen.

Instrumen, adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut sistematis dan dipermudah (Arikunto, 1998:24).

Selengkapnya ketiga teknik pengumpulan data yang digabungkan dan akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Teknik Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2008: 328).

Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data sekunder yang diperlukan dengan mempelajari dokumen-dokumen, serta bukti otentik dari penelitian yang ada kaitannya dengan sistem pendidikan non formal pada masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

2. Teknik Wawancara Semiterstruktur (*Semistruktur interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview* atau interview mendalam, dimana dalam pelaksanaannya pihak yang diajak wawancara atau narasumber diminta pendapat dan ide-ide lainnya. Peneliti dapat menggunakan pedoman wawancara yang terbuka atau sebagian menggunakan pilihan jawaban. Hal ini dilakukan untuk menemukan permasalahan lebih terbuka (Sugiyono, 2008: 320).

Teknik ini dilakukan agar kiranya nara sumber dapat menyampaikan permasalahan dan memberikan pendapatnya secara lebih terbuka, namun tetap pada permasalahan yang dibawa oleh peneliti, yaitu tentang sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

3. Observasi Tersamar

Metode survei yang dilakukan adalah dengan metode observasi tersamar, dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan teras teras kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak teras teras atau tersamar dalam melakukan survei, hal ini untuk menghindari kalau mungkin data yang dicari masih dirahasiakan oleh nara sumber. Kemungkinan kalau dirahasiakan dengan teras teras, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan survei (Sugiyono, 2008:312).

Metode ini dilakukan karena peneliti beranggapan bahwa penelitian yang dilakukan penelitian yang sifatnya umum dan tidak dirahasiakan, sehingga peneliti dalam melakukan observasi tidak perlu ikut terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari nara sumber dan obyek penelitiannya sangat jelas yaitu melihat kondisi masyarakat dan proses belajar pendidikan non formal yang ada di kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

Instumen dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah seperti tertera pada tabel I.3 di bawah ini.

TABEL I.3.
INSTRUMEN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

No.	Teknik pengumpulan data	Instrumen
1	Observasi	- Camera - Pedoman observasi
2	Dokumentasi	- Daftar cocok (<i>checklist</i>) - Tabel
3	Wawancara	- Pedoman wawancara

Sumber: Analisis Peneliti, 2008.

Nara sumber dalam penelitian dipilih dari pihak-pihak yang terkait dengan kawasan kumuh dan pendidikan non formal di Jakarta Pusat, dengan pengambilan sampel menggunakan metode gabungan antara *snowball sampling* dan *purposive sampling* (pemilihan sampel secara bertujuan). *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.

Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2008:300). Sedangkan *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2008:300). Sedangkan metode gabungan yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah, bahwa dalam menentukan sumber data yang pertama dilakukan dengan memilih dengan pertimbangan kriteria tertentu, kemudian nara sumber berikutnya ditunjuk oleh nara sumber pertama, namun tetap mempertimbangkan kriteria-kriteria yang ada. Adapun kriteria-kriteria nara sumber yang akan menjadi sampel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat pada kawasan kumuh yang memiliki anak usia sekolah;
2. Pemerintah, yaitu instansi yang menangani baik langsung maupun tidak langsung pendidikan non formal di Jakarta Pusat;
3. Organisasi kemasyarakatan yang terlibat langsung dengan pendidikan non formal;
4. Lembaga pendidikan non formal yang berada pada kawasan kumuh di Jakarta Pusat;
5. Anak usia sekolah yang berada pada kawasan kumuh di Jakarta Pusat.

Sasaran, komponen, kebutuhan, jenis, kegunaan dan sumber data dapat dilihat pada tabel I.4. di bawah ini:

TABEL I.4
SASARAN, KOMPONEN, KEBUTUHAN, JENIS, KEGUNAAN DAN SUMBER DATA

No	Sasaran Penelitian	Data				
		Variabel	Kebutuhan	Jenis	Kegunaan	Sumber
1	<p>Melakukan kajian sistem pendidikan non formal, yang sub sasarnya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi dan analisis layanan pendidikan non formal; - Identifikasi dan analisis lokasi pendidikan non formal; - Identifikasi dan analisis komponen pendidikan non formal; 	<ul style="list-style-type: none"> 1.1 Jarak 1.2 Kemudahan 1.3 Menyenangkan 1.4 Kenyamanan 1.5 Keamanan dan Keselamatan 1.6 Keandalan 1.7 Waktu pelaksanaan belajar 3.1 Letak 3.2 Dekat dengan kawasan kumuh 3.3 Jauh dengan kawasan kumuh 3.1 Tujuan 3.2 Peserta didik. 3.3 Metode 3.4 Waktu. 3.5 Isi dan bahan ajaran 3.6 Tutor 3.7 Fasilitas / sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lembaga pendidikan non formal eksisting 2. Jarak antara lokasi lembaga pendidikan non formal dengan warga belajar 3. Suasana, kondisi dan pelaksanaan lembaga pendidikan non formal 4. Situasi sosial warga belajar pendidikan non formal 	<ul style="list-style-type: none"> Primer dan sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis sistem pendidikan non formal 	<ul style="list-style-type: none"> - Suku Dinas Dikmenti - Lembaga kursus - PKBM - LSM Pendidikan - Anak Usia sekolah yang tidak bersekolah - Warga Belajar
						-

2	<p>Melakukan kajian masyarakat kawasan kumuh yang sub-sasarannya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi sistem aktivitas masyarakat kawasan kumuh; - Identifikasi kependudukan masyarakat kawasan kumuh; - Identifikasi pendidikan masyarakat kawasan kumuh; - Identifikasi sosial ekonomi masyarakat kawasan kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> 1.1 Pekerjaan orang tua. 1.2 Pekerjaan anak usia sekolah 1.1 Aktivitas sehari-hari masyarakat kawasan Kumuh. 1.2 Mata pencaharian masyarakat kawasan kumuh 2.1 Jumlah penduduk kawasan kumuh 2.2 Jenis kelamin penduduk kawasan kumuh 2.3 Kepadatan kawasan kumuh 2.4 Pertumbuhan penduduk 3.1 Latar belakang pendidikan orang tua 3.2 Pendidikan anak-anak masyarakat kawasan kumuh 4.1 Penghasilan masyarakat kawasan kumuh 4.2 Kebutuhan masyarakat kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mata pencaharian masyarakat kawasan kumuh. 2. Aktivitas masyarakat kawasan kumuh. 3. Kondisi penduduk kawasan kumuh 4. Kondisi pendidikan masyarakat kawasan kumuh 5. Pengalokasian anggaran pendidikan masyarakat kawasan kumuh 6. Kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan non formal 	Primer / sekunder	Analisis masyarakat kawasan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat / orang tua murid - Anak usia sekolah yang tidak bersekolah - Warga belajar - BPS - Masyarakat / orang tua murid
---	--	---	---	-------------------	-----------------------------------	---

		4.3 Penggunaan anggaran masyarakat kumuh 4.4 Alokasi anggaran pendidikan masyarakat kumuh				
3	Melakukan analisis sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat	3.1 Tujuan 3.2 Peserta didik. 3.3 Metode 3.4 Waktu. 3.5 Isi dan bahan ajaran 3.6 Tutor 3.7 Fasilitas / sarana dan prasarana 3.8 Layanan 3.9 Jarak 3.10 Pendidikan orang tua	Peranan masing-masing komponen pendidikan non formal dalam sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh	Primer / Sekunder	Analisis sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh	- Hasil analisis dari beberapa variabel - Data Pendidikan Dinas Dikmenti
4	Mengetahui sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat	4.1 Hasil kajian sistem pendidikan non formal 4.2 Hasil kajian masyarakat kawasan kumuh 4.3 Hasil analisis sistem pendidikan non formal	Hasil kajian dari analisis pendidikan non formal pada kawasan kumuh	Sekunder	Mengetahui sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh	- Hasil analisis dari beberapa variabel - Hasil analisis dari sistem pendidikan non formal

Sumber: Analisis Peneliti, 2008

Tabel 1.5 dibawah adalah tabel daftar nara sumber yang akan di ambil datanya di wilayah Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

**TABEL I.5
DAFTAR NARA SUMBER**

Nara Sumber	Kapasitas	Keterangan
I. Masyarakat:	Masyarakat yang berhubungan langsung dengan masalah	Berbagai pihak yang terkait dengan pendidikan non formal di kawasan kumuh
1.1. Orang tua murid / masyarakat		
1.2. Anak usia sekolah di kawasan kumuh		
1.3. LSM pendidikan		
1.4. Warga belajar		
II. Lembaga Pendidikan	Praktisi Pendidikan	
2.1. PKBM		
2.2. Lembaga kursus		
III. Instansi Pemerintah:	Regulator pendidikan	Instansi terkait
3.1 Dinas Dikmenti		

Sumber: Rancangan Penulis (2008)

1.9 Sistematika Penulisan

Untuk mencapai maksud dan tujuan penulisan ini, secara keseluruhan pembahasan dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: yang berisikan tentang latar belakang studi, permasalahan dan rumusan masalah, tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat studi, ruang lingkup substansial dan spasial, kerangka pemikiran, serta metode dan pendekatan studi.

BAB II SISTEM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN KAWASAN KUMUH:

berisi teori maupun pendapat para ahli mengenai pengertian pendidikan, sistem pendidikan non formal, kawasan kumuh, pengertian kawasan kumuh, teori marginal dan ketergantungan, serta pendidikan non formal pada kawasan kumuh.

BAB III TINJAUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DI KAWASAN KUMUH

KEMAYORAN JAKARTA PUSAT: berisi gambaran umum lokasi dimana kawasan kumuh berada, yaitu Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, dan sistem pendidikan non formal yang ada pada kawasan tersebut.

BAB IV ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN NON FORMAL PADA

KAWASAN KUMUH DI KEMAYORAN JAKARTA PUSAT: yang berisikan analisis secara sistematis mengenai sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI: yang berisikan kesimpulan

yang diperoleh dari hasil temuan dan rekomendasi yang diusulkan berdasarkan kesimpulan tersebut.

BAB II

SISTEM PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH

2.1 Pendidikan

2.1.1 Pengertian Pendidikan

Definisi pendidikan dikemukakan oleh para ahli antara lain: (a) *Dictionary of Education* menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimana ia hidup. Proses sosial dimana seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), dan dapat memperoleh, mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum (Dikti, 1984:19). (b) *Crow and Crow* menyebut pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi (Suprpto, 1995).

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan pendidikan dalam penelitian ini adalah: (1) suatu proses pertumbuhan yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan; (2) suatu pengarahan dan bimbingan yang diberikan kepada anak dalam pertumbuhannya; (3) suatu usaha sadar untuk menciptakan suatu keadaan atau situasi tertentu yang dikehendaki oleh seseorang atau masyarakat; (4) suatu pembentukan kepribadian dan kemampuan anak dalam menuju kedewasaan.

2.1.2 Teori Pendidikan

Ada empat teori pendidikan, antara lain: (1) pendidikan klasik; (2) pendidikan pribadi; (3) teknologi pendidikan dan (4) teori pendidikan interaksional.

1. Pendidikan klasik (*classical education*),

Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik, seperti perenialisme, essensialisme, dan eksistensialisme yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan dari pada proses.

2. Pendidikan pribadi (*personalized education*).

Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Materi pengajaran berasal dari pengalaman peserta didik yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya.

3. Teknologi pendidikan.

Teknologi pendidikan, lebih mengutamakan pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya lama. Dalam konsep teknologi pendidikan, isi pendidikan dipilih oleh tim ahli bidang-bidang khusus. Isi pendidikan berupa data-data obyektif dan keterampilan-keterampilan yang mengarah kepada kemampuan *vocational*.

4. Pendidikan interaksional.

Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Lebih dari itu, interaksi ini juga terjadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan lingkungan, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya (Sukmadinata, 1997:15-17).

2.1.3 Konsep Pendidikan

Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan, dikelompokkan menjadi:

1. Pendidikan Baca Tulis Fungsional

Dalam hal ini menunjukkan ketergantungan orang akan bahan bacaan. Realisasi pendidikan baca tulis fungsional adalah memberikan kecakapan membaca menulis dan menghitung yang fungsional bagi anak didik dan menyediakan bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimilikinya.

2. Pendidikan Vokasional

Pendidikan ini berperan sebagai program pendidikan luar sekolah bagi anak didik diluar batas usia sekolah, juga sebagai program pendidikan formal dan non formal dalam rangka *apprentice-skip training*. Pendidikan ini timbul karena out put pendidikan sekolah pada umumnya dirasakan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan ini lebih bersifat remedial dengan tujuan agar para lulusan pendidikan itu menjadi tenaga kerja produktif.

3. Pendidikan Profesional

Pada prinsipnya sama dengan sifat para pekerja buruh, karena apa yang berlaku pada pekerja buruh juga berlaku pada para profesional.

4. Pendidikan ke Arah Perubahan dan Pembangunan

Pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia bertujuan agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial, dan pembangunan merupakan konsekuensi dari pendidikan seumur hidup.

5. Pendidikan Kewarganegaraan dan Kedewasaan Politik

Tidak saja bagi warga negara biasa, melainkan para pemimpin masyarakatpun sangat membutuhkan pendidikan warga negara dan kedewasaan politik.

6. Pendidikan Kultural dan Pengisian Waktu Luang

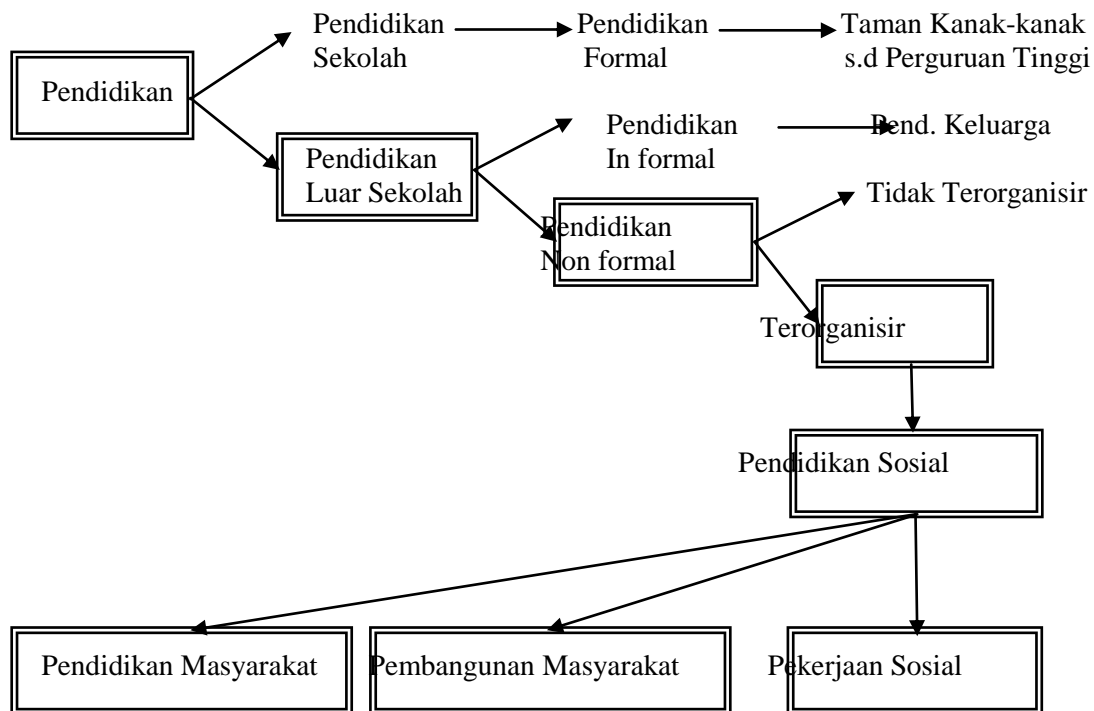
Seseorang disebut sebagai *educated man* harus memahami dan menghargai sejarah, kesusasteraan agama, filsafat hidup, seni dan musik bangsa sendiri (Ananda, 2005:48-51),

2.2 Jenis Pendidikan

Jenis pendidikan dalam sistem pendidikan nasional terdiri dari pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah: a) Pendidikan sekolah adalah jenis pendidikan yang berjenjang, berstruktur dan berkesinambungan, sampai dengan perguruan tinggi; b) Pendidikan luar sekolah adalah jenis pendidikan yang tidak terikat oleh jenjang dan struktur persekolahan, dan tidak berkesinambungan (Hasan, 2005:21).

Apabila dibagikan jenis pendidikan adalah seperti pada gambar bagan

2.1 dibawah ini:



GAMBAR 2.1
BAGAN JENIS PENDIDIKAN
Sumber : Joesoef, 2004:53

2.2.1 Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan luar sekolah merupakan sistem baru dalam dunia pendidikan yang bentuk dan pelaksanaannya berbeda dengan sistem sekolah yang ada. Pendidikan luar sekolah adalah dimana setiap kesempatan terdapat komunikasi yang teratur dan terarah diluar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan atau bimbingan sesuai dengan kebutuhannya.

Kegiatan dalam pendidikan luar sekolah bercirikan sebagai berikut: 1) adanya pengorganisasian; 2) adanya program pendidikan; 3) adanya urutan

materi; 4) jangka waktu belajar pendek; 5) tujuan pendidikan spesifik dan 6) ada subyek atau sasaran belajar. Sedangkan sasaran dari pendidikan luar sekolah adalah untuk pemuda dan orang dewasa (Tarigan, 2008:32).

Dalam pelaksanaannya, pendidikan luar sekolah memiliki ciri-ciri yang membedakan pendidikan luar sekolah dengan pendidikan yang lainnya, yaitu: 1) berkaitan dengan misi yang mendesak dan praktis; 2) tempatnya diluar kelas; 3) bukti memiliki ilmu pengetahuan adalah keterampilan; 4) tidak terikat ketentuan yang ketat; 5) pesertanya bersifat sukarela; 6) merupakan aktivitas sampingan; 7) biaya pendidikan lebih murah; dan 8) persyaratan penerimaan peserta lebih mudah (Winardi, 2002:54).

Pendidikan luar sekolah biasanya berorientasi "*life skill*" (kecakapan hidup) yang dapat menjadi alternatif untuk menekan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Pendidikan luar sekolah merupakan suatu proses pendidikan yang sasaran dan keluarannya berbeda dengan pendidikan sekolah dan bukan merupakan pendidikan sekolah yang dilakukan diluar waktu sekolah.

Pendidikan luar sekolah yang didalamnya terdapat *life skill* merupakan usaha sadar untuk menyiapkan, meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap daya saing. Dengan demikian akan mampu merebut peluang yang tumbuh dan berkembang serta mengoptimalkan sumber-sumber dilingkungan masing-masing (Tarigan, 2008:35).

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendidikan luar sekolah adalah jenis pendidikan yang dilakukan di luar sekolah (diluar pendidikan formal)

yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan pemerintah atau swasta yang mengacu pada kurikulum pemerintah.

2.2.2 Pendidikan Non Formal

Yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Pendidikan non formal berada antara pendidikan formal dan pendidikan in formal (Joesoef, 2004:79). Dalam hal lain didefinisikan bahwa pendidikan non formal adalah bagian dari pendidikan luar sekolah yang memiliki peraturan-peraturan yang tetap dan ada yang terorganisir dan ada pula yang tidak terorganisir yang berupa pendidikan sosial (Siagian, 2003:56).

Berpedoman dari dua teori tersebut, maka yang dimaksud dengan pendidikan non formal dalam penelitian ini adalah pendidikan yang merupakan bagian dari pendidikan luar sekolah yang dengan sadar dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan non formal yang mengacu pada kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, terorganisir dan memiliki fleksibilitas tinggi dalam hal pelaksanaan.

Perbedaan antara pendidikan formal dengan in formal dan pendidikan non formal:

TABEL II.1
PERBEDAAN ANTARA PENDIDIKAN NON FORMAL
DENGAN IN FORMAL

No	Pendidikan Informal	Pendidikan Non Formal
1	Tidak pernah diselenggarakan secara khusus di sekolah	Bisa diselenggarakan dalam gedung sekolah
2	Medan pendidikan yang bersangkutan tidak diadakan pertama-tama dengan maksud penyelenggaraan pendidikan	Medan pendidikan yang bersangkutan memang diadakan bagi kepentingan penyelenggaraan pendidikan
3	Pendidikan tidak diprogram secara tertentu	Pendidikan di program secara tertentu
4	Tidak ada waktu belajar yang tertentu	Ada waktu belajar yang tertentu
5	Metode mengajarnya tidak formal	Metode mengajarnya lebih formal
6	Tidak ada evaluasi yang sistematis	Ada evaluasi yang sistematis
7	Umumnya tidak diselenggarakan oleh pemerintah	Diselenggarakan oleh pemerintah dan pihak swasta

(Sumber: Joesoef: 2004:71)

Sedangkan perbedaan antara pendidikan non formal dengan pendidikan formal adalah sebagai berikut:

TABEL II.2
PERBEDAAN ANTARA PENDIDIKAN NON FORMAL
DENGAN PENDIDIKAN FORMAL

No	Pendidikan Non Formal	Pendidikan Formal
1	Pada umumnya tidak dibagi atas jenjang	Selalu dibagi atas jenjang yang memiliki hierarkis
2	Waktu penyampaian diprogram lebih pendek	Waktu penyampaian di program lebih panjang atau lebih lama
3	Usia siswa di sesuatu kursus tidak perlu sama	Usia siswa di sesuatu jenjang relatif homogen, khususnya pada jenjang-jenjang permulaan

No	Pendidikan Non Formal	Pendidikan Formal
4	Para siswanya umumnya berorientasi studi jangka pendek, praktis, agar segera dapat menerapkan hasil pendidikannya dalam praktek kerja (berlaku dalam masyarakat sedang berkembang)	Para siswa umumnya berorientasi studi buat jangka waktu yang relatif lama, kurang berorientasi pada materi program yang bersifat praktis dan kurang berorientasi ke arah cepat bekerja.
5	Materi mata pelajaran pada umumnya lebih banyak yang bersifat praktis kursus	Materi pelajaran pada umumnya lebih banyak bersifat akademis dan umum
6	Merupakan response dari kebutuhan khusus yang mendesak	Merupakan respon dari kebutuhan umum dan relatif jangka panjang
7	Credentials (ijazah dan sebagainya) umumnya kurang memegang peranan penting terutama penerimaan siswa	Credentials memegang peranan penting, terutama bagi penerimaan siswa pada tingkat pendidikan lebih tinggi

(Sumber: Joesoef: 2004:71)

2.2.2.1 Asas Pendidikan Non Formal

Seperti pada pendidikan formal, pendidikan non formal memiliki asas-asas yang menjadi pedoman bagi kegiatan ini:

a. Asas Inovasi

Asas inovasi merupakan asas penting dalam penyelenggaraan pendidikan non formal. Sebab setiap penyelenggaraan pendidikan non formal harus merupakan kegiatan bagi si terdidik. Di dalam asas inovasi, dapat dikemukakan norma nilai, metode, teknik kerja, cara mengorganisasi, cara berpikir, dan lain-lain yang merupakan kebutuhan bagi anak didik.

b. Asas Penentuan dan Perumusan Tujuan

Perumusan tujuan untuk program pendidikan merupakan langkah yang penting dan pertama harus dikerjakan bagi pendidikan non formal. Perumusan

tujuan berarti mempersoalkan tuntutan minimal apa yang harus dipenuhi agar si terdidik dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai manusia sehingga memiliki kehidupan yang layak.

c. **Asas Perencanaan dan Pengembangan Program Pendidikan Non Formal.**

Pada tahap perencanaan mempunyai nilai yang sangat penting oleh karena dapat membawa efektivitas dan efisiensi sesuatu kegiatan yang dilaksanakan. (Joesoef: 2004:78).

2.2.2.2 Tugas-tugas Pendidikan Non Formal

Tugas pendidikan non formal adalah membantu kualitas dan martabat individu dan warga negara dengan kemampuan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk mengendalikan perubahan dan kemajuan (Winardi, 2002:13).

Berbagai macam tugas pendidikan non formal yang lain adalah sebagai berikut:

- a. Menjawab kemajuan teknologi yang membuat usangnya hasil penemuan masa lampau, sekaligus membuka perspektif-perspektif baru;
- b. Menanggulangi adanya berbagai persoalan-persoalan baru, harus belajar tentang bagaimana menghadapinya, soal-soal mana tidak dapat diserahkan kepada lembaga pendidikan informal maupun lembaga pendidikan formal;
- c. Mengikuti perkembangan alat komunikasi, yang memperluas kemungkinan untuk mengikuti pendidikan tanpa datang ke sekolah atau yang memperluas kemungkinan untuk mengajukan program pendidikan secara sistematis tanpa mengumpulkan orang dalam satu tempat yang sama;

- d. Telah terbentuk bermacam organisasi sosial yang menambah medan pendidikan serta kebutuhan akan menyelenggarakan pendidikan non formal sangat dibutuhkan masyarakat (Winardi, 2002:45).

2.2.2.3 Karakteristik Pendidikan Non Formal

Disamping adanya tugas yang sama antara pendidikan formal dengan pendidikan non formal, maka pendidikan non formal mempunyai sifat-sifat yang lebih dari pada pendidikan formal yaitu:

- a. Lebih fleksibel dalam arti luas seperti tidak ada tuntutan syarat *credential* yang keras bagi anak didiknya, waktu penyelenggaraan disesuaikan dengan kesempatan yang ada artinya dapat beberapa bulan, beberapa tahun atau beberapa hari saja. Dari segi tujuan, pendidikan non formal dapat luas tujuannya, dan bisa spesifik sesuai dengan kebutuhan. Sedang para pengajarnya, juga tidak perlu syarat-syarat yang ketat, hanya dalam pelajaran yang diberikan ia lebih dari murid-muridnya serta metode dapat disesuaikan dengan besarnya kelas.
- b. Lebih efektif dan efisien untuk bidang-bidang pelajaran tertentu. Bersifat efektif oleh karena program pendidikan non formal bisa spesifik sesuai dengan kebutuhan dan tidak memerlukan syarat-syarat (guru, metode fasilitas lain) secara ketat, dan tempat penyelenggaraan dimana saja seperti di sawah, bengkel, rumah, pasar, tempat kerja dll;
- c. Pendidikan non formal bersifat *quick yielding* artinya dalam waktu yang singkat dapat digunakan untuk melatih tenaga kerja yang dibutuhkan, terutama untuk memperoleh tenaga yang memiliki kecakapan;

- d. Pendidikan non formal sangat *instrumental* artinya pendidikan yang bersangkutan bersifat luwes, mudah dan murah serta dapat menghasilkan waktu yang relatif singkat (Joesoef: 2004:103).

2.2.2.4 Syarat-syarat Pendidikan Non Formal

Syarat-syarat pendidikan non formal dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Jelas tujuannya, bahwa pendidikan non formal harus mempunyai tujuan yang jelas, karena hal ini merupakan sesuatu yang dirasakan manfaatnya oleh peserta.
- b. Ditinjau dari segi masyarakat, program pendidikan non formal harus menarik (*appealing*) baik hasil yang akan dicapai maupun cara-cara pelaksanaannya. *Appealing* sangat diperlukan karena pendidikan non formal harus memperoleh dukungan dari masyarakat serta partisipasi aktif masyarakat.
- c. Adanya integrasi pendidikan non formal dengan program-program pembangunan dalam masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu program pendidikan tidak akan berhasil kalau tidak berkaitan dengan kegiatan pembangunan di daerah yang bersangkutan (Joesoef: 2004:107).

2.2.3 Pendidikan Non Formal Terorganisir

Pendidikan non formal yang terorganisir merupakan suatu pendidikan di luar pendidikan formal yang dilakukan secara sistematis, berstruktur, dan berada dalam sebuah wadah lembaga pendidikan non formal tertentu (Sujana,

1992:32). Dalam hal lain disampaikan bahwa pendidikan non formal yang terorganisir adalah setiap kegiatan pendidikan selain pendidikan formal atau pendidikan diluar sistem persekolahan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat yang berada dalam sebuah lembaga atau organisasi tertentu yang bertujuan untuk melayani kebutuhan belajar khusus para peserta didik (Tasmian, 1994:44)

Dari definisi di atas, maka yang dimaksud dengan pendidikan non formal yang terorganisir adalah sebuah kegiatan sistem pendidikan non formal yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah yang prosesnya berada dalam sebuah lembaga atau organisasi tertentu yang menjadikan wadah kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaannya pendidikan non formal yang terorganisir akan mengacu pada sebuah rencana program tertentu dari sebuah lembaga pendidikan non formal yang merupakan wadah dari pendidikan non formal tersebut. Adanya aturan yang tidak mengikat namun sistematis yang menjadikan pendidikan non formal yang terorganisir akan berjalan sesuai dengan panduan-panduan yang telah disusun terdahulu.

Pendidikan non formal yang terorganisir, biasanya dilaksanakan pada suatu tempat tertentu dengan program dan waktu pelaksanaan tertentu dan lebih teratur dibanding dengan pendidikan non formal yang tidak terorganisir.

Yang dimaksud dengan pendidikan non formal yang terorganisir dalam penelitian ini adalah, lembaga pendidikan non formal dimana dalam pelaksanaannya berada dalam sebuah wadah yang disebut dengan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) dan lembaga-lembaga kursus keterampilan lainnya, yang

memiliki ciri-ciri antara lain: 1) waktu yang digunakan lebih pendek, 2) menggunakan waktu penuh, 3) merupakan usaha yang lebih intensif, 4) dapat mengubah baik jasmani maupun rohani (Joesoef, 2004:138).

2.2.4 Pendidikan Sosial

Istilah pendidikan sosial merupakan gabungan dari kata pendidikan dan sosial. Yang dimaksud dengan pendidikan sosial adalah mengenalkan anak pada soal masyarakat dan lingkungan budaya (Wahab, 2002:14). Pendidikan sosial adalah pendidikan non formal yang terorganisir yang bertujuan mengenalkan lingkungan sekitar dengan sasaran masyarakat suatu wilayah atau kawasan tertentu (Jacob, 2002:14).

Dalam hal yang sama juga disampaikan bahwa pendidikan sosial adalah sebuah sistem pendidikan non formal yang dilakukan secara terencana dan terorganisir yang program dan sasarannya adalah suatu masyarakat atau lingkungan budaya tertentu dalam sebuah kawasan atau lingkungan yang sifatnya heterogen (Manurung, 2000:36).

Dari beberapa pengertian di atas, yang dimaksud pendidikan sosial dalam penelitian ini adalah sebuah sistem pendidikan non formal yang dilaksanakan secara terorganisir di sebuah kawasan atau komunitas masyarakat tertentu yang sasaran dan programnya bertujuan untuk mengenal lingkungan atau masyarakat. Pendidikan sosial adalah *out of school education*, meskipun tidak semua *out of school education* dapat disebut sebagai pendidikan sosial. Hanya *organized out of*

school education activities sajarah yang dapat disebut pendidikan sosial (Shoji, 1993:33).

Pendidikan sosial bersifat teoritis dan praktis. Pendekatan-pendekatan sebelum pelaksanaan dan selama pelaksanaan dari program pendidikan sosial berlangsung menjadi sesuatu yang penting. Pendekatan dilakukan agar pelaksanaan program pendidikan sosial dapat memenuhi sasaran dan harapan yang telah ditentukan sehingga hasil yang dapat dicapai dapat bermanfaat oleh berbagai pihak (Joesoef, 2004: 106-114).

2.2.4.1 Pendidikan Masyarakat

Pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang ditujukan kepada orang dewasa termasuk pemuda di luar batas umur tertinggi kewajiban belajar, dan dilakukan di luar lingkungan dan sistem pengajaran sekolah (Santoso, 2003:90). Masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat yang sempurna, yaitu masyarakat yang memberi kesempatan kepada tiap-tiap individu untuk mengembangkan bakatnya, dan disumbangkan kembali kepada masyarakatnya.

Tujuan pendidikan masyarakat adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang rusak akibat penjajahan baik keseimbangan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat dan menanamkan sifat baru atau menebalkan sifat yang menipis yang kita butuhkan untuk menyusun masyarakat yang baru (Joesoef, 2004: 132-136). Sedangkan alasan-alasan mengapa masyarakat harus dibangun karena masyarakat merupakan *personlijkheid inwording* artinya masyarakat merupakan kepribadian yang sedang menjalani pertumbuhan dan masyarakat merupakan *the idea society* artinya masyarakat memberi kesempatan kepada

individu untuk mengembangkan bakatnya dan dikembangkan kembali kemasyarakat (Joesoef, 2004:136).

Dari beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan pendidikan masyarakat dalam penelitian ini adalah pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat dewasa diluar usia sekolah untuk mengembangkan kemampuan dirinya (bakat) demi kepentingan masyarakat itu sendiri.

2.2.4.2. Pembangunan Masyarakat Desa

Pembangunan masyarakat desa merupakan salah satu kegiatan yang menunjuk pendidikan sosial, dan bergerak di lapangan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Istilah pembangunan masyarakat desa, berasal dari pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat merupakan terjemahan dari *community development*, sehingga penambahan kata desa adalah penambahan asli Indonesia (Harold, 1994:13).

Pembangunan masyarakat desa sebagai suatu proses dimana orang-orang dari masyarakat kecil, merencanakan dan melaksanakan bersama untuk mencapai kepuasan. *Community development* adalah suatu proses atau kegiatan orang-orang dari suatu masyarakat tertentu. Kegiatannya dimulai dari apa yang dibutuhkan atau diinginkan setelah diadakan pembicaraan dan disusun dalam suatu rencana atau program. Pelaksanaan dari kegiatan tersebut adalah secara bersama-sama, berarti diminta adanya partisipasi masyarakat secara penuh, dengan tujuan untuk mencapai kepuasan (Joesoef, 2004:145).

Tujuan pembangunan masyarakat desa adalah meningkatkan kehidupan masyarakat desa, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang integral

daripada masyarakat desa, berdasarkan atas asas permufakatan bersama antara anggota-anggota masyarakat desa, dengan bimbingan serta bantuan alat-alat pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan dalam rangka suatu kebijaksanaan umum yang sama (Hardjosudarmo, 1981:67).

Pembangunan masyarakat desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau anggota masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan dengan membangkitkan semangat dan memupuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya singkat yang dapat dinikmati hasilnya.

2.2.4.3 Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan usaha atau kegiatan yang menunjuk atau bagian dari pendidikan sosial. Pekerjaan sosial adalah suatu usaha atau pekerjaan yang ditujukan langsung terhadap manusia yang tidak kuat dan tidak mencukupi agar mereka dapat terhindar atau melepaskan diri dari penderitaannya. Hal ini diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna dengan menggunakan metode *social case work*, *group work* dan *community organization* (Joesoef, 2004: 159).

Ciri-ciri atau karakteristik pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan sosial adalah suatu usaha pertolongan agar supaya orang seorang, keluarga dan gerombolan, dapat mengatasi rintangan untuk mencapai tingkatan hidup yang paling minimum didalam kesejahteraan sosial dan ekonominya;
2. Pekerjaan sosial adalah suatu aktivitas sosial yang dilaksanakan tidak untuk keuntungan perseorangan oleh pelaksanaan, pertikelir, tetapi dibawah

tanggung jawab organisasi baik pemerintah maupun bukan pemerintah, atau kedua-duanya. Pekerjaan sosial diadakan untuk kepentingan anggota masyarakat yang dianggap membutuhkan pertolongan tidak dapat dijalankan oleh perseorangan sendiri, melainkan oleh organisasi baik pemerintah, dari masyarakat atau kedua-duanya;

3. Pekerjaan sosial adalah aktivitas perhubungan, usaha agar supaya seorang, keluarga dan gerombolan yang menderita dapat menggunakan sumber-sumber yang ada dalam masyarakat yang perlu untuk mengatasi kebutuhannya (Joesoef, 2004:162).

Dari beberapa pendapat dan teori di atas, maka yang dimaksud dengan pekerjaan sosial dalam penelitian ini adalah kegiatan pendidikan sosial yang langsung ditujukan kepada masyarakat. Pekerjaan sosial memiliki program-program yang langsung bersentuhan dan merupakan kebutuhan masyarakat. Tujuan pekerjaan sosial adalah untuk menghasilkan atau memperoleh pendapatan baru agar masyarakat tersebut dapat melepaskan diri atau terhindar dari penderitaan hidup, terutama adanya permasalahan dalam bidang ekonomi.

2.2.5 Sistem Pendidikan Non Formal

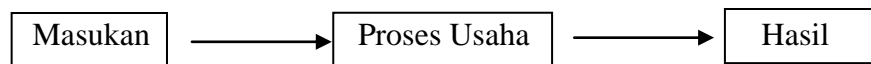
Sistem pendidikan non formal adalah himpunan dari bagian atau komponen-komponen pendidikan non formal yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem pendidikan non formal adalah suatu himpunan dari bagian-bagian atau elemen pendidikan non formal yang saling berkaitan secara alamiah dengan budi daya

manusia sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan terpadu. Sistem juga diartikan sebagai suatu cara atau metode (Hasan, 2005:107).

Sistem pendidikan non formal juga diartikan suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen pendidikan non formal sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil pendidikan non formal (Idris, 1987:14). Sistem pendidikan non formal adalah keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan non formal (Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 1989, 1989:bab I)

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan non formal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kesatuan unsur-unsur pendidikan non formal yang terdiri dari beberapa sumber daya yang saling berhubungan dan terpadu antara satu dengan yang lain bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan pendidikan non formal yang diinginkan.

Pendidikan non formal merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan non formal. Pendidikan non formal garis besarnya sama dengan pendidikan formal yaitu menyangkut tiga unsur pokok, yaitu unsur masukan, unsur proses usaha itu sendiri dan unsur hasil usaha. Hubungan ketiganya dapat dilihat seperti pada gambar 2.2 sebagai berikut:



Sumber : Ahmadi, 2003

GAMBAR 2.2

HUBUNGAN UNSUR POKOK PENDIDIKAN NON FORMAL

Setiap unsur dalam sistem pendidikan non formal saling berkaitan dan pengaruh mempengaruhi. Kelemahan salah satu unsur dalam sistem tersebut akan mempengaruhi seluruh sistem pendidikan non formal tersebut.

2.2.6 Komponen dan Jenis Sistem Pendidikan Non Formal

Komponen-komponen pendidikan non formal adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan dan prioritas, untuk mengarahkan suatu sistem yang berupa informasi tentang apa yang hendak dicapai dan prioritas apa yang didahulukan untuk mencapai tujuan dari terbentuknya sistem pendidikan non formal.
- b. Peserta didik atau sering di sebut warga belajar
Peserta didik adalah komponen yang diharapkan nantinya mengalami proses perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan pendidikan non formal.
- c. Cara penyampaian atau metode
Merupakan cara mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menjalankan sistem pendidikan non formal untuk mencapai tujuannya.
- d. Struktur dan jadwal waktu
Merupakan alur untuk mengatur pembagian, pemilihan waktu dalam melaksanakan kegiatan.

- e. Isi dan bahan pengajaran
Merupakan materi yang fungsinya untuk menggambarkan luas dan dalamnya bahan pelajaran yang harus dikuasai warga belajar.
- f. Guru atau tutor dan pelaksana
Merupakan subjek yang akan menyediakan bahan pelajaran dan menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik.
- g. Fasilitas atau sarana dan prasarana
Merupakan alat dan tempat terselenggaranya proses pendidikan (Ahmadi, 2003:164).

Jika ditinjau dari program, karakteristik dan sasaran, maka sistem pendidikan non formal diklasifikasikan menjadi beberapa jenis antara lain:

1. Sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada pelayanan, adalah sistem pendidikan non formal yang bersifat melayani. Artinya lembaga pendidikan non formal bertujuan untuk melayani masyarakat sekitarnya baik program, tujuan, metode, waktu pelaksanaan, fasilitas dan tutor sesuai dengan kemauan, kemampuan, kenyamanan, karakteristik dan kondisi masyarakat.
2. Sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada lingkungan sosial budaya, adalah suatu sistem pendidikan non formal yang programnya disesuaikan dengan lingkungan sosial budayanya.
 - a. Jika lembaganya berada di masyarakat pedesaan, maka program diarahkan pada program-program mata pencarian misalnya pertanian dan pendayagunaan sumber-sumber alam.

- b. Jika lembaganya berada di masyarakat perkotaan, maka program diarahkan pada program-program yang cepat terkena dampak perkembangan ilmu dan teknologi.
 - c. Jika lembaganya berada di masyarakat terpencil dan terasing, maka program diarahkan pada program-program yang ada di daerah terpencil dan terasing tersebut, misalnya memahat, menyulam dll.
3. Sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada kekhususan sasaran pelajaran, adalah suatu sistem pendidikan non formal yang memiliki program khusus menangani peserta didik yang memiliki kekhususan, antara lain:
 - a. Program yang khusus menangani peserta didik yang dapat digolongkan terlantar, seperti anak yatim piatu;
 - b. Program yang khusus menangani peserta anak didik yang mengalami perkembangan sosial dan emosional seperti anak nakal, korban narkoba dan wanita tuna susila;
 - c. Program yang khusus menangani peserta didik yang mengalami cacat mental dan cacat tubuh seperti tuna netra, tuna rungu dan tuna mental;
 - d. Program yang khusus menangani peserta didik yang karena sebab sosial tidak dapat mengikuti program pendidikan persekolahan.
4. Sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada pranata, adalah suatu sistem pendidikan non formal yang programnya diarahkan untuk menangani pranata antara lain:

- a. Program pendidikan keluarga, yaitu pendidikan non formal yang mengembangkan peserta didik untuk ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai moral, pandangan dan sikap hidup, ketrampilan dan kreativitas;
 - b. Program pendidikan perluasan wawasan, yaitu pendidikan dalam rangka peningkatan kemampuan berfikir, menambah pengetahuan, dan memperluas cakrawala tentang kehidupan berbangsa dan berkeluarga;
 - c. Program pendidikan ketrampilan dalam rangka mengembangkan profesionalisme pekerjaan sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa guna meningkatkan taraf hidup.
5. Sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada segi pelembagaan program, adalah suatu sistem pendidikan non formal yang programnya diarahkan keseluruhan proses pengintegrasian antara program pendidikan non formal dengan pembangunan masyarakat, misalnya program antar sektoral dan swadaya masyarakat seperti PKK, PKN, P2WKSS, perencanaan desa dan program-program pembangunan desa lainnya (Sudarmadi, 1993: 121)

2.3 Teori Lokasi dan Pelayanan

2.3.1 Teori Lokasi

Pada teori lokasi (*central place theory*) bahwa konsep lokasi dilakukan dengan pendekatan:

- a. Jangkauan barang atau pelayanan. Yang dimaksud dengan jangkauan barang adalah berapa jauh jarak yang mampu ditempuh untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga tertentu.
- b. Batas ambang permintaan. Batas ambang didefinisikan sebagai tingkat permintaan minimal yang dibutuhkan untuk mendukung keberadaan fungsi tertentu (Daldjoeni, 1997; 134-135).

Untuk menentukan lokasi suatu fasilitas umum yang dapat memberikan pelayanannya secara optimal, dapat dilakukan melalui beberapa strategi, meliputi:

- a. Adanya gambaran yang jelas terhadap karakteristik target populasi konsumen yang telah teridentifikasi.
- b. Menentukan distribusi ruang dari target populasi yang telah diidentifikasi melalui unit-unit area.
- c. Menentukan wilayah-wilayah mana yang berpotensi untuk dialokasikan sebuah fasilitas dengan pendekatan kriteria kepentingan pelayanan.
- d. Menentukan secara pasti terhadap lokasi fasilitas dalam masing-masing area pelayanannya (Bourne, 1982: 371-381).

2.3.2 Sarana Pelayanan

Konsep kemudahan yang digunakan dalam pelayanan fasilitas kepada masyarakat, meliputi:

- a. Total jarak dari semua populasi atau konsumen ke lokasi fasilitas adalah minimum. Hal ini disebut kriteria “minimal jarak” (*aggregate distance minimization*), disebut juga minimasi jarak rata-rata, dan dinamakan kriteria jarak rata-rata (*average distance*).

- b. Jarak terjauh minimum dari populasi atau konsumen terhadap fasilitas. Biasanya disebut sebagai kriteria “jarak minimal” (*minimal distance*).
- c. Jumlah populasi di daerah sekitar fasilitas pelayanan tersebut sebanding. Hal ini disebut sebagai kriteria “pelayanan sebanding” (*equal assignment*).
- d. Jumlah populasi disekitar fasilitas pelayanan selalu lebih besar daripada jumlah populasi yang ditentukan. Ini disebut kriteria “ambang batas” (*threshold constraint*).
- e. Jumlah populasi di daerah sekitar fasilitas pelayanan tidak lebih besar daripada jumlah populasi yang ditentukan. Hal ini disebut kriteria “ketetapan kapasitas” (*capacity constraint*) (Rushton 1979: 32).

Keefektifan pelayanan kota dicerminkan oleh nilai sarana dan prasarana kota secara *spatial* maupun secara fungsional. Nilai keefektifan pelayanan lingkungan kota ini didasari oleh pertimbangan ukuran kualitas, yaitu:

- a. Kemudahan (*accesssibility*) yaitu kemudahan memperoleh pelayanan dan kemudahan untuk dicapai.
- b. Menyenangkan (*convenient*) yaitu yang serba mudah memperoleh pelayanan yang memadai dan menyenangkan.
- c. Kenyamanan (*comfort*) yaitu lingkungan yang nyaman dan asri serta terbebas dari kekumuhan dan kemacetan.
- d. Keamanan dan keselamatan (*safety and security*) yaitu lingkungan yang terjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai ancaman seperti kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, dll.

- e. Keandalan (*reliability*) kelengkapan barang kebutuhan, waktu yang sesuai dengan kebutuhan pemakai dan kemudahan memperoleh informasi (Criss, 1985: 5-6).

2.3.3 Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah, pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah. Pelayanan publik dibagi menjadi tiga: a) Pelayanan Primer, yaitu pelayanan yang paling mendasar; b) Pelayanan Sekunder, yaitu pelayanan pendukung namun bersifat kelompok spesifik; c) Pelayanan Tersier, yaitu pelayanan yang berhubungan secara tidak langsung kepada publik (Dwidjowijono, 2003:23).

Pelayanan primer atau pelayanan publik minimum yang dilakukan oleh pemerintah meliputi : a) Pelayanan kewargaan, b) Pelayanan kesehatan, c) Pelayanan pendidikan, d) Pelayanan ekonomi. Sedangkan kebijakan publik di definisikan sebagai berikut: a) Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengenai langsung atau tidak langsung semua anggota masyarakat di daerah kekuasaan tertentu; b) Kebijakan publik mengikat bagi anggota masyarakat di daerah kekuasaan tertentu, karena kebijaksanaan publik mengikat, maka selalu timbul pertanyaan apa yang menjadi atau harus menjadi ukuran kebijaksanaan (Hoogerwerf, 1994:24)

Pelayanan publik dinyatakan prima bila pelayanan tersebut memuaskan pelanggan yaitu melebihi standar yang ditetapkan atau minimal sama dengan standart, baik kepuasan pelanggan maupun standart pelayanan. Kepuasan

pelanggan adalah efektivitas dari sistem organisasi yang mampu membantu pelanggan memenuhi kebutuhannya secara optimal (Dye, 2003:16).

Dari beberapa teori tersebut di atas, yang dimaksud dengan pelayanan publik dalam penelitian ini adalah pelayanan yang diberikan pemerintah yang berupa pelayanan primer, sekunder dan tersier yang biasanya tidak berorientasi laba baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang - undangan.

2.4 Kawasan Kumuh

2.4.1 Pengertian

Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya (Suparlan:1996:14).

Ciri-ciri pemukiman kumuh adalah: 1) Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai; 2) Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruang mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin; 3) Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang yang ada, sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidak berdayaan ekonomi penghuninya; 4) Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas; 5) Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi

tidak homogen. Warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. 6) Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal (Suparlan: 1996:35).

Sedangkan ciri-ciri masyarakat kumuh adalah sebagai berikut: 1) Pendapatan rendah; 2) Pengetahuan rendah; 3) Pendidikan rendah; 4) Kepedulian terhadap lingkungan rendah; 5) Mudah terjadi konflik; 6) Mata pencaharian pada umumnya pada sektor informal; 7) Solidaritas tinggi; 8) Kurang gizi.

Banyak pendapat dari para ahli yang mengatakan bahwa tumbuh dan menjamurnya kawasan kumuh di perkotaan faktor penyebab utamanya adalah tekanan ekonomi, tingkat kepadatan penduduk di kota, proses urbanisasi, dan keterbatasan lahan di kota (Todaro, 1998:122).

Dari beberapa teori yang ada di atas, maka yang dimaksud dengan kawasan kumuh dalam penelitian adalah kawasan dimana rumah dan tempat tinggal masyarakat tersebut tidak sesuai dengan standar kebutuhan, kepadatan bangunan, rumah sehat, kebutuhan air bersih, sanitasi, prasarana jalan, ruang terbuka dan fasos lainnya dan biasanya dibarengi dengan kondisi masyarakat yang miskin dan kerja di sektor informal.

2.4.2 Penyebab Kawasan Kumuh

Pertumbuhan penduduk di kota pada umumnya karena adanya faktor pendorong (*push factor*) yaitu menurunnya daya dukung pedesaan, baik menyempitnya lahan pertanian maupun kecilnya modal yang masuk, dan juga karena adanya faktor penarik (*pull factor*) berupa peluang-peluang yang menarik

untuk mendapatkan lapangan pekerjaan pada kegiatan industri, perdagangan, dan transportasi modern. Perbedaan tingkat pendapatan, keleluasaan pilihan untuk maju, gaya hidup yang lebih menarik bagi kaum muda di perkotaan merupakan daya tarik yang mengajak tenaga muda untuk mengalir ke kota (Bintarto, 1984:34).

Penyebab adanya kawasan kumuh atau peningkatan jumlah kawasan kumuh yang ada di kota adalah:

1. Faktor ekonomi:

Faktor ekonomi atau kemiskinan menjadi pendorong bagi pendatang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota. Dengan keterbatasan pengetahuan, ketrampilan, modal, maupun adanya persaingan yang sangat ketat sesama pendatang, maka pendatang hanya dapat tinggal dan membangun rumah dengan kondisi yang sangat minim di kota. Disisi lain pertambahan jumlah pendatang yang sangat banyak mengakibatkan pemerintah tidak mampu untuk menyediakan hunian yang layak.

2. Faktor bencana

Faktor bencana dapat pula menjadi salah satu pendorong perluasan kawasan kumuh. Adanya bencana, baik bencana alam seperti banjir, gempa, gunung meletus, longsor maupun bencana akibat perang atau pertikaian antar suku juga menjadi penyebab jumlah rumah kumuh meningkat dengan cepat (Todaro, 1998:140).

2.4.2.1 Pendekatan Teori Marginalitas

Gejala perkampungan miskin di perkotaan dapat dilihat dari teori marginalitas. Teori marginalitas melihat gejala perkampungan miskin yang dicirikan dengan lingkungan permukiman yang kumuh, sebagai produk kaum migran pedesaan yang secara sosial, ekonomi, budaya, dan politik tidak mampu berintegrasi dengan kehidupan masyarakat kota (Surbakti, 1984: 66).

Secara singkatnya, bahwa teori marginalitas ini mengajukan proposisi atau pendapat seperti yang ditulis oleh Perlman, sebagai berikut: 1) Secara sosial, penghuni perkampungan miskin itu mempunyai "*disorganisasi internal*", seperti kurang mempunyai kohesi sosial yang berkeinginan untuk berkelompok dan secara individu mereka kesepian; 2) Mereka juga mengalami "*isolasi eksternal*", seperti kurang mampu berintegrasi kedalam kehidupan kota, mereka kurang memanfaatkan institusi-institusi perkotaan yang ada, misalnya lembaga, dinas, dan institusi pelayanan kota lainnya;

Secara ekonomis, mereka dianggap "parasit" karena lebih banyak menyerap sumber-sumber yang ada di kota ketimbang memberikan sumber-sumber kepada masyarakat kota. Mereka juga mempunyai ekonomi parohial, seperti gaya hidup yang boros, konsumtif, cepat puas, tak berorientasi pasar, dan kurang berjiwa entrepreneurship. Secara politis, mereka dianggap apatis, karena tidak berintegrasi dengan kehidupan di kota, serta kurang berpartisipasi dalam pembangunan atau dalam kehidupan politik kota. Mereka mempunyai kecenderungan berperilaku radikal atau brutal dalam arti mudah terpengaruh oleh isu-isu yang negatif.

2.4.2.2 Pendekatan Teori Ketergantungan (Struktural)

Teori marginalitas, adalah pendekatan melalui teori ketergantungan yang bersifat "struktural" didalam menjelaskan gejala tumbuhnya perkampungan miskin atau permukiman kumuh di perkotaan (Surbakti, 1984:67). Dari sudut teori ketergantungan, bahwa gejala perkampungan miskin di perkotaan itu sebagai bentuk produk penetrasi kapitalis terhadap masyarakat pedesaan yang secara struktural kondisinya "pincang" bila dibandingkan dengan kondisi perkotaan.

Situasi dan kondisi di pedesaan tersebut menyebabkan mereka mencari jalan keluar, misalnya dengan melakukan migrasi ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan dan menambah penghasilan. Dengan kata lain terdapat faktor pendorong (*push factor*), yaitu pengangguran dan kemiskinan di pedesaan, sedangkan faktor lain adalah adanya faktor penarik (*pull factor*), yaitu daya tarik dan harapan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan kota yang pesat sebagai penyebab mereka pindah ke kota.

Kebanyakan kaum migran tidak dibekali ketrampilan, keahlian, dan pendidikan yang memadai sehingga dengan sendirinya sulit bagi mereka untuk dapat memasuki sektor ekonomi formal, seperti perusahaan negara, swasta, atau kantor-kantor birokrasi pemerintahan di kota besar.

Penghuni perkampungan miskin dapat dipisahkan berdasarkan beberapa cara seperti:

- a. Secara sosial:
 - Penghuni perkampungan miskin memiliki organisasi internal dan koehsi sosial, seperti adanya asosiasi RT/RW;

- Mereka enggan kembali ke desa karena di desa tidak ada harapan lagi untuk hidup;
- b. Secara budaya:
- Mereka mempunyai aspirasi "*borjuis*" sebagaimana kelas menengah atas, yaitu dalam hal kemauan untuk bekerja keras, bertekad meninggalkan kemiskinan, bersikap berdikari.
- c. Secara ekonomi:
- Mereka memberi banyak kepada kotanya daripada apa-apa yang mereka terima dari kota;
 - Mereka mempunyai pekerjaan di kota, misalnya dengan membersihkan dan memanfaatkan sisa-sisa konsumsi orang lain (terutama bagi pemulung);
- d. Secara politis:
- Mereka jauh dari sikap apatis, tidak aktif berpolitik, karena mereka menaruh perhatian pada isu-isu yang menyangkut kehidupan mereka;
 - Perilaku berpolitiknya pun seperti kebanyakan warga masyarakat lainnya, misalnya ikut memilih dalam pemilu atau ikut berkampanye, ikut serta dalam kegiatan RT/RW, dan membayar iuran sesuai dengan kemampuannya (Surbakti, 1984: 68).

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa teori ketergantungan ini menyimpulkan adanya perkampungan miskin atau permukiman kumuh di perkotaan tersebut. Secara sosial, mereka disisihkan oleh kehidupan masyarakat;

secara kultural, mereka dihina dan dijadikan "kambing hitam" sebagai pelaku kriminal; secara ekonomi, mereka dieksploitasi dan diperas habis-habisan tenaganya (dengan upah yang murah); secara politis, mereka terbelenggu dengan tidak mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) dalam pengambilan keputusan.

2.5 Klasifikasi Kawasan Permukiman Kumuh.

Untuk mengidentifikasi jenis atau tipe kawasan permukiman kumuh maka dilakukan penggolongan atau klasifikasi. Hal ini digunakan sebagai langkah dalam penanganan selanjutnya pada kawasan tersebut agar mudah menemukenali dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi di kawasan permukiman kumuh.

Kawasan kumuh diklasifikasikan berdasarkan pada karakter fisik dan aspek legalitasnya. Ada dua jenis permukiman kumuh yaitu: a) Kategori *Slum*, yaitu kawasan kumuh tetapi diakui absah sebagai daerah permukiman; b) Kategori *Squatter Settlement*, yaitu: pemukiman kumuh liar, yang menempati lahan yang tidak ditetapkan untuk kawasan hunian, misalnya: di sepanjang pinggir rel kereta api, di pinggir kali, di kolong jembatan, di pasar, di kuburan, di tempat pembuangan sampah, dan lainnya. Dari segi legalitasnya, kategori permukiman liar (*squatter*) ini umumnya menempati lahan yang bukan dalam hak penguasaannya, misalnya pada lahan kosong yang ditinggal pemiliknya atau pada lahan kosong milik negara (Budihardjo, 1997: 106).

2.6 Sistem Aktivitas

Adanya proses pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi di tempat asal menyebabkan timbulnya pergerakan antara dua atau lebih lokasi guna lahan yang berbeda pada suatu kawasan perkotaan (Bourne, 1982:250). Pola guna lahan di daerah perkotaan mempunyai hubungan yang erat dengan pola pergerakan penduduk. Pola guna lahan akan mempengaruhi pola pergerakan dan jarak. Gerak manusia kota dalam kegiatannya adalah dari rumah ke tempat kerja, ke pasar, ke toko, ke tempat hiburan, kemudian bagi penduduk menjembatani jarak antara berbagai pusat kegiatan disebut aksesibilitas (Jayadinata, 1999: 156).

Sistem pergerakan (sistem aktivitas) terjadi sebagai akibat dari adanya aktivitas yang dilakukan dengan didukung oleh tersedianya sistem jaringan transportasi. Sistem aktivitas merupakan fungsi dari penduduk dengan segala kegiatannya (seperti perumahan, perkantoran, perdagangan, dan sebagainya). Sedangkan sistem jaringan transportasi merupakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung terjadinya pergerakan (misalnya jaringan jalan, kereta api, pesawat terbang, terminal, pelabuhan, dan sebagainya) agar tercipta suatu sistem pergerakan yang lancar, aman, cepat, nyaman dan murah sesuai dengan lingkungannya.

2.7 Landasan Operasional Pelaksanaan Pendidikan Non Formal

2.7.1 Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas nasional, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai

golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat IPM hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM sebelum krisis.

Beberapa kebijakan dan program strategis yang disusun dalam rangka memperluas pemerataan dan akses pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Memperluas akses bagi anak usia sekolah 7–15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak atau belum terlayani di jalur pendidikan formal untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan di jalur non formal;
2. Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan keaksaraan melalui jalur pendidikan nonformal. Perluasan kesempatan bagi penduduk buta aksara dilakukan dengan menjalin berbagai kerjasama dengan stakeholder pendidikan, seperti organisasi keagamaan, organisasi perempuan, dan organisasi lain yang dapat menjangkau lapisan masyarakat, serta perguruan tinggi;
3. Perluasan Pendidikan Wajar pada Jalur Non-Formal; termasuk kebijakan strategis untuk mendukung program Wajar. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi (APM/APK) dikdas melalui program Paket A dan B. Program ini sangat strategis untuk menjangkau peserta didik yang memiliki berbagai keterbatasan untuk mengikuti pendidikan formal,

terutama anak-anak dari keluarga tidak mampu, daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah konflik, atau anak-anak yang terpaksa bekerja;

4. Pendidikan Kecakapan Hidup; merupakan kebijakan strategis bagi peserta didik yang orang tuanya miskin dan orang dewasa miskin dan/atau pengangguran. Pendidikan ini akan memberikan kompetensi yang dapat dijadikan modal untuk usaha mandiri atau bekerja, mengingat masih besarnya jumlah mereka, maka kegiatan strategis ini menjadi sangat penting peranannya bagi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran (Depdiknas 2005-2009, 2005: 47-53)

2.7.2 Strategi Penuntasan Renstra dalam Bidang Pendidikan Non Formal

Usaha pemerintah menuntaskan rencana strategis dalam bidang non pendidikan formal adalah dengan menterjemahkan misi-misi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. Misi tersebut antara lain: mendorong terwujudnya kelembagaan kursus dan kursus para-profesi yang berorientasi pada peningkatan kecakapan hidup yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta pelayanan yang semakin meluas, adil dan merata, khususnya bagi penduduk miskin dan penganggur terdidik, dapat bekerja dan atau berusaha secara produktif, mandiri dan profesional (Direktorat Jenderal PLS, 2007)

Dalam hal lain disebutkan bahwa untuk melakukan pembinaan kursus dan kelembagaan, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas kelembagaan kursus dan pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mewujudkan kelembagaan kursus yang berorientasi pada wirausaha pedesaan, wirausaha perkotaan, manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan kursus yang

berlandaskan pada penjaminan mutu, standarisasi, akreditasi uji, profesi dan sertifikasi serta beorientasi pada peluang tenaga kerja yang bermutu, relevan dan berdaya saing (Dirjen PLS, 2007).

2.7.3 Pokok-pokok Pembangunan Pendidikan Non Formal

Pembangunan pendidikan non formal di Indonesia di atur dengan adanya pokok-pokok pembangunan pendidikan non formal yang tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Nomor: Kep-120 / E / KP/ 2007 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Pendidikan Non Formal. Dalam keputusan tersebut disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan nonformal sebagai arah pelaksanaan kegiatan, baik di tingkat pusat maupun di daerah (Dirjen PLS, 2007).

Pokok-pokok kebijakan pembangunan pendidikan nonformal tahun 2007 mencakup: 1) Program pendidikan anak usia dini; 2) Program pendidikan kesetaraan paket A dan paket B dalam rangka pelaksanaan wajib belajar; 3) Program pendidikan non formal, meliputi: a) Program pendidikan keaksaraan; b) Program pendidikan kesetaraan paket C; c) Program pendidikan kursus dan PKH; 4) Program peningkatan budaya baca dan pembinaan perpustakaan; 5) Program pengarus utamaan gender (PUG) bidang pendidikan; 6) Program revitalisasi kelembagaan PNF dan Satuan PNF lainnya (Dirjen PLS, 2007).

Dalam keputusan tersebut juga disebutkan bahwa kepada para kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan jajarannya diminta agar menjabarkan Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Pendidikan Non Formal

Tahun 2007 ke dalam program masing-masing satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya secara terukur, sistematis, dan akuntabel (Kepdirjen, 2007). Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi telah menjabarkan keputusan tersebut dalam sebuah program yaitu Program Pendidikan Non Formal dan Informal dengan tolok ukur capaian program 1) meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan berbasis masyarakat meliputi pendidikan keterampilan dan kecakapan hidup (*life skill*); 2) Pendidikan keaksaraan; dan 3) Pendidikan kesetaraan yaitu program kejar paket A, B, C dan informal (Dirjen PLS, 2008)

2.8 Sistem Pendidikan Non Formal pada Kawasan Kumuh.

Ciri-ciri masyarakat kumuh ditandai dengan ketidak berdayaan dari segi ekonomi. Masyarakatnya berpenghasilan rendah dengan jumlah keluarga yang besar, sehingga unit kost masing-masing jiwa menjadi sangat rendah. Biasanya penghasilan yang didapatkan sebagian besar hanya untuk mencukupi kebutuhan primer, yaitu makan. Sedangkan kebutuhan lain seperti sandang dan papan kurang mendapat porsi. Apalagi untuk kebutuhan pendidikan, sangat jauh dari keterjangkauan, yang mengakibatkan sangat banyak anak usia sekolah pada kawasan kumuh tidak dapat mengakses pendidikan baik formal maupun non formal.

Sistem pendidikan non formal pada suatu wilayah ditentukan oleh peranan stakeholder pendidikan non formal pada wilayah tersebut yang dapat menempatkan diri sesuai fungsi komponen pendidikan non formal pada masing-masing wilayah (Hamalik, 2005: 54).

Dari pemikiran tersebut di atas dapat diterjemahkan bahwa sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh adalah serangkaian komponen pendidikan non formal yang terdiri dari komponen-komponen masyarakat pada kawasan kumuh. Peran dan fungsi pendidikan non formal yaitu: 1) sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 2) penyebab perkembangan penduduk dan mobilitas penduduk; 3) akan berdampak pada meningkatnya pendapatan suatu wilayah (dibangun sarana pendidikan, biasanya akan diikuti oleh tumbuhnya pusat-pusat bisnis); dan 4) akan membuka kesempatan kerja (dimana dibangun sarana pendidikan, maka disitu pula akan membutuhkan para pekerja).

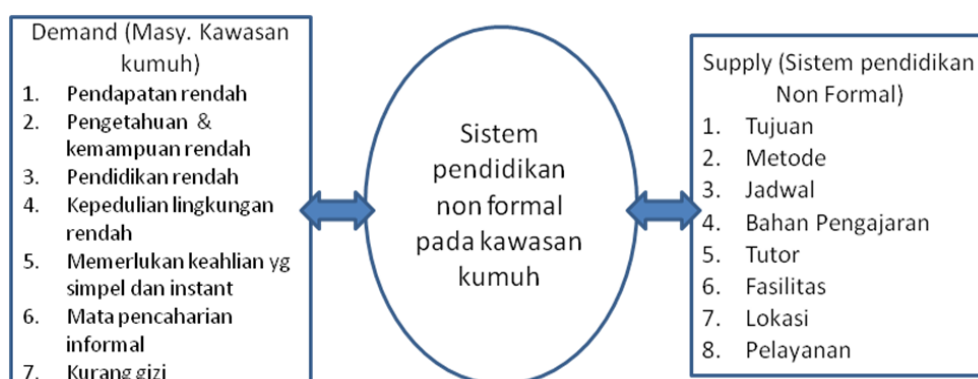
Pembangunan pendidikan pada kawasan kumuh akan berada dalam penataan ruang suatu wilayah, dimana model dan jenisnya tergantung kepada keberadaan perkembangan penduduk dan mempunyai struktur, kultural budaya, tanah, pembiayaan dan bentuk yang berbeda-beda, yang akan menjadikan ciri tersendiri suatu kota.

Perkembangan pembangunan sarana pendidikan (sekolah) yang merupakan bagian-bagian kota tidaklah sama. Pembangunan sekolah tergantung pada karakteristik dan kebutuhan masyarakat, potensial sumber daya, kondisi fisik alam serta fasilitas kota terutama berkaitan dengan prasarana tersebut (Herlianto, 2002:132).

Dari beberapa teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh adalah komponen-komponen pendidikan non formal yang membentuk satu rangkaian pada suatu kawasan

kumuh dimana komponen-komponen pendidikan non formal tersebut akan berada dalam penataan ruang wilayah, dengan model dan jenisnya tergantung kepada keberadaan dan kondisi masyarakat yang mempunyai struktur, kultural budaya, pembiayaan dan bentuk yang berbeda-beda, yang akan menjadikan ciri tersendiri suatu wilayah.

Secara sederhana sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh dapat diilustrasikan pada gambar 2.3 di bawah ini.



Sumber: Analisis Peneliti, 2008

GAMBAR 2.3
BAGAN SISTEM PENDIDIKAN NON FORMAL PADA
KAWASAN KUMUH

2.9 Sintesis Kajian Literatur

Penelitian ini bertolak dari kondisi yang terjadi pada dunia pendidikan di kawasan kumuh Kemayoran Jakarta Pusat. Pada kawasan tersebut sangat minim jumlah anak usia sekolah yang menempuh pendidikan non formal. Seharusnya pendidikan non formal memiliki kekuatan pada lokasi tersebut. Karena pendidikan non formal merupakan sebuah lembaga yang dikelola lebih fleksibel,

mengikuti kondisi dan karakteristik lingkungannya. Padahal pada kawasan tersebut sudah tersedia sarana prasarana pendidikan non formal serta beberapa kemudahan yang diberikan pemerintah. Kajian dilakukan dengan melakukan analisis pada sistem pendidikan non formal, masyarakat pada kawasan kumuh.

Konsep pendekatan sintesis pendidikan non formal pada kawasan kumuh adalah suatu aktivitas masyarakat yang berada dalam penataan ruang suatu wilayah. Dimana model, jenis serta sistemnya tergantung kepada keberadaan dan kondisi masyarakat yang mempunyai struktur, kultural budaya, tingkatan ekonomi yang beragam, pembiayaan dan bentuk-bentuk yang berbeda yang akan menjadikan ciri tersendiri dari suatu wilayah.

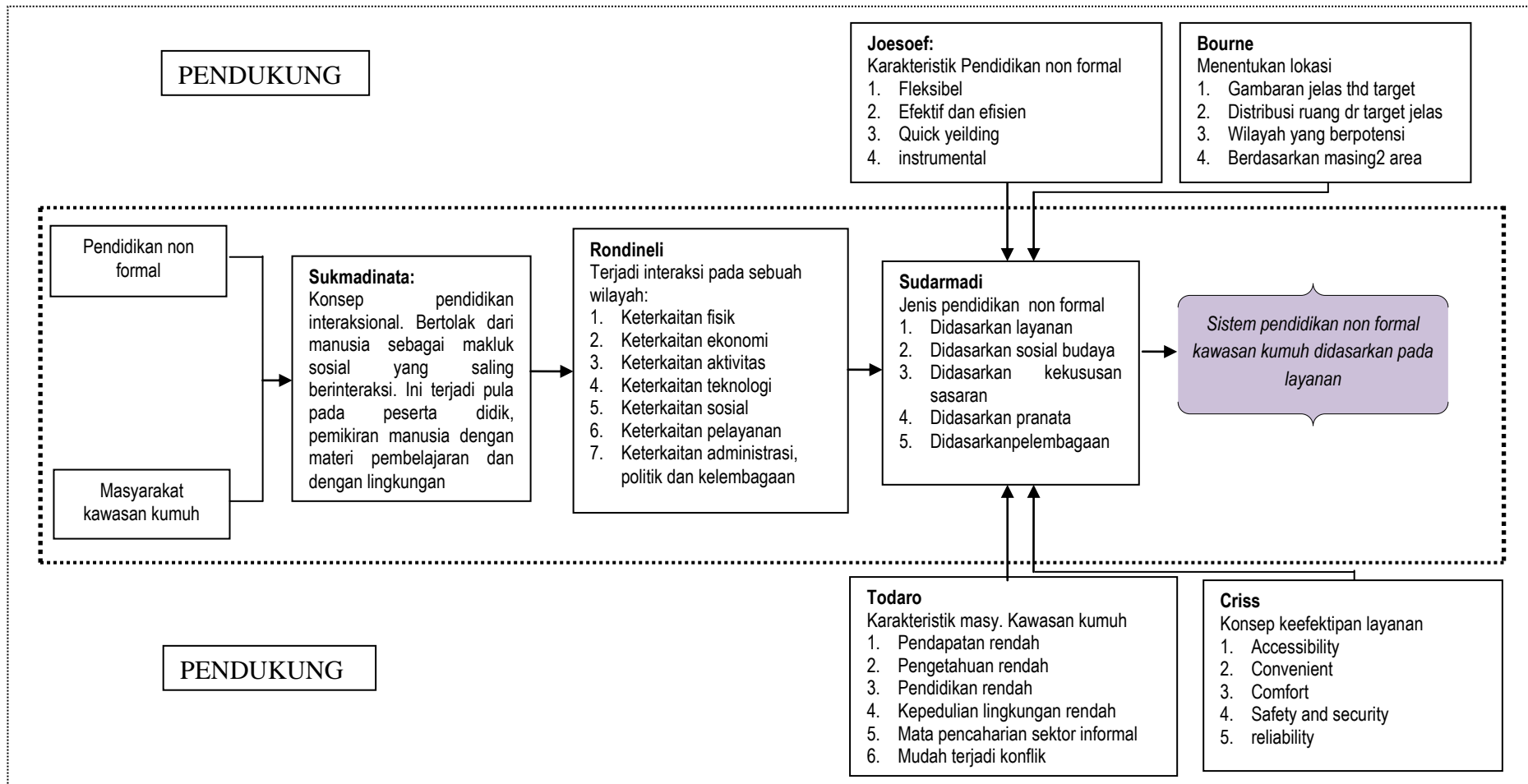
Pendidikan non formal pada kawasan kumuh memiliki tugas-tugas membantu meningkatkan kualitas dan martabat serta kemampuan dan kepercayaan diri sendiri pada masyarakat. Komponen-komponen yang merupakan bagian suatu sistem yang melaksanakan fungsi untuk menunjang usaha mencapai tujuan antara lain adanya warga belajar, pendidik, sarana dan sistem itu sendiri.

Mekanisme pendidikan non formal pada kawasan kumuh yaitu menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat pada kawasan kumuh dengan tidak terikat oleh waktu belajar dan sistem belajar yang mengikat.

Sedang persyaratan yang harus dipenuhi pendidikan non formal pada kawasan kumuh adalah: harus jelas tujuan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat, ditinjau dari sisi masyarakat bahwa pendidikan non formal pada kawasan kumuh harus menarik baik ditinjau dari segi hasil yang akan dicapai maupun cara

pelaksanaannya, dan adanya integrasi pendidikan non formal dengan program-program pembangunan dalam masyarakat pada kawasan kumuh.

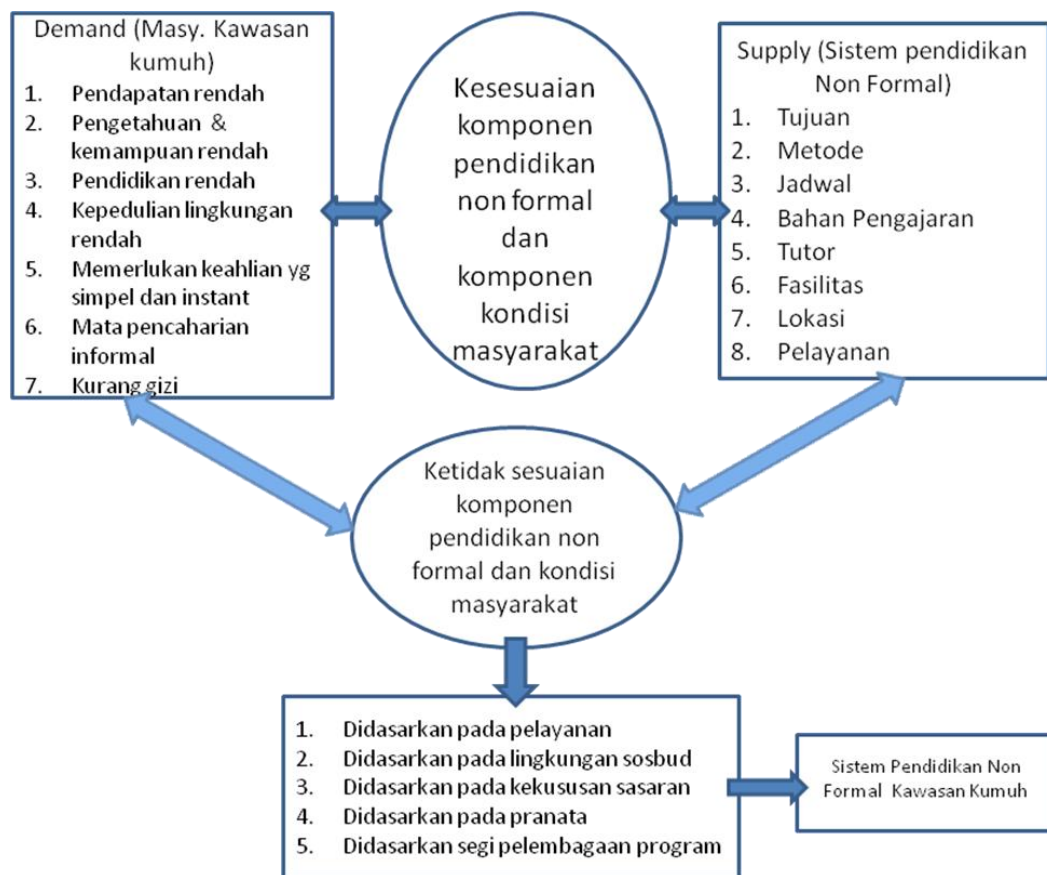
Pendekatan konsep sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh dapat diperhatikan pada gambar 2.4 di bawah ini:



Sumber : Analisis peneliti, 2008.

GAMBAR. 2.4
KONSEP PENDEKATAN SISTEM PENDIDIKAN NON FORMAL KAWASAN KUMUH

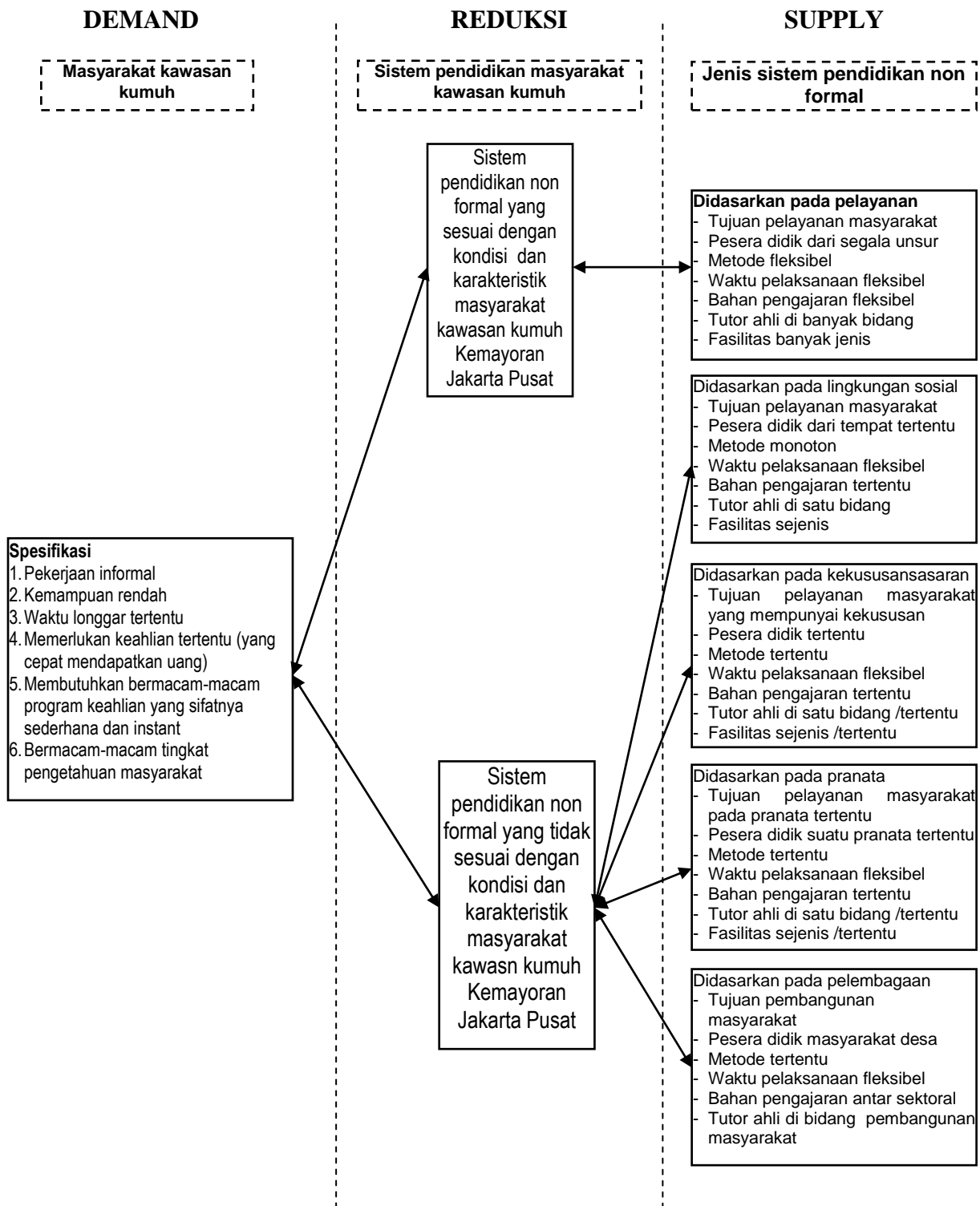
Sedangkan Analisis kajian literatur sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh dapat dilihat pada gambar 2.5 bagan di bawah ini:



Sumber: Analisis peneliti, 2008

GAMBAR 2.5
BAGAN ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH

Untuk lebih detail mengenai sintesa kajian literatur dapat dilihat pada gambar bagan 2.6 dibawah ini.



GAMBAR 2.6
DIAGRAM SINTESIS SISTEM PENDIDIKAN NON FORMAL
KAWASAN KUMUH

Sumber: Analisis Peneliti (2008)

Bahwa setiap aspek kajian mengandung komponen yang akan digunakan dalam analisis. Aspek kajian dan komponen yang dianalisis dalam setiap aspek kajian ini disajikan pada Tabel II.3.

TABEL II.3
SINTESIS ASPEK KAJIAN DAN KOMPONEN

No.	Aspek kajian	Komponen
1	<p>Melakukan kajian sistem pendidikan non formal, yang sub sarannya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan analisis layanan pendidikan non formal; 2. Identifikasi dan analisis lokasi pendidikan non formal; 3. Identifikasi dan analisis komponen pendidikan non formal; 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Jarak 1.2 Kemudahan 1.3 Menyenangkan 1.4 Kenyamanan 1.5 Keamanan dan Keselamatan 1.6 Waktu pelaksanaan belajar 1.7 Kesesuaian dengan kebutuhan 2.1 Letak 2.2 Jangkauan 2.3 Jarak warga belajar 3.1 Tujuan 3.2 Peserta didik. 3.3 Metode 3.4 Waktu. 3.5 Isi dan bahan ajaran 3.6 Tutor 3.7 Fasilitas/sarana dan prasarana
2	<p>Melakukan kajian masyarakat kawasan kumuh yang sub sarannya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan analisis sistem aktivitas masyarakat kawasan kumuh; 2. Identifikasi dan analisis kependudukan kawasan kumuh; 3. Identifikasi dan analisis latar belakang pendidikan masyarakat kawasan kumuh; 4. Identifikasi dan analisis sosial ekonomi masyarakat kawasan kumuh 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Pekerjaan orang tua. 1.2 Pekerjaan anak usia sekolah 1.3 Aktivitas sehari-hari masyarakat kawasan Kumuh. 1.4 Mata pencaharian masyarakat kawasan kumuh 2.1 Jumlah penduduk kawasan kumuh 2.2 Jenis kelamin penduduk kawasan kumuh 2.3 Kepadatan kawasan kumuh 2.4 Pertumbuhan penduduk 3.1 Latar belakang pendidikan orang tua 3.2 Pendidikan anak-anak masyarakat kawasan kumuh 4.1 Penghasilan masyarakat kawasan kumuh 4.2 Kebutuhan masyarakat kumuh 4.3 Penggunaan anggaran masyarakat kumuh 4.4 Alokasi anggaran pendidikan masyarakat kumuh

No.	Aspek kajian	Komponen
3	Melakukan analisis sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat	3.1 Tujuan 3.2 Peserta didik. 3.3 Metode 3.4 Waktu. 3.5 Isi dan bahan ajaran 3.6 Tutor 3.7 Fasilitas / sarana dan prasarana 3.8 Layanan 3.9 Jarak 3.10 Pendidikan orang tua
4	Menyimpulkan sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat	4.1 Hasil kajian sistem pendidikan non formal 4.2 Hasil kajian masyarakat kawasan kumuh 4.3 Hasil analisis sistem pendidikan non formal

Sumber: Sintesis Peneliti (2008)

BAB III

TINJAUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DI KAWASAN KUMUH KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

3.1 Pemukiman Kumuh di Jakarta Pusat

3.1.1 Lokasi Kawasan Kumuh di Jakarta Pusat

Secara geografis wilayah Jakarta Pusat terletak di 106°22'42"BT s/d 106°58'18"BT dan 05°19'12" LS s/d 06°23'54" LS. Sesuai dengan sejarah geologisnya, wilayah Jakarta Pusat terbentang pada dataran alluvial pada hilir Sungai Ciliwung, dengan topografi rata, pada ketinggian 10 m s/d 35 m di atas permukaan laut. Kedalaman akifer air bumi (*ground-water*) relative dangkal. Selama dua puluh tahun terakhir, intrusi air laut kearah daratan kota Jakarta semakin meluas, yang dicurigai sebagai akibat semakin tak terkendalinya pengambilan air bumi melalui sumur bor dalam (*drilled deep-well*) illegal, baik oleh perorangan maupun oleh industri.

Batas - batas administratif wilayah Jakarta Pusat adalah sebagai berikut: Sebelah barat: Banjir kanal Jl. Petamburan, rel kereta api Palmerah; sebelah utara: Jl. KH Zainal Arifin, Sawah Besar, rel kereta api menuju utara sampai eks bandar udara Kemayoran, dan ketimur sampai dengan Jl. Jakarta by pass, sebelah timur: Jl. Jakarta by pass, sebelah selatan: Jl. Pramuka, Jl. Matraman, Kali Ciliwung persil menghadap Jl. Hanglekir (Biro Pusat Statistik Jakarta, 2007).

Jakarta Pusat terbagi dalam 8 kecamatan, 44 kelurahan, 393 RW, 4.741 RT, 247.173 KK, 893.195 jiwa dan luas area 48,20 km². Dari jumlah tersebut, sebanyak 138 (35,1%) rukun warga (RW), di wilayah Jakarta Pusat

dikategorikan sebagai kawasan kumuh atau kawasan yang dinilai sangat tidak layak. Kawasan tersebut dihuni sekitar 45.000 penduduk, atau 5% dari penduduk Jakarta Pusat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Kekumuhan terjadi akibat tidak meratanya pembangunan dan sulitnya menata sejumlah kawasan (Kompas, 27 November 2007)

Ada beberapa kawasan kampung yang dikategorikan kumuh di wilayah Jakarta Pusat. Kawasan tersebut tersebar di lima Kecamatan, antara lain: Harapan Mulya, Utan Panjang dan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran. Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru, Pasir Kaliki Kecamatan Menteng, Kwitang Kecamatan Senen, dan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang. Sedangkan kampung kumuh di Jakarta Pusat dapat dilihat pada tabel III.1.

TABEL III.1
KAMPUNG KUMUH DI JAKARTA PUSAT

No	Kampung	Luas	Jiwa	Status Tanah
1	Harapan Mulya Kemayoran	20 Ha	3.220 jiwa	Tanah negara, sertifikat
2	Utan Panjang Kemayoran	10 Ha	1.620 jiwa	Tanah negara sertifikat
3	Tanah Tinggi Johar Baru	40 Ha	7.000 jiwa	Tanah negara Sertifikat
4	Kali Pasir Menteng	10 Ha	1.750 jiwa	Tanah negara sertifikat
5	Kwitang Senen	10 Ha	1.820 jiwa	Tanah garapan girik
6	Karet Tengsin Tanah Abang	180 m2	162 jiwa	Tanah negara
7	Kebon Kosong Kemayoran	500 Ha	8.760 jiwa	Tanah negara

Sumber: Badan Perencanaan Kodya Jakarta Pusat, Tahun 2006

Dari tabel di atas, terlihat bahwa lima kecamatan dari delapan kecamatan di kota Jakarta Pusat terdapat kawasan yang dikategorikan kumuh.

3.1.2 Sejarah dan Penyebab Kawasan Kumuh di Kemayoran

Kemayoran merupakan bagian Jakarta (Batavia). Sejak abad ke-19 sudah menjadi kota tujuan bagi penduduk untuk bekerja dan memperbaiki nasib. Peningkatan ekspor dari hasil tanam paksa membawa pertumbuhan pesat bagi Batavia sebagai kota pelabuhan dan pusat politik ekonomi Hindia Belanda.

Kaum migran yang datang ke Batavia tidak hanya eks buruh perkebunan saja. Pengusaha Eropa, pedagang, ahli pertukangan, dan kuli pelabuhan dari China juga mulai mewarnai kehidupan Batavia. Sensus penduduk tahun 1930 mencatat, kaum migran banyak yang bekerja sebagai kuli pelabuhan, pembantu, dan pedagang kecil. Bahkan, sensus tersebut juga mencatat spesialisasi pekerjaan berdasarkan daerah asal (Chandrakirana, 1994:13-15).

Tingginya minat pendatang ke Jakarta umumnya didorong oleh keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota. Mereka berharap mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik. Beberapa golongan pendatang juga mengharapkan kemudahan yang tidak bisa didapat di daerah asal, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Kondisi di tempat asal juga ikut berperan, terutama terbatasnya sumber penghidupan dan menurunnya minat penduduk desa usia produktif terhadap pertanian yang menuntut jam kerja panjang dan upah rendah.

Urbanisasi yang berlebihan di kota Jakarta akhirnya berdampak negatif. Hal ini sebabkan karena laju pertumbuhan kaum migran di Jakarta lebih cepat dari kemampuan Pemerintah Jakarta dalam menyediakan sarana hunian yang layak. Selain itu, sebagian besar kaum migran yang datang ke Jakarta memiliki

keterbatasan ekonomi, pengetahuan, keterampilan, dan modal. Akibatnya, kaum migran yang berpenghasilan rendah memilih untuk tinggal di lahan-lahan strategis di tengah kota secara ilegal. Sebagian besar lokasi yang dimaksud adalah di Jakarta Pusat. Misalnya di bantaran sungai, bantaran rel kereta api, kolong jembatan, dan kolong jalan tol (Santoso, 2002:145).

3.2 Kondisi Masyarakat Kawasan Kumuh Kemayoran Jakarta Pusat

3.2.1 Kependudukan Masyarakat Kawasan Kumuh di Kemayoran

Kecamatan Kemayoran memiliki luas 7,25 Km², yang terdiri dari 8 (delapan) kelurahan, 77 Rukun Warga (RW), 1.038 Rukun Tetangga (RT), memiliki jumlah penduduk sebanyak 194.789 jiwa dengan kepadatan 268.54 jiwa per km². Luas wilayah masing-masing kelurahan secara jelasnya dapat dilihat pada tabel III.2 di bawah

TABEL III.2
LUAS WILAYAH KECAMATAN KEMAYORAN

No	Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase wilayah	
			Terhadap Jakpus	Terhadap Kecamatan
1	Harapan Mulia	0.53	1.10	7.31
2	Cempaka Baru	0.99	2.05	13.66
3	Sumur Batu	1.15	2.39	15.86
4	Serdang	0.82	1.70	11.31
5	Utan Panjang	0.54	1.12	7.45
6	Kebon Kosong	1.16	2.41	16.00
7	Kemayoran	0.53	1.10	7.31
8	Gn. Sahari Selatan	1.53	3.17	21.10
	Jumlah	7.25		

Sumber: Jakarta Pusat Dalam Angka, 2007

Di kecamatan Kemayoran terdapat 3 (tiga) lokasi kawasan kumuh. Kawasan tersebut yaitu Kampung Harapan Mulya Kelurahan Harapan Mulya,

dengan luas 20 Ha dihuni sekitar 32.200 Jiwa, Kampung Utan Panjang Kelurahan Utan Panjang, luas 10 Ha jumlah penduduk sekitar 16.200 Jiwa dan Kampung Kebon Kosong Kelurahan Kebon Kosong dengan luas 500 Ha, dihuni oleh 87.600 Jiwa. Untuk lebih jelasnya kampung kumuh di Kemayoran dapat diperhatikan pada tabel III.3 dibawah.

**TABEL III.3
KAMPUNG KUMUH DI KEMAYORAN JAKARTA PUSAT**

No	Kampung	Luas	Jiwa	Status Tanah
1	Harapan Mulya Kemayoran	20 Ha	3.220 jiwa	Tanah negara, sertifikat
2	Utan Panjang Kemayoran	10 Ha	1.620 jiwa	Tanah negara, sertifikat
3	Kebon Kosong Kemayoran	500 Ha	8.760 jiwa	Tanah negara

Sumber: Badan Perencanaan Kodya Jakarta Pusat, Tahun 2006

3.2.2 Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Kumuh Kemayoran Jakpus

Jumlah penduduk miskin di Kecamatan Kemayoran adalah 20.470 jiwa sedangkan penduduk miskin yang menempati kawasan kumuh sebanyak 13.600 jiwa atau 2.720 kepala keluarga.

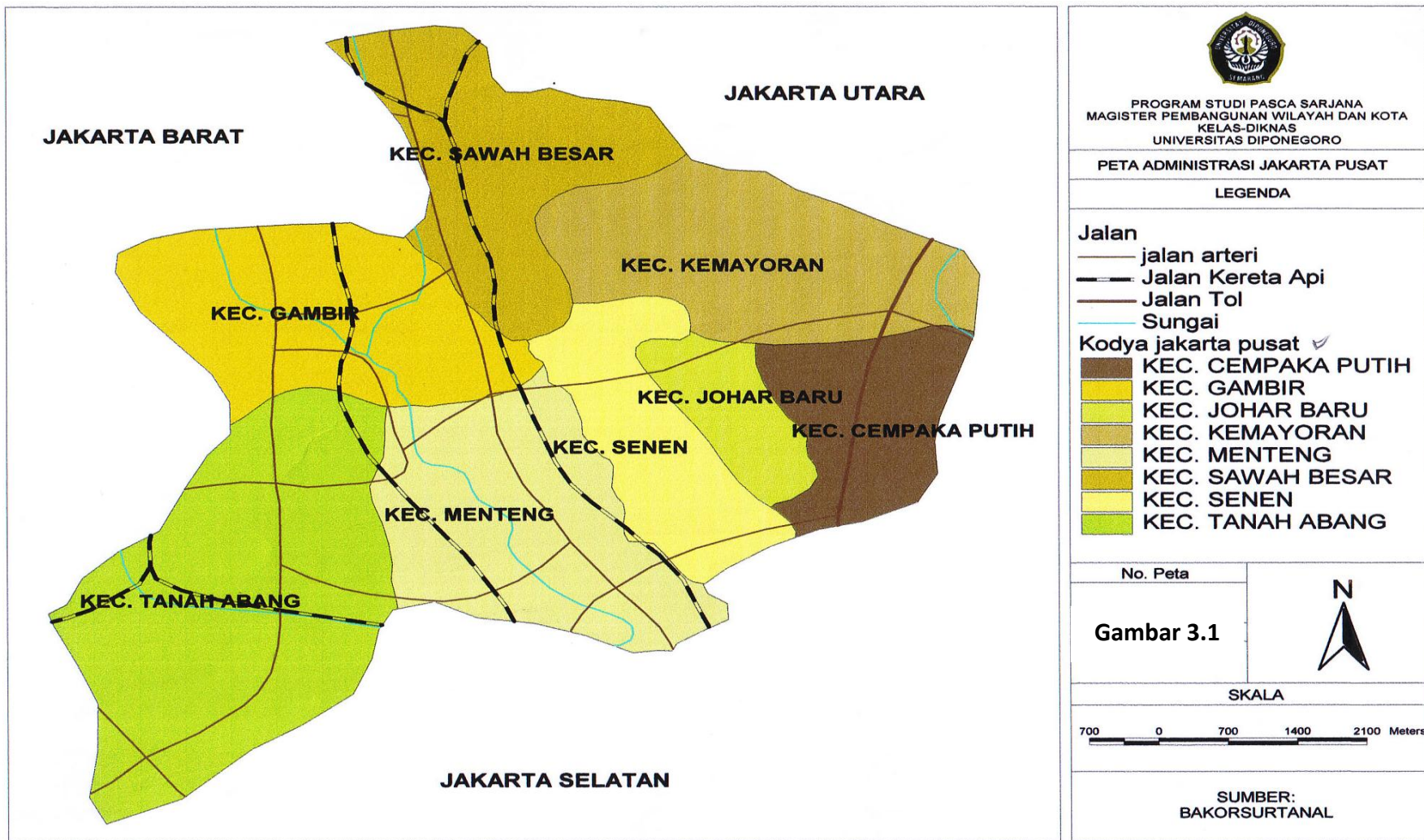
Untuk lebih jelas daftar jumlah penduduk miskin di Kecamatan Kemayoran dapat dilihat di tabel III.4 di bawah.

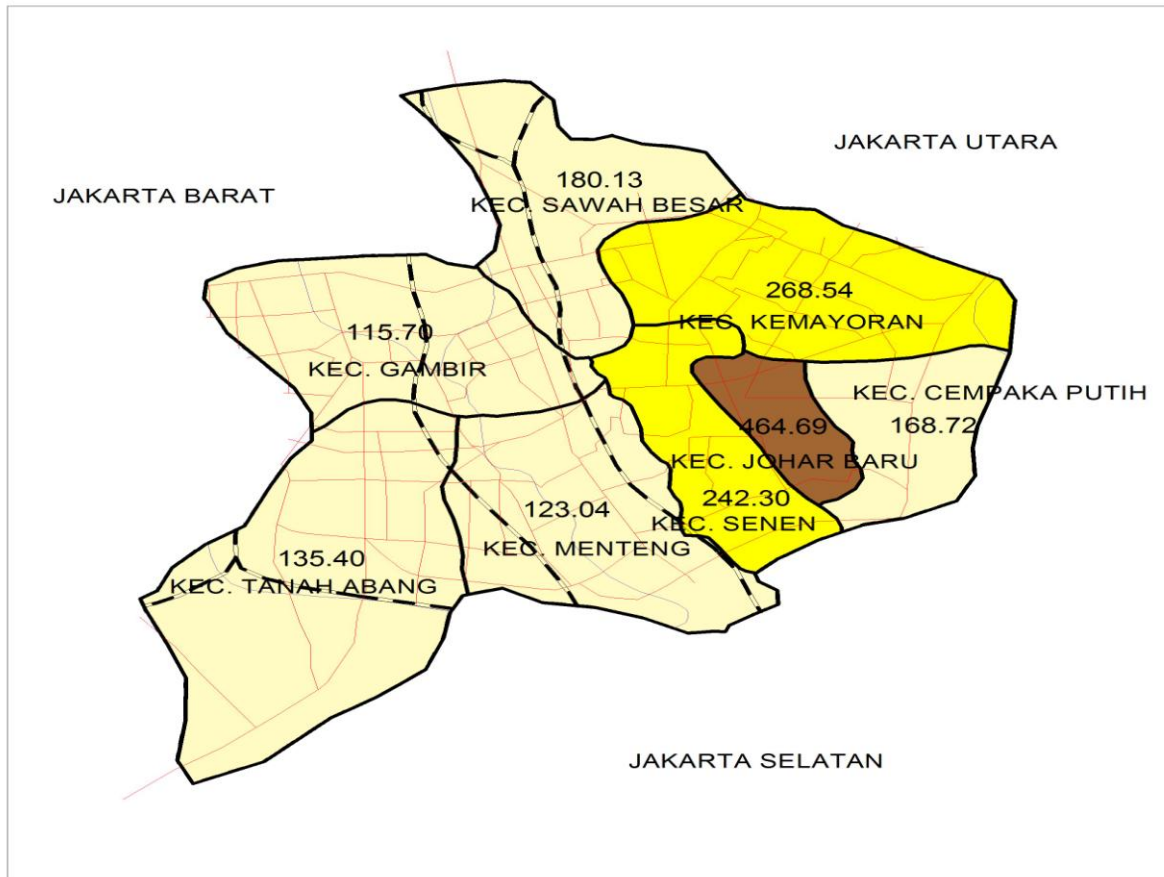
**TABEL III.4
JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI KECAMATAN KEMAYORAN**


No	Kategori	Jumlah
1	Jumlah penduduk miskin	20.470
2	Jumlah penduduk miskin yang menempati kawasan kumuh	13.600
3	Jumlah rumah tangga miskin	4.696
4	Jumlah rumah tangga miskin yang menempati kawasan kumuh	2.720
5	Jml rumah tangga miskin menurut jenis lantai (tanah / bambu / kayu)	4.696

No	Kategori	Jumlah
6	Jml rumah tangga miskin menurut jenis dinding (tanah / bambu / kayu)	4.696
7	Jml rumah tangga miskin menurut fasilitas air minum (sumur/mata air tak terlindung /sungai /air hujan)	4.696
8	Jml rumah tangga miskin menurut fasilitas tempat buang air (bersama /umum / sendiri)	4.696

Sumber: Jakarta Pusat dalam Angka, 2007.






 PROGRAM STUDI PASCA SARJANA
 MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
 KELAS-DIKNAS
 UNIVERSITAS DIPONEGORO

PETA KEPADATAN PENDUDUK JAKARTA PUSAT

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- - - Batas Kota
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai

Kepadatan Penduduk

	115.7 - 180.13
	180.13 - 268.54
	268.54 - 464.69

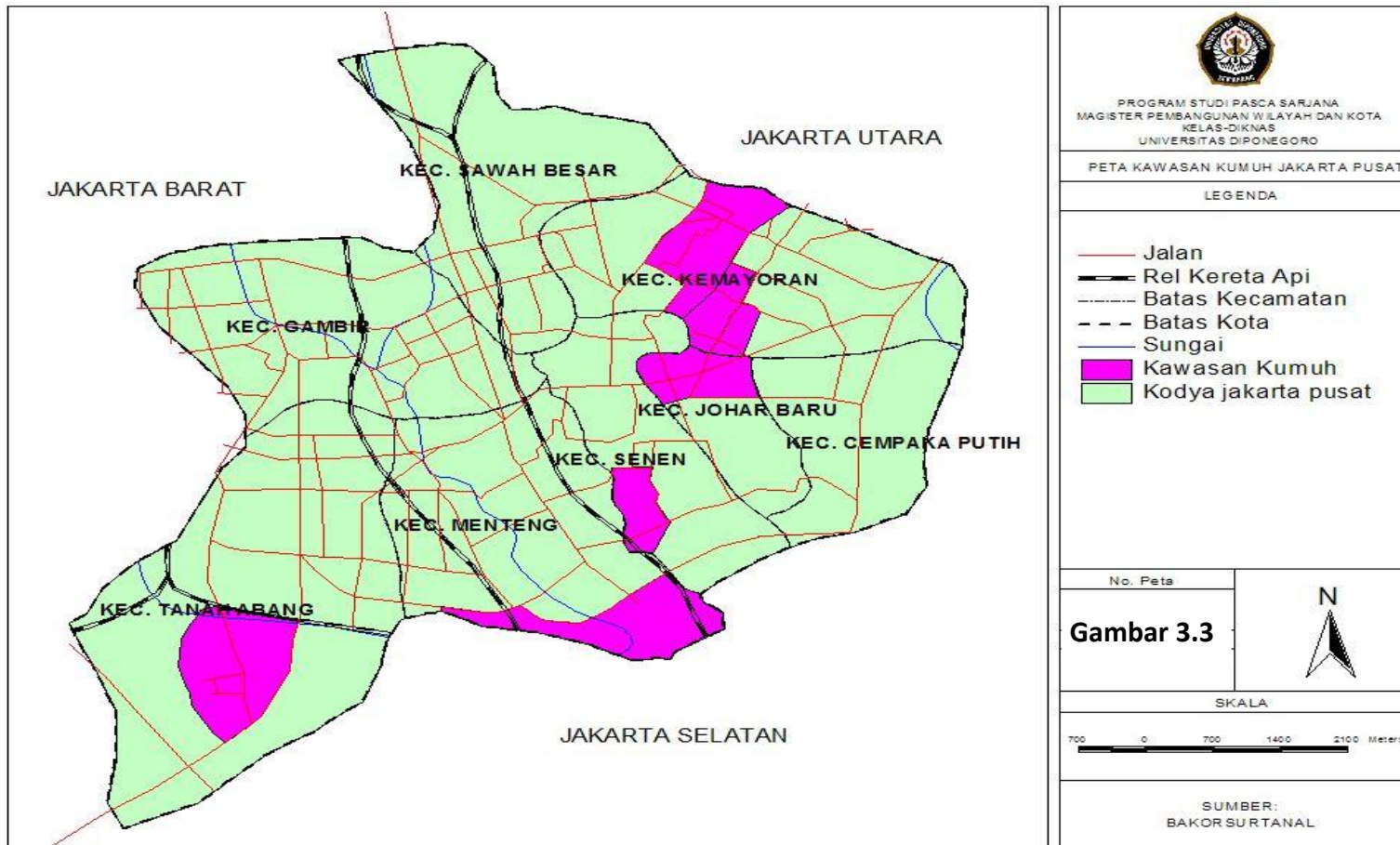
No. Peta

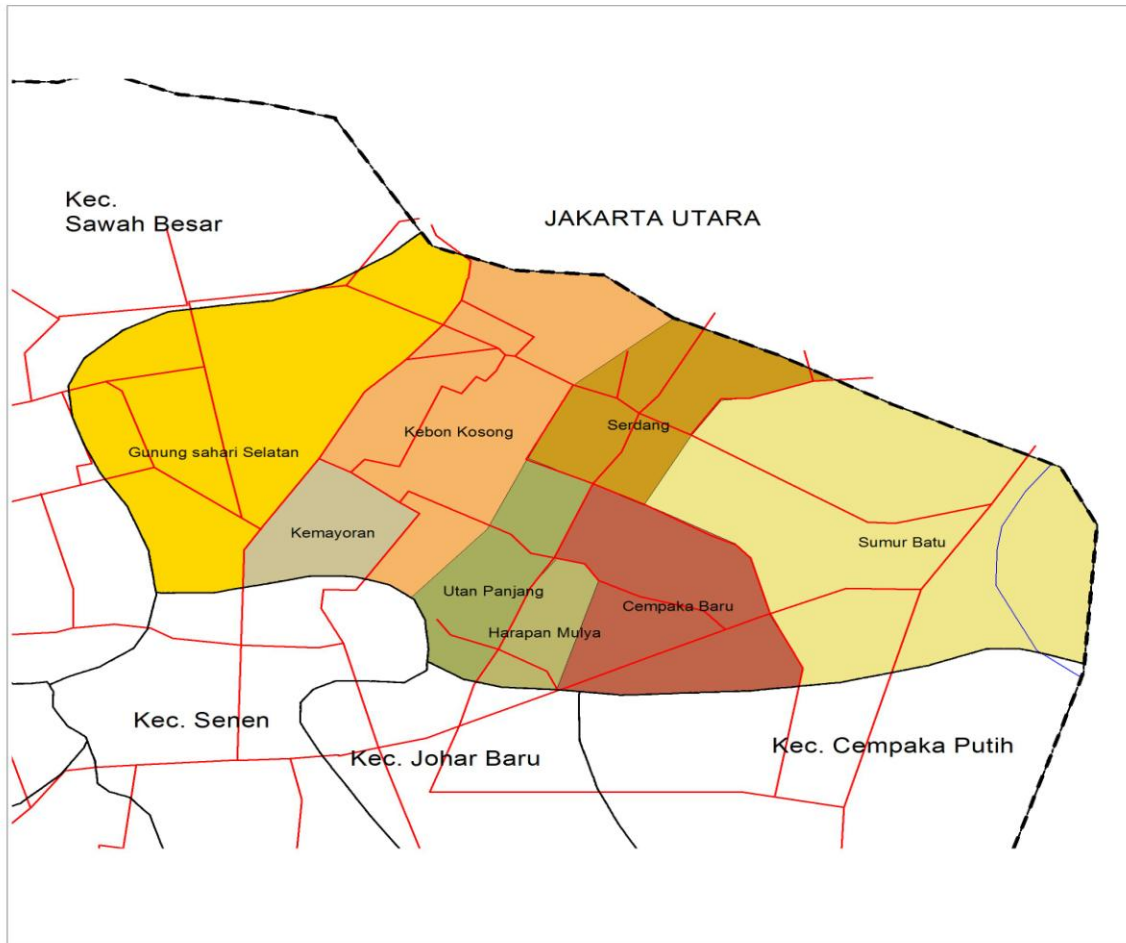
Gambar 3.2

SKALA

700 0 700 1400 2100 Meters

SUNBER:
BAKORSURTANAL






 PROGRAM STUDI PASCA SARJANA
 MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
 KELAS-DIKNAS
 UNIVERSITAS DIPONEGORO

PETA ADMINISTRASI KEC KEMAYORAN

LEGENDA

——— Batas Kecamatan
 - - - Batas Kota
 — Jalan
 — Sungai

Kelurahan

- Cempaka Baru
- Gunung Sahari Selatan
- Harapan Mulya
- Kebon Kosong
- Kemayoran
- Serdang
- Sumur Batu
- Utan Panjang

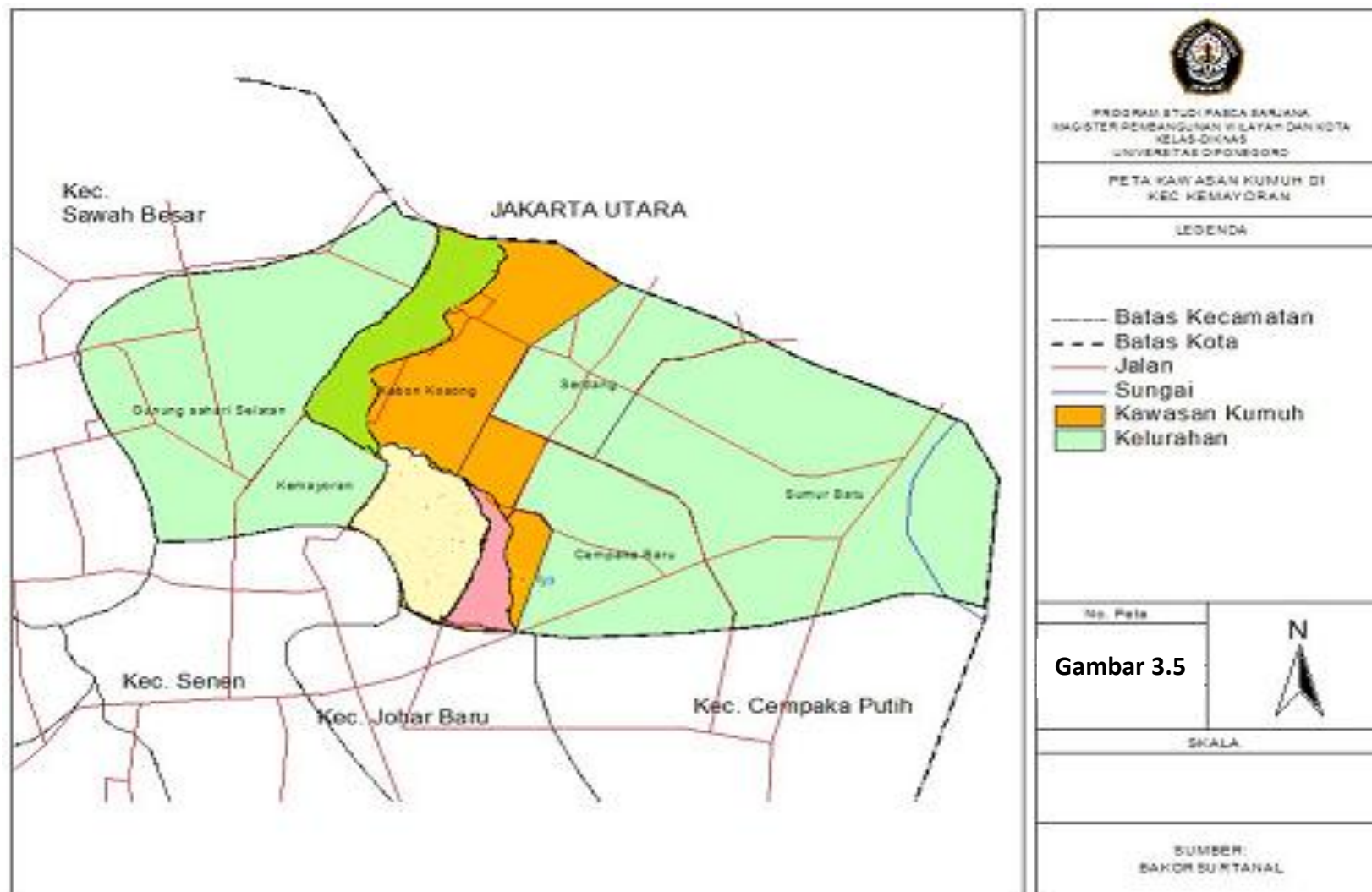
No. Peta

Gambar 3.4



SKALA

SUMBER:
BAKORSURTANAL





Sumber : Penyusun / Observasi lapangan 2008
 Pada saat jam sekolah seorang anak menjemur pakaian di belakang rumah



Sumber : Penyusun /observasi lapangan 2008
 Beberapa anak usia sekolah bermain air pada Saat jam sekolah (tidak bersekolah)



Sumber: Penyusun / observasi lapangan 2008
 Seorang remaja berdagang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari

GAMBAR 3.6
FOTO AKTIVITAS MASYARAKAT KAWASAN KUMUH
JAKARTA PUSAT

3.2.3 Sistem Aktivitas Sosial Masyarakat Kawasan Kumuh di Kemayoran

Penduduk berjenis kelamin pria pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat sebagian besar bekerja sebagai penjual jasa (tukang bersih-bersih, kuli panggul, dll), buruh dan pedagang kecil. Lokasi tempat kerja mereka berada di sekitar wilayah permukiman. Sedangkan sebagian kecil bekerja sebagai pemungut barang bekas atau pemulung.

Kaum perempuan sebagian besar tidak bekerja. Sebagian kecil menjadi tukang cuci baju di pemukiman sekitar kawasan kumuh, dan beberapa yang menjadi pemulung. Biasanya mereka berangkat pada pagi hari dan pulang sore hari (*commuter*). Sedangkan anak usia sekolah sebagian besar melakukan aktivitas kesehariannya sebagai pengamen, buruh pada pedagang kaki lima dan sedikit sebagai pengemis di luar kawasan tersebut.

Disamping bekerja, aktivitas masyarakat kawasan kumuh disela-sela kesibukannya sebagian kecil melakukan kegiatan kemasyarakatan, seperti pengajian di mushola, acara tujuh belasan, kondangan, dan hajatan. Tempat-tempat berkumpul tidak ada lagi. Hal ini mengakibatkan kegiatan sosial kemasyarakatan warga kawasan ini yang semula banyak dilakukan, seperti gotong royong, pertemuan rutin, sekarang hampir tidak pernah mereka lakukan lagi.

Jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Kemayoran menurut lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga sebagian besar tidak bekerja atau pengangguran. Sebanyak 1.925 kepala keluarga rumah tangga miskin tidak memiliki pekerjaan tetap. Untuk lebih jelas jumlah rumah tangga miskin menurut

lapangan pekerjaan di Kecamatan Kemayoran dapat dilihat pada tabel III.5 di bawah ini:

TABEL III.5
JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN MENURUT
LAPANGAN PEKERJAAN DI KAWASAN KUMUH KECAMATAN
KEMAYORAN

No	Jenis Lapangan Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	1
2	Perikanan	0
3	Industri	0
4	Perdagangan (koran, asongan, dll)	14
5	Angkutan	6
6	Jasa	512
7	Pemulung/pengemis/tidak mempunyai pekerjaan tetap/lainnya	1.925
8	Tidak bekerja sama sekali	262
	Jumlah	2.720

Sumber: Jakarta Pusat Dalam Angka, 2007

3.2.4 Latar Belakang Pendidikan Masyarakat Kawasan Kumuh di Kemayoran

Lingkungan hunian tempat berlangsungnya proses hidup manusia akan sangat ditentukan kualitas oleh penghuninya. Didalamnya ada anak-anak dan remaja-remaja yang bakal menjadi generasi muda yang menentukan nasib kemajuan suatu negara atau daerah. Kawasan hunian ini bukan hanya sebagai tempat berteduh, tetapi juga sebagai tempat berkembangnya manusia dengan baik, berkualitas dan sebagai tempat membentuk perilaku pribadi maupun kelompok.

Lingkungan akan mempengaruhi perilakunya pribadi maupun dalam bermasyarakat secara skala kota. Sebab lingkungan hunian ini pula yang menjadi titik yang penting dalam perubahan kondisi sosial suatu kota.

Dalam bidang pendidikan, terjadi kesenjangan antar golongan penduduk yang menempati kawasan elit dengan kawasan yang kurang beruntung. Ketidakberdayaan masyarakat dalam mengambil perannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, lemahnya ekonomi masyarakat dalam mengikuti arus bidang pendidikan, serta terjadi gangguan pendidikan terutama terjadi pada anak-anak usia sekolah, yang berakibat pengurangan biaya pendidikan oleh orang tua kepada anak-anaknya.

Efek yang ditimbulkan oleh permasalahan dalam bidang ekonomi, seperti pemulihan ekonomi yang tersendat setelah krisis, telah meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Merosotnya kemampuan usaha-usaha ekonomi skala kecil dan menengah otomatis mengurangi pendapatan masyarakat.

Bersamaan dengan hal tersebut, timbul masalah pada sektor lainnya seperti pendidikan. Dengan berkurangnya pendapatan masyarakat akan berakibat pada kemampuan orang tua mengalokasikan anggaran untuk membiayai pendidikan anaknya. Keadaan itu diperburuk dengan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya arti sebuah sekolah bagi anaknya.

Akumulasi masalah-masalah pendidikan tersebut membawa implikasi pada masalah-masalah fisik kota yang kompleks, seperti banyaknya anak *drop out*, anak usia sekolah menjadi pemulung, dan bekerja pada sektor informal.

Hal ini mengakibatkan kurang berdayanya masyarakat pada kawasan kumuh untuk mengenyam pendidikan non formal, apalagi pendidikan formal. Meskipun tersedia lembaga pendidikan non formal, ternyata masih rendah kemampuan masyarakat kawasan kumuh untuk mengaksesnya. Hal ini

dikarenakan belum ada sebuah sistem pendidikan non formal yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat pada kawasan kumuh.

Jumlah keluarga miskin menurut pendidikan tertinggi di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dapat dilihat pada tabel III.6

TABEL III.6
JUMLAH KEPALA RUMAH TANGGA MISKIN
MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI DI KAWASAN KUMUH
KEMAYORAN

No	Pendidikan Tertinggi	Jumlah
1	Sekolah Dasar / Tidak bersekolah	1.742
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	864
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	114
	Jumlah	2.720

Sumber: Data Pokok Pendidikan Jakarta Pusat, 2007

3.3 Karakteristik Masyarakat Kawasan Kumuh di Kemayoran

Kawasan kumuh di lima kecamatan di Jakarta Pusat umumnya memiliki karakteristik fisik dan kemasyarakatan yang sama. Selain dihuni oleh para penduduk desa atau dari kota yang lebih kecil yang sengaja berpindah atau datang menetap di kota, biasanya merupakan dampak ikutan dari suatu perkembangan perekonomian yang begitu pesat dari suatu kota.

Kepala Suku Dinas Bina Mental dan Kesejahteraan Sosial Jakarta Pusat, dalam bukunya Pembinaan Mental Sosial Masyarakat Jakarta Pusat, menyatakan bahwa karakteristik kawasan kumuh di Jakarta Pusat secara fisik maupun kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Penduduk sangat padat lebih dari 1000 jiwa/ha.
2. Sebagian besar lokasinya berada di pusat kegiatan ekonomi kota.

3. Pola pemikiran, bahwa membuat hunian harus lebih dekat dengan pasar atau pusat kegiatan ekonomi lebih baik.
4. Komunitas masyarakatnya berdesakan di rumah-rumah petak.
5. Jalan-jalan sempit, terkadang tersembunyi di balik atap rumah yang bersinggungan satu sama lain.
6. Kondisi jalan masih berupa jalan tanah.
7. Fasilitas drainase tidak memadai, bahkan terdapat jalan tanpa fasilitas drainase, sehingga mudah berakibat banjir.
8. Kondisi kualitas udara yang tidak baik (kualitas udara menurun), karena tidak adanya ruang terbuka (*open space*), sehingga air hujan tak dapat terserap masuk ke dalam tanah yang mengakibatkan kekurangan air tanah dan mengakibatkan air hujan mengalir dengan debit yang melimpah dan akhirnya mengakibatkan banjir.
9. Pengkondisian udara di dalam rumah yang tidak baik, sehingga sirkulasi udara di dalam rumah tidak dapat mengalir dengan baik, yang berakibat mengganggu kesehatan.
10. Tidak adanya suasana "*privacy* (pribadi)" bagi pemilik rumah, karena jumlah ruang di rumah tinggalnya terbatas.
11. Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim. Ada diantaranya yang langsung membuang ke saluran yang dekat dengan rumah. Ada juga yang langsung membuang ke sungai terdekat.

12. Fasilitas sumber air bersih sangat minim, sebagian besar memanfaatkan air sumur dangkal yang sudah tercemar atau menampung air hujan dan bahkan membeli air bersih.
13. Tata bangunan yang sangat tidak teratur, umumnya bangunan-bangunan yang tidak permanen dan malahan terlihat banyak dalam kondisi bangunan darurat.
14. Pemilikan hak terhadap lahan sering ilegal, artinya status tanahnya masih merupakan tanah negara dan para pemiliknya tidak memiliki status apa-apa.



Kondisi tempat tinggal masyarakat kawasan kumuh
Disepanjang bantaran kali Kemayoran



Rumah tinggal di bantaran kali yang menunjukkan
ketidak berdayaan dari segi ekonomi



Secara fisik menunjukkan ketidakmampuan menun-
jang kehidupan



Papan yang belum kecukupan, menyebabkan
dana pendidikan tidak pernah terpikirkan oleh nya.

Sumber: Penyusun 2008

GAMBAR 3.7
FOTO PEMUKIMAN KAWASAN KUMUH
KEMAYORAN





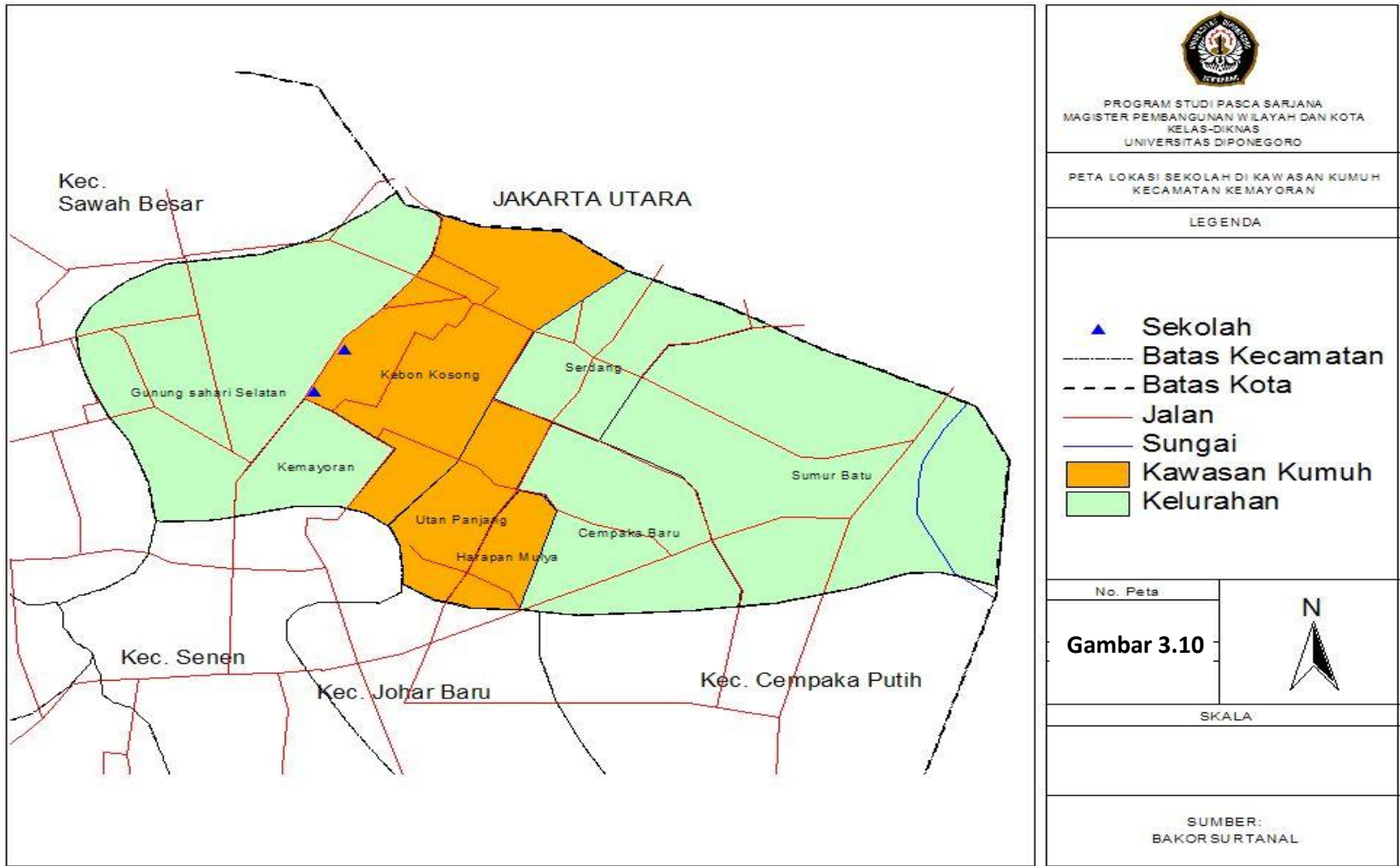
Gambar 3.9

3.4 Pendidikan di Kemayoran Jakarta Pusat

3.4.1 Pendidikan Formal

Pemerintah Jakarta Pusat telah menjalankan pelayanan pendidikan dengan baik yaitu dengan mendekatkan pelayanan pendidikan ke kawasan yang membutuhkan pendidikan. Dengan demikian diharapkan masyarakat yang berada di sekitar prasarana akan memanfaatkan pelayanannya seefektif mungkin. Prinsip mendekatkan pelayanan ke tengah masyarakat, kecepatan dan ketepatan dan efisiensi pelayanan belum sepenuhnya dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat pada kawasan kumuh di Jakarta Pusat. Ini terbukti dengan masih banyaknya anak usia sekolah yang putus sekolah atau bahkan tidak bersekolah.

Beberapa sekolah yang ada di kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat antara lain adalah SMKN 21 Jakarta. Terletak di kelurahan Kebon Kosong yang merupakan kawasan kumuh paling luas di Jakarta Pusat. Pada sekolah SMKN 21, Pada tahun 2007 terdapat sebanyak 554 siswa. Terdiri dari kelas satu sebanyak 200 siswa, kelas dua sebanyak 172 siswa dan kelas tiga sebanyak 172 siswa. Sedangkan yang berasal dari lingkungan sekolah tersebut (kawasan kumuh) adalah sebanyak 210 atau sekitar 38 % dari jumlah keseluruhan siswa (Data Pendidikan, 2007:8).



3.4.2 Pendidikan Non Formal

Disamping sekolah formal, pemerintah juga telah menciptakan beberapa sekolah non formal atau yang sering disebut dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan beberapa lembaga kursus. Sekolah ini diharapkan dapat menampung anak usia sekolah yang telah *drop out* atau putus sekolah untuk kembali ke sekolah. Ada sedikit kelonggaran belajar di PKBM dan lembaga kursus, karena siswa dan guru dapat melakukan perjanjian kapan harus belajar dan kapan tidak harus belajar. Namun sistem ini rupanya belum diterapkan dengan sungguh-sungguh. Terbukti dengan masih banyaknya anak usia sekolah yang belum dapat mengakses pendidikan non formal ini.

Selain pusat kegiatan belajar masyarakat, di Kecamatan Kemayoran terdapat 12 lembaga kursus yang siap menampung warga belajar di wilayah Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Lembaga kursus tersebut tersebar di sekitar kawasan kumuh, namun kalau ditinjau dari jarak antara lokasi lembaga kursus dengan kawasan kumuh masih sangat terjangkau. Pada tahun 2007 tercatat sebanyak 254 peserta belajar yang terdaftar di lembaga kursus pada kawasan kumuh. Dan hanya 10 % atau sekitar 7 orang yang berasal dari masyarakat kawasan kumuh (Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kota Jakarta Pusat, 2008).



Kondisi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat pada Kawasan kumuh Kemayoran Jakarta Pusat



Kondisi belajar pada lembaga pendidikan non formal pada kawasan kumuh



Anak-anak kawasan kumuh mengikuti kursus di Lembaga pendidikan non formal (mereka tidak Bersedkolah formal)



Warga belajar di PKBM 01 diikuti hanya beberapa orang dari kawasan kumuh.



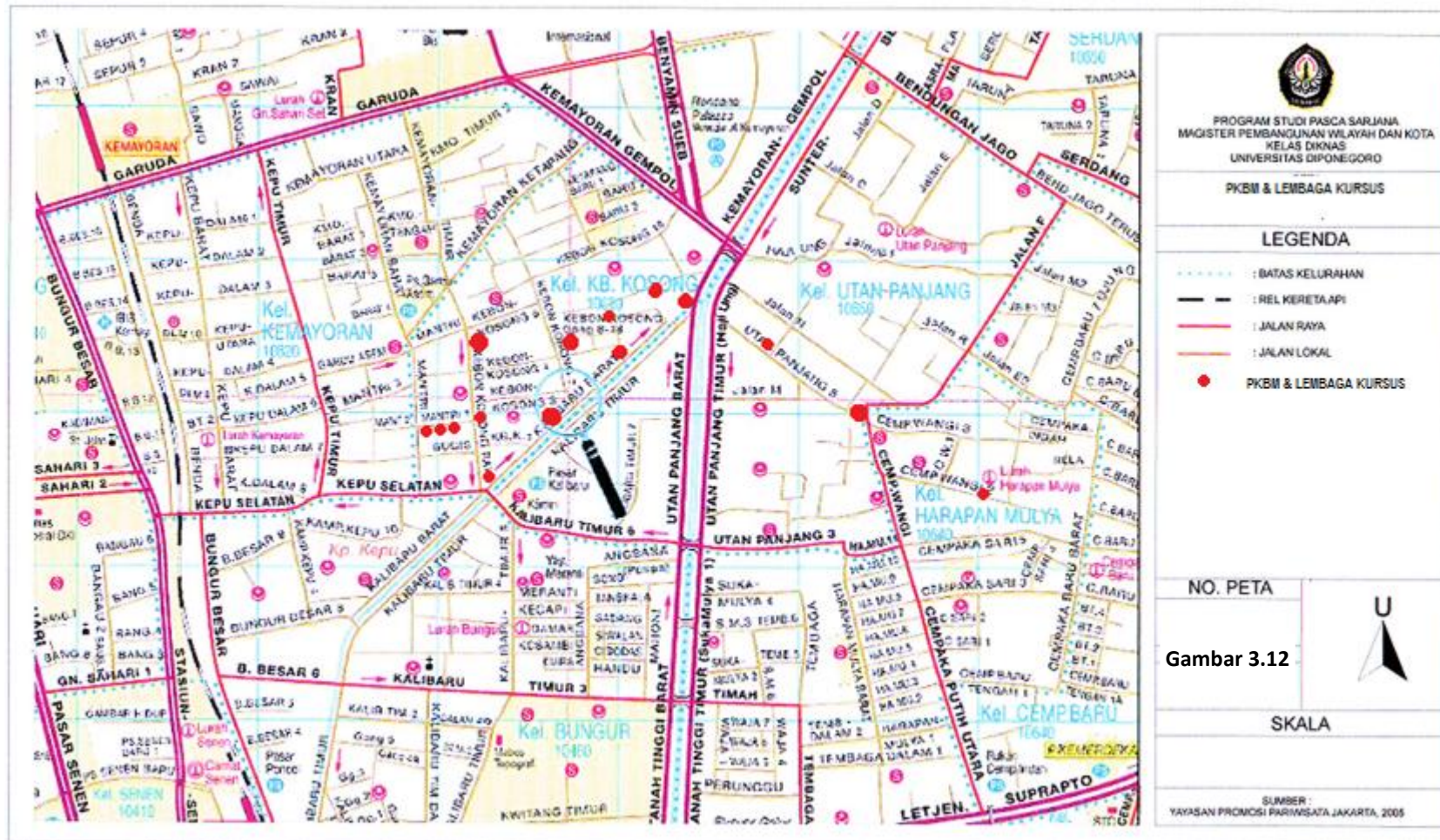
Suasana lembaga kursus di kawasan kumuh yang Hanya diikuti beberapa orang



Ibu-ibu dari kawasan kumuh mengikuti belajar menjahit di lembaga kursus

Sumber: Penyusun 2008

GAMBAR 3.11
FOTO AKTIVITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT
KAWASAN KUMUH KEMAYORAN



Gambar 3.12

3.5 Pendidikan Non Formal pada Kawasan Kumuh Kemayoran

3.5.1 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Terdapat tiga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran. Satu unit berstatus negeri, dan dua unit Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat berstatus swasta. Daftar PKBM di kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran dapat diperhatikan pada tabel III.7 di bawah ini.

TABEL III.7
DAFTAR PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
DI KAWASAN KUMUH KEMAYORAN JAKPUS

No	Nama PKBM	Alamat	Kegiatan
1	PKBM 01	Jl. Bunderan No. 25 Kebon Kosong	Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional
2	PKBM Prima Peduli Bangsa	Jl. H Ung Rt.001/03 Utan Panjang	Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional
3	PKBM Harapan Mulia	Jl. Cempaka Wangi II Kelurahan Harapan Mulia	Paket A, B dan C

Sumber: Data Pendidikan Jakarta Pusat, 2008

Jumlah warga belajar di ketiga PKBM yang berlokasi di kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran sebanyak 286 orang. Jumlah peserta belajar paling banyak adalah di PKBM 01 Kebon Kosong sebanyak 260 warga belajar dan yang paling sedikit adalah PKBM Harapan Mulia dengan warga belajar sebanyak 8 orang.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala PKBM. Sampai saat ini belum ada tutor atau pengelola lembaga kursus yang memiliki sertifikat profesi. Hal ini disebabkan karena baru tahun 2008 pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan ujian sertifikasi pada tutor atau pengelola lembaga

kursus. Lebih jelasnya jumlah warga belajar PKBM di Kemayoran dapat diperhatikan pada tabel III.8 di bawah ini.

TABEL III.8
DAFTAR PESERTA WARGA BELAJAR PKBM DI KAWASAN KUMUH
KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

No	PKBM	Asal Warga Belajar		Jumlah
		Kumuh	Bukan	
1	PKBM 01	9	251	260
2	PKBM Prima Peduli Bangsa	2	16	18
3	PKBM Harapan Mulia	0	8	8
	Jumlah	11	274	286

Sumber: Data Pendidikan Luar Sekolah Jakarta Pusat, 2007

3.5.2 Lembaga Kursus Keterampilan

Disamping PKBM di wilayah Kecamatan Kemayoran, terdapat sarana pendidikan non formal lainnya yaitu lembaga kursus keterampilan. Lembaga kursus ini mempunyai program keahlian seperti menjahit, manajemen, Bahasa Inggris, Bahasa Cina, Bahasa Korea, akuntansi, musik dan vokal, komputer, tata kecantikan rambut. Jumlah lembaga kursus keterampilan yang terdapat di Kecamatan Kemayoran berjumlah 20 unit, dimana 12 unit diantaranya berada pada kawasan kumuh.

Lembaga kursus keterampilan di kawasan kumuh kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat sebagian besar merupakan yayasan keluarga. Yayasan ini dikelola oleh anggota keluarga, orang tua atau anak dari anggota keluarga tersebut. Biasanya datu diantaranya menjadi kepala lembaga pendidikan non formal tersebut. Sebagian lembaga kursus keterampilan hanya memiliki satu atau dua tutor yang ahli dalam bidang atau program tertentu. Untuk lebih jelas daftar

lembaga kursus beserta program keahliannya dapat diperhatikan pada daftar tabel III.9 dibawah ini.

TABEL III.9
LEMBAGA KURSUS DI KAWASAN KUMUH KECAMATAN
KEMAYORAN

No	Nama Lembaga	Alamat	Program
1	Komputer Kreatif	Jl. C Mas Blok D 1	Komputer
2	LPMK Global	Jl. H. Ung No 7 B	Komputer
3	LPK Stanford	Jl. H. Ung No. 7 B	Komputer
4	Modern English C	Jl. Dakota raya II / 107	B. Inggris
5	Friendship	Jl. Kepu Selatan 8 A	Musik & Vokal
6	Yuliana Jaya	Jl. H. Ung 7	Menjahit
7	Mita Salon	Jl. C Baru V / 29	Tata Kecantikan Rambut
8	Yayasan Ilmu Manajemen	Jl. C Mas Blok I/34	Manajemen
9	LP. Meidia	Jl. C Baru VII / No/1	Tata Kecantikan Rambut
10	Global Language	Jl. H. Ung E No. 43	B. Inggris
11	The Meredia Training	Jl. Harapan Jaya No. 46	B. Inggris
12	Nina Busana	Jl. C Baru Timur 6	Menjahit

Sumber: Data Pendidikan Luar Sekolah Jakarta Pusat, 2007

Pada tahun 2007, jumlah lembaga kursus ketrampilan di kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran sebanyak 12 unit dan memiliki warga belajar sebanyak 254 orang. Jumlah warga belajar paling banyak adalah di lembaga kursus keterampilan Komputer Kreatif. Di lembaga kursus keterampilan ini terdapat 40 warga belajar dan yang paling sedikit adalah di lembaga kursus *Friendship* dengan peserta didik sebanyak 9 orang.

Lebih jelasnya jumlah warga belajar lembaga kursus di Kemayoran dapat diperhatikan pada tabel III.10 di bawah ini.

TABEL III.10
DAFTAR WARGA BELAJAR LEMBAGA KURSUS
DI KAWASAN KUMUH KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

No	Nama Lembaga	Asal Warga Belajar		Jumlah
		Kumuh	Bukan Kumuh	
1	Komputer Kreatif	2	38	40
2	LPMK Global	0	16	16
3	LPK Stanford	1	19	20
4	Modern English C	2	10	12
5	Friendship	0	9	9
6	Yuliana Jaya	1	11	12
7	Mita Salon	0	38	38
8	Yayasan Ilmu Manajemen	0	18	18
9	LP. Meidia	1	35	36
10	Global Language	0	26	26
11	The Meredia Training	0	17	17
12	Nina Busana	0	10	10
	Jumlah	7	247	254

Sumber: Data Pendidikan Luar Sekolah Jakarta Pusat, 2007

3.6 Layanan Pendidikan Non Formal Pada Kawasan Kumuh Kemayoran Jakarta Pusat

Sistem layanan adalah konsep kemudahan dan keefektifan yang diberikan untuk melakukan layanan kepada masyarakat. Kemayoran memiliki banyak lembaga pendidikan non formal dengan berbagai macam model layanan. Sistem layanan yang ada pada lembaga pendidikan non formal di Kemayoran pada umumnya sebagai berikut:

1. Jarak rata-rata antara lembaga pendidikan non formal dengan lokasi masyarakat kawasan kumuh rata-rata 1,3 km.
2. Jumlah populasi lembaga pendidikan non formal pada kawasan kumuh dibanding dengan jumlah anak usia sekolah adalah 1: 205. Ini mengandung arti bahwa jika kita asumsikan setiap lembaga pendidikan non formal memiliki kapasitas kelas sebanyak 40 siswa, maka dibutuhkan 5 lokal kelas.

Kondisi yang ada, bahwa rata-rata jumlah lokal yang dimiliki oleh lembaga pendidikan non formal hanya 2 kelas dengan kapasitas 20 warga belajar.

3. Kemudahan, sebagian besar lembaga pendidikan non formal di kawasan kumuh Kemayoran Jakarta Pusat dapat dengan mudah diakses atau dijangkau oleh masyarakat dari lokasi tempat tinggal. Hal ini disebabkan rata-rata jarak antara tempat tinggal dengan lokasi lembaga pendidikan non formal hanya 1,3 km.
4. Kenyamanan, lingkungan lembaga pendidikan non formal sebagian besar kurang memberikan kenyamanan.
5. Keamanan dan keselamatan, lokasi lembaga pendidikan di kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran sebagian besar tidak memperdulikan keselamatan dan keamanan, terutama masalah kriminal.

3.7 Peranan Institusi Terkait dengan Pendidikan Non Formal

Institusi yang terkait dengan pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat, dibagi menjadi 2 bagian besar. Institusi tersebut adalah instansi pemerintah dan swasta. Instansi pemerintah yang terkait adalah Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta.

Instansi tersebut masing-masing berfungsi sebagai supervisor dan regulator dalam melakukan pembinaan bidang pendidikan. Sedangkan instansi swasta yang terkait adalah berbagai yayasan pendidikan swasta, serta beberapa organisasi kependidikan lainnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi terus melakukan pembinaan dalam usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan baik formal dan non formal di Jakarta Pusat. Khusus untuk pendidikan non formal, pemerintah memberikan bantuan biaya operasional untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebesar Rp. 3 juta setiap bulan yang kegunaannya adalah untuk, biaya alat tulis, biaya penggandaan, dan telepon air listrik.

Untuk lembaga kursus lainnya, pemerintah berusaha melakukan peningkatan mutu dengan mengadakan ujian kelayakan (sertifikasi) kepada lembaga kursus. Ujian ini dilakukan secara kontinyu setiap 3 bulan sekali dengan program keahlian yang berbeda-beda. Disamping itu pemerintah juga memberikan stimulus berupa bahan peraga praktek dan alat peraga kepada lembaga kursus yang mempunyai prestasi tertentu.

3.8. Permasalahan Masyarakat Kawasan Kumuh dalam Bidang Pendidikan non Formal dan Usulan Solusinya

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa terdapat enam permasalahan umum yang dihadapi masyarakat kawasan kumuh dalam bidang pendidikan non formal di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Permasalahan dapat diklasifikasikan setelah ditelusuri, sampai ditemukan akar atau inti masalahnya.

Tabel III.11 merinci keenam permasalahan tersebut dengan masing-masing karakteristiknya. Namun demikian, urutan nomor dari keenam permasalahan tersebut belum menunjukkan urutan prioritas permasalahannya.

TABEL III.11
PERMASALAHAN UMUM MASYARAKAT KAWASAN KUMUH
KECAMATAN KEMAYORAN JAKARTA PUSAT TERHADAP
KEBERADAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

No.	Permasalahan Umum
1	Sebagian besar lembaga pendidikan non formal yang ada di kawasan kumuh, membuka program yang berhubungan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan ibu-ibu PKK yang dianggap kurang bermutu.
2	Lembaga pendidikan non formal yang mempunyai program sesuai dengan kebutuhan masyarakat kawasan kumuh berada jauh dari pemukiman kumuh.
3	Waktu pelaksanaan proses belajar mengajar tidak sesuai dengan waktu senggang masyarakat pada kawasan kumuh, sehingga masyarakat tidak bisa mengikuti program tersebut.
4	Kurang kesiapan lembaga pendidikan untuk membuka program sekaligus menyesuaikan waktu pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5	Tingginya biaya kursus yang diminta oleh lembaga pendidikan non formal yang ada.
6	Belum tersedia, lembaga pendidikan non formal yang memiliki program yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Sumber: Analisis Peneliti, 2008

Untuk mengatasi permasalahan masyarakat terhadap keberadaan pendidikan non formal di kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat banyak pihak mengemukakan solusi. Solusi tersebut menyangkut kebijakan, kelembagaan, fasilitas termasuk usulan penyesuaian sistem pendidikan non formal dengan kondisi masyarakat pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

Solusi terhadap permasalahan masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat terhadap kondisi pendidikan non formal yang dikemukakan beberapa pihak terkait disajikan pada Lampiran 1. Adapun analisis terhadap solusi ini akan dibahas pada Bab IV.

BAB IV

ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH DI KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

4.1. Analisis Permasalahan Masyarakat Kawasan Kumuh Terhadap Pendidikan Non Formal

Permasalahan yang terangkum dalam Tabel III.11 belum menunjukkan permasalahan utama, atau bahkan bukan merupakan permasalahan. Karena permasalahan tersebut berasal dari pendapat narasumber setelah diadakan wawancara. Berdasarkan urutan prioritas masalah dari narasumber, setelah dihitung frekuensi dan prosentase terhadap skor maksimum kemudian dibuat lima skala prioritas permasalahan. Kriteria prioritas permasalahannya adalah sebagai berikut: 0 – 20 % = permasalahan prioritas V, > 20% – 40 % = permasalahan prioritas IV, > 40% – 60% = permasalahan prioritas III, > 60% – 80 % = permasalahan prioritas II > 80% – 100 % = permasalahan prioritas I. Dari hal tersebut maka dapat diketahui tingkat permasalahan umum sebenarnya yang terjadi pada masyarakat kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat terhadap pendidikan non formal.

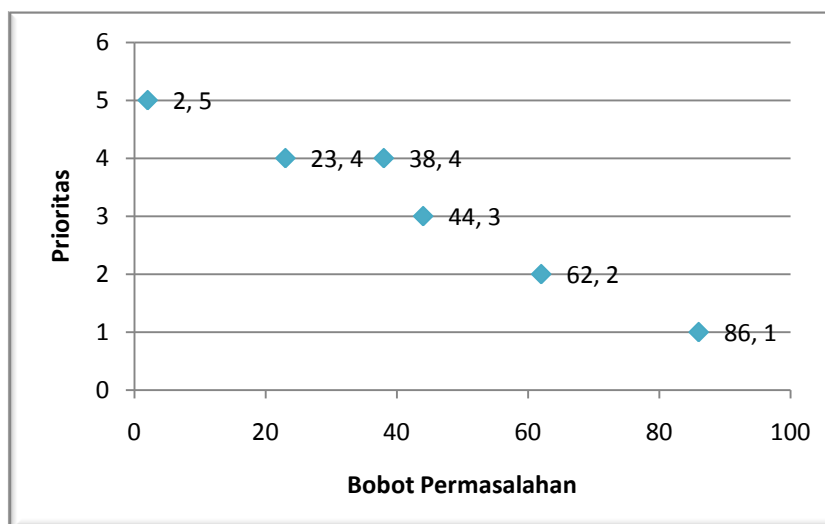
TABEL IV.1
PRIORITAS MASALAH PENDIDIKAN NON FORMAL PADA
KAWASAN KUMUH KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

No	Model jawaban	frek	bobot
1	Sebagian besar lembaga pendidikan non formal yang ada di kawasan kumuh, membuka program yang berhubungan dengan perkembangan teknologi seperti komputer, jaringan (LAN), service handphone serta garmen dan kecantikan.	96	61.9 %
2	Lembaga pendidikan non formal yang mempunyai program sesuai dengan kebutuhan masyarakat kawasan kumuh seperti menyulam, anyaman, bengkel, kerajinan dari barang bekas berada jauh dari pemukiman kumuh	3	1.9%

No	Model jawaban	frek	bobot
3	Waktu pelaksanaan proses belajar mengajar tidak sesuai dengan waktu senggang masyarakat pada kawasan kumuh, yaitu antar jam 16.00-22.00 WIB sehingga masyarakat tidak bisa mengikuti program tersebut	68	43.9%
4	Kurang kesiapan lembaga pendidikan untuk membuka program sekaligus menyesuaikan waktu pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	36	23.2%
5	Tingginya biaya kursus yang diminta oleh lembaga pendidikan non formal yang ada (satu program keahlian berkisar antara Rp.300.000 – Rp.1.500.000)	59	38.1%
6	Belum tersedia, lembaga pendidikan non formal yang memiliki program yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat seperti anyaman, menyulam, bengkel, kerajinan dari barang bekas.	188	85.8

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Mengacu pada skala Likert, hasil perhitungan (lampiran 2) menunjukkan bahwa keenam permasalahan masyarakat kawasan kumuh terhadap pendidikan non formal adalah sebagai berikut: permasalahan prioritas pertama adalah permasalahan nomor 6, permasalahan prioritas kedua adalah permasalahan nomor 1, permasalahan prioritas ketiga adalah permasalahan nomor 3, permasalahan prioritas ke empat adalah permasalahan nomor 4 dan 5. Sedangkan yang dianggap permasalahan prioritas kelima adalah permasalahan nomor 2. (Gambar 4.1).



Sumber: Analisis Peneliti (2008)

GAMBAR 4.1
GRAFIK PRIORITAS PERMASALAHAN MASYARAKAT KAWASAN
KUMUH BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL

Dengan demikian permasalahan umum masyarakat kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dalam bidang pendidikan non formal dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Belum tersedia lembaga pendidikan non formal yang memiliki program yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, seperti anyaman, menyulam, bengkel, kerajinan dari barang bekas;
2. Sebagian besar lembaga pendidikan non formal yang ada di kawasan kumuh, memiliki program yang berhubungan dengan perkembangan teknologi. Seperti halnya komputer, jaringan (LAN), service handphone garmen dan kecantikan;
3. Waktu pelaksanaan proses belajar mengajar tidak sesuai dengan waktu senggang masyarakat pada kawasan kumuh. Dimana waktu senggang masyarakat kawasan kumuh antara jam 16.00-22.00 WIB. Karena kesibukan

pada jam tersebut, membuat masyarakat kawasan kumuh tidak dapat mengikuti program tersebut;

4. Kurang kesiapan lembaga pendidikan untuk membuka program sekaligus menyesuaikan waktu pelaksanaan dengan kebutuhan masyarakat. Tingginya biaya kursus yang diminta oleh lembaga pendidikan non formal yang ada (satu program keahlian berkisar antara Rp.300.000 – Rp.1.500.000);
5. Lembaga pendidikan non formal yang mempunyai program sesuai dengan kebutuhan masyarakat kawasan kumuh (terutama untuk ibu-ibu PKK) seperti menyulam, anyaman, bengkel, kerajinan dari barang bekas berada jauh dari pemukiman kumuh.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa bukan besarnya biaya yang menjadi permasalahan utama terhadap kemauan memasuki pendidikan non formal, yang sudah menjadi isu regional bahkan nasional. Ternyata permasalahan terletak pada belum tersedianya lembaga pendidikan non formal yang memiliki program yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Hal ini yang menunjukkan konsistensi permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat pada kawasan kumuh dalam bidang pendidikan non formal.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber dibawah ini:

1. *Permasalahannya adalah lembaga pendidikan non formal yang ada di wilayah sini memiliki kurikulum dan program yang baku, tidak pernah melihat kebutuhan lingkungan, sehingga banyak masyarakat yang tidak mau memasuki dalam lembaga tersebut. (D.1)*
2. *Lembaga pendidikan non formal yang ada tidak mau menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat kawasan kumuh, baik program, waktu pelaksanaan maupun sarana dan prasarannya. (LP.3)*
3. *Belum ada kesesuaian antara kebutuhan masyarakat, kondisi masyarakat, dengan lembaga pendidikan non formal yang ada selama ini. (O.6)*
4. *Banyak lembaga pendidikan non formal yang ada di lingkungan kawasan kumuh ini yang tidak mau menyesuaikan dengan kondisi masyarakat lingkungannya. (A.5)*

Selain menghasilkan beberapa permasalahan umum, hasil wawancara juga menghasilkan pemecahan masalah atau solusi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Banyaknya jenis pemecahan masalah yang disampaikan untuk mengatasi permasalahan di masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat menunjukkan kompleksitas permasalahan yang ada di masyarakat.

4.2. Analisis Pemecahan Masalah Masyarakat Kawasan Kumuh Terhadap Pendidikan Non Formal

Adapun tingkat kepentingan pemecahan masalah yang disampaikan didasarkan besarnya frekuensi pemecahan masalah tersebut disampaikan. Artinya semakin sering pemecahan disampaikan, menunjukkan semakin penting dan prioritas pemecahan masalah tersebut menurut narasumber. Dengan demikian maka dapat dihitung bobotnya berdasarkan perbandingan antara frekuensi dengan jumlah narasumber.

TABEL IV.2
DISTRIBUSI PRIORITAS PEMECAHAN MASALAH PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

No	Model jawaban	frek	Bobot
1	Diperlukan suatu lembaga pendidikan non formal yang dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat, baik program, waktu pelaksanaan, metode, tutor, sarana prasarana, yaitu program keahlian anyaman, menyulam, bengkel, kerajinan dari barang bekas, waktu pelaksanaan antara jam 16.00-22.00 WIB.	15	71 %
2	Adanya bantuan dana kepada masyarakat yang berada di kawasan kumuh, sehingga masyarakat dapat membayar biaya pendidikan non formal yang ada, seperti beasiswa kepada masyarakat kurang mampu.	5	24 %

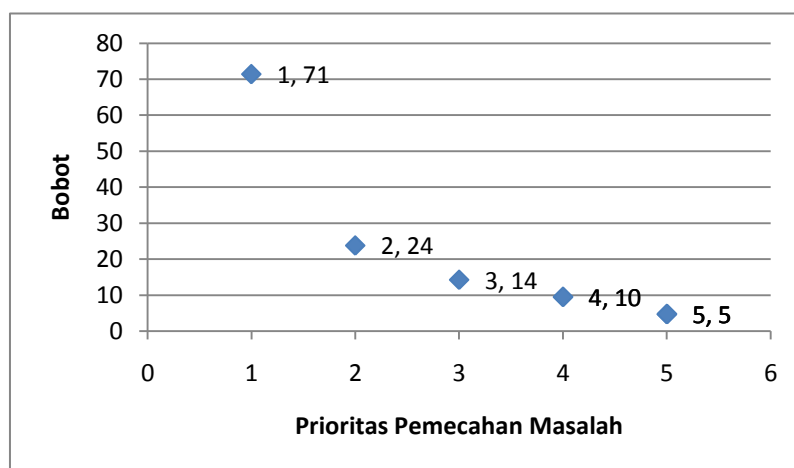
No	Model jawaban	frek	Bobot
3	Lembaga pendidikan non formal yang ada, seharusnya menurunkan biaya kursus atau memberikan potongan kepada masyarakat miskin, atau kalau memungkinkan memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat miskin di wilayahnya.	3	14 %
4	Waktu pelaksanaan kegiatan pendidikan non formal yang ada di lingkungan tersebut di lakukan antara pukul 16.00-22.00 WIB, sehingga tidak terjadi bentrok dengan waktu masyarakat bekerja pada siang hari.	4	5 %
5	Memberikan penyuluhan kepada orang tua anak didik untuk menimbulkan kesadaran masyarakat tentang perlunya pendidikan non formal	1	5 %
6	Adanya sanksi kepada masyarakat yang tidak mau menyekolahkan anaknya ke pendidikan non formal	1	5 %
7	Usaha peningkatan pendapatan kepada masyarakat pada kawasan kumuh, sehingga masyarakat dapat mengalokasikan anggarannya ke anggaran pendidikan.	2	10 %
8	Pemerintah mendirikan lembaga pendidikan non formal berada dikawasan kumuh ini, sehingga masyarakat dapat langsung mengikuti program-programnya dengan tidak memungut biaya sepeserpun.	2	10 %

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Dari perhitungan diperoleh bahwa frekuensi tertinggi untuk pemecahan masalah adalah= 15 dan bobotnya 71%. Dengan model jawaban diperlukan suatu lembaga pendidikan non formal yang dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, baik program, waktu pelaksanaan, metode, tutor, dan sarana prasarana. Sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada pelayanan, merupakan pemecahan yang tepat diterapkan pada lembaga pendidikan non formal yang ada.

Pemecahan masalah tersebut di atas jika dilihat bobotnya sangat meyakinkan merupakan solusi, karena bobotnya diatas 50 %. Artinya, sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada pelayanan merupakan satu-satunya pemecahan masalah yang harus ditempuh.

Secara lebih jelasnya prioritas pemecahan masalah yang disampaikan oleh narasumber dapat dilihat pada gambar 4.2 di bawah ini.



Sumber: Analisis Peneliti (2008)

GAMBAR 4.2
PRIORITAS PEMECAHAN MASALAH
PENDIDIKAN NON FORMAL DI KAWASAN KUMUH JAKARTA
PUSAT

Seperti terlihat pada lampiran 2, bahwa secara umum pemecahan permasalahan yang dikemukakan oleh para narasumber cenderung kepada sistem pendidikan non formal yang sudah ada. Sedangkan pemecahan permasalahan yang menyentuh sisi masyarakat, yaitu memberikan penyuluhan untuk menimbulkan kesadaran masyarakat tentang perlunya pendidikan non formal dan adanya sanksi kepada masyarakat yang tidak mau menyekolahkan anaknya ke pendidikan non formal, hanya dikemukakan oleh masing-masing satu narasumber dengan bobot 5%. Hal ini bisa ditafsirkan bahwa pada masyarakat kawasan kumuh tidak ada permasalahan yang berarti.

Bukti bahwa sistem pendidikan non formal yang sesuai dengan kondisi masyarakat menjadi pemecahan masalah yang utama, ditunjukkan oleh beberapa pendapat dari narasumber sebagai berikut:

1. *Sebenarnya solusi pemecahan yang paling tepat adalah, perlunya suatu lembaga pendidikan non formal yang akan didirikan atau yang sudah ada selalu mengikuti dinamika masyarakat baik itu program dan metode yang akan dijalankan, sehingga masyarakat dapat mengikuti program-program itu dengan baik (LK.2)*
2. *Pemecahan masalah yang ada di masyarakat kawasan kumuh yang bisa dilakukan adalah adanya kesesuaian antara kondisi masyarakat dengan lembaga pendidikan non formal yang ada, baik waktu pelaksanaan, program keahlian yang diajarkan (A.2).*
3. *Agar masyarakat dapat mengikuti program pendidikan non formal yang ada, seyogyanya lembaga pendidikan formal yang ada lebih fleksibel dalam melaksanakan programnya. Artinya sebaiknya lembaga pendidikan non formal yang dapat menyesuaikan dengan keadaan lingkungannya yang serba kekurangan ini (W.4)*

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan utama, dapat disimpulkan bahwa belum tersedia lembaga pendidikan non formal yang memiliki program keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Program keahlian yang dimaksud adalah keterampilan anyaman, keterampilan menyulam, bengkel, kerajinan barang bekas. Waktu pelaksanaan kursus antara jam 16.00-22.00.

Sedangkan hasil analisis terhadap masalah masih rendahnya jumlah anak usia sekolah yang tidak mengikuti pendidikan non formal, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada pelayanan dapat menyelesaikan permasalahan. Hal ini dapat disampaikan dengan beberapa alasan antara lain:

- (1) Dari analisis di atas menunjukkan permasalahan utama pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat adalah belum tersedia, lembaga pendidikan non formal yang memiliki program yang dapat

menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat seperti anyaman, menyulam, bengkel, kerajinan dari barang bekas;

- (2) Pemecahan permasalahan utama disampaikan oleh beberapa pihak adalah diperlukan suatu lembaga pendidikan non formal yang dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian baik dalam hal program (misal : anyaman, menyulam, bengkel, kerajinan dari barang bekas), waktu pelaksanaan (antara jam 16.00-22.00 WIB), metode, tutor, maupun sarana prasarana;

Namun demikian bukan berarti hal tersebut merupakan jawaban atas penelitian ini, untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap komponen-komponen sistem pendidikan non formal dan karakteristik masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

4.3. Analisis Layanan Pendidikan Non Formal pada Masyarakat Kawasan Kumuh

Dalam bagian ini akan dibahas tentang layanan pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Pelayanan adalah sebuah kemudahan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat. Kemampuan pemerintah atau sebuah lembaga untuk memberikan kenyamanan, keefektifan, kemudahan, keamanan dan kehandalan kepada masyarakat untuk mengakses suatu obyek.

Dalam konteks permasalahan ini, layanan yang dimaksud adalah kemampuan lembaga pendidikan non formal untuk memberikan kenyamanan, keefektifan, kemudahan, keamanan dan kehandalan kepada masyarakat di

kawasan kumuh. Sedang dari segi masyarakat, sesuatu yang dirasakan dan diterima dari lembaga pendidikan non formal sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan dalam mengakses pendidikan non formal.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dapat disampaikan distribusi frekuensi seperti pada tabel IV.3 dibawah ini:

TABEL IV.3
FREKUENSI LAYANAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KAWASAN KUMUH DI KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

No	Model jawaban	frek	bobot
1	Layanan belum baik terutama masalah kenyamanan, keamanan, kemudahan untuk mengikuti kursus, di lembaga pendidikan non formal yang ada namun bukan merupakan penyebab rendahnya jumlah masyarakat masuk ke pendidikan non formal	16	52 %
2	Layanan belum baik terutama masalah keamanan dan kenyamanan mengikuti kursus dan merupakan penyebab masalah rendahnya jumlah masyarakat masuk ke pendidikan non formal	5	16%
3	Layanan sudah baik terutama jarak antara lokasi pemukiman dengan lokasi lembaga kursus hanya 1 km, namun hal ini tidak berpengaruh terhadap masalah rendahnya jumlah masyarakat masuk ke pendidikan non formal.	7	23%
4	Layanan sudah baik terutama jarak antara lembaga kursus dengan pemukiman masyarakat, dan merupakan penyebab rendahnya jumlah masyarakat masuk ke pendidikan non formal	2	6%
5	Lainnya	1	3%
JUMLAH		31	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi keterangan beberapa narasumber, didapatkan bahwa layanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat kurang memuaskan. Sebanyak 2 narasumber atau sekitar 6% menyatakan layanan sudah baik, dan layanan memiliki hubungan yang erat dengan masalah rendahnya jumlah masyarakat masuk ke pendidikan non formal. Tujuh narasumber atau

sekitar 23% layanan sudah baik, hal ini berpengaruh terhadap permasalahan rendahnya jumlah masyarakat masuk ke pendidikan non formal. Lima narasumber atau sekitar 16% menyebutkan layanan belum baik, dan bukan merupakan pemecahan masalah rendahnya jumlah masyarakat yang menempuh ke pendidikan non formal. Sedangkan 16 narasumber atau sekitar 52% menyatakan bahwa layanan sudah baik, namun bukan merupakan penyebab rendahnya jumlah masyarakat masuk ke pendidikan non formal.

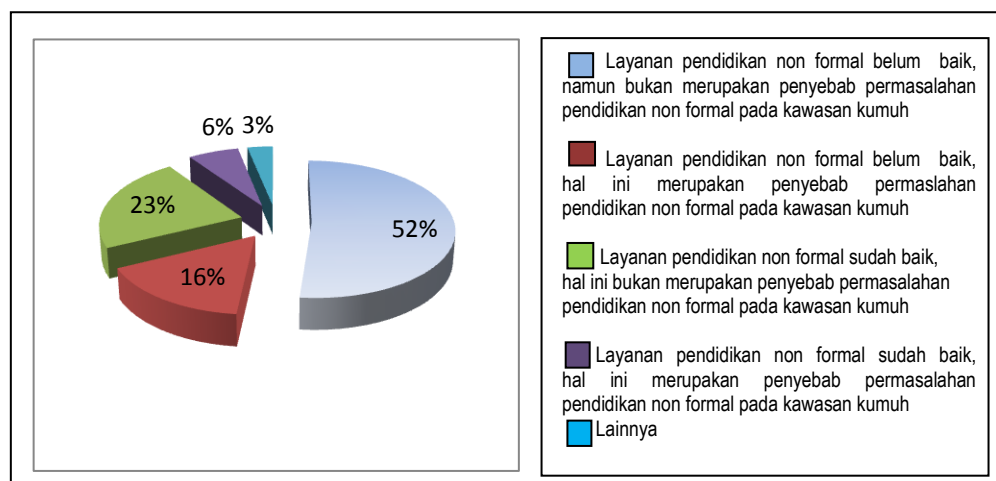
Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa layanan pendidikan non formal dikawasan kumuh belum baik. Seperti yang disampaikan beberapa narasumber berikut ini:

1. *Layanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan non formal mengenai kemudahan akses ke dan dari lembaga pendidikan non formal di kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat belum cukup baik. (D3).*
2. *Kehandalan dan kemudahan mencapai lembaga pendidikan non formal yang ada di kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat belum cukup bagus, walaupun lokasi lembaga pendidikan tersebut tidak begitu jauh dengan pemukiman bahkan berada di tengah-tengah pemukiman, namun dari segi keamanan masih perlu ditingkatkan (P.1)*

Namun demikian, ternyata kurangnya layanan pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat bukan merupakan penyebab rendahnya jumlah warga belajar yang mendaftar ke pendidikan non formal. Lebih jelasnya dapat diperhatikan dari beberapa pendapat narasumber sebagai berikut:

1. *Layanan merupakan salah satu hal yang berpengaruh terhadap kurangnya kemauan masyarakat masuk ke dalam pendidikan non formal, disamping kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan dan program-program yang diberikan (A.1).*
2. *Perbaikan layanan mungkin akan menjadikan pemecahan masalah untuk meningkatkan jumlah warga belajar dikawasn kumuh. Karena masyarakat pada kawasan kumuh, bagaimanapun juga masyarakat kawasan kumuh juga membutuhkan kenyamanan, kehandalan.(W.1)*

Grafik frekuensi model jawaban terhadap layanan pendidikan non formal di kawasan kumuh Jakarta Pusat dapat dilihat pada gambar 4.3 dibawah ini.



Sumber: Hasil analisis, 2008

GAMBAR 4.3

GRAFIK LAYANAN DAN PENGARUH PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

Kesimpulan dari penjelasan tersebut di atas bahwa, sebagian besar narasumber atau 52% menyebutkan layanan belum baik. Buruknya layanan merupakan penyebab rendahnya jumlah masyarakat masuk ke pendidikan non formal. Adanya penyesuaian program pendidikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat adalah solusi untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat masuk ke pendidikan non formal. Hal ini berarti mempertegas uraian di awal, bahwa sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada layanan merupakan pemecahan masalah utama.

4.4. Analisis Lokasi Pendidikan Non Formal Masyarakat Kawasan Kumuh

Dalam bagian ini akan dibahas tentang lokasi pendidikan non formal pada masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Yang

dimaksud dengan lokasi adalah suatu tempat dimana sebuah fasilitas berada atau menempati sebuah ruang. Dalam menentukan suatu lokasi sebuah sarana atau fasilitas umum harus memperhatikan jangkauan pelayanan. Yang dimaksud dengan jangkauan pelayanan adalah berapa jarak yang mampu di tempuh masyarakat untuk mencapai lokasi barang dan jasa.

Dalam penelitian ini yang dimaksud lokasi adalah lembaga pendidikan non formal didirikan atau dibangun. Sehingga masyarakat sekitar dapat menjangkau dan mengakses ke lokasi dimana lembaga pendidikan non formal tersebut berada.

Berdasarkan hasil perhitungan dan keterangan dari beberapa narasumber, diketahui bahwa lokasi lembaga pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat tidak ada masalah. Karena lokasi lembaga tersebut berada di kawasan kumuh, dengan jarak maksimal 1.3 km dari pemukiman kumuh.

Hasil perhitungan frekuensi dari jawaban narasumber dapat dilihat pada Tabel IV.4.

TABEL IV.4
LOKASI PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA KAWASAN KUMUH DI KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

No	Model Jawaban	frek	bobot
1	Lokasi sudah baik karena berada di tengah-tengah pemukiman, jarak paling jauh dengan perumahan masyarakat kumuh adalah 1.3 km, dan faktor lokasi merupakan penyebab masalah rendahnya jumlah masyarakat masuk ke pendidikan non formal	3	10%
2	Lokasi belum baik karena jarak ke lokasi lembaga pendidikan sekitar 1 km dan membutuhkan biaya ke lokasi kursus, dan faktor lokasi merupakan penyebab masalah rendahnya jumlah masyarakat masuk ke pendidikan non formal di kawasan kumuh	5	16%

No	Model Jawaban	frek	bobot
3	Lokasi sudah baik karena berada di tengah-tengah pemukiman, dan faktor lokasi bukan merupakan penyebab masalah rendahnya jumlah masyarakat masuk ke pendidikan non formal	18	58%
4	Lokasi belum baik karena sebagian besar lembaga kursus berada sekitar 1 km dari pemukiman, dan faktor lokasi bukan merupakan penyebab masalah rendahnya jumlah masyarakat masuk ke pendidikan non formal	3	10%
5	Lainnya	2	6%
	JUMLAH	31	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Sebanyak 3 narasumber atau sekitar 10% menyatakan bahwa lokasi sudah baik. Hal ini disampaikan karena lokasi lembaga pendidikan non formal berada di tengah-tengah pemukiman, jarak paling jauh dengan perumahan masyarakat kumuh adalah 1.3 km. Faktor lokasi merupakan penyebab masalah rendahnya jumlah masyarakat menempuh pendidikan non formal. Faktor lokasi merupakan penyebab masalah rendahnya jumlah masyarakat masuk ke pendidikan non formal.

Lima narasumber atau sekitar 16% menyatakan lokasi belum baik karena jarak dari pemukiman ke lokasi lembaga pendidikan sekitar 1 km dan membutuhkan biaya ke lokasi kursus. Faktor lokasi merupakan penyebab masalah rendahnya jumlah masyarakat masuk ke pendidikan non formal di kawasan kumuh. Delapan belas narasumber atau sekitar 58% menyebutkan lokasi sudah baik karena berada di tengah-tengah pemukiman. Faktor lokasi bukan merupakan penyebab masalah rendahnya jumlah masyarakat masuk ke pendidikan non formal.

Tiga responden atau sekitar 10 % menyatakan bahwa lokasi belum baik karena sebagian besar lembaga kursus berada sekitar 1 km dari pemukiman.

Faktor lokasi bukan merupakan penyebab masalah rendahnya jumlah masyarakat masuk ke pendidikan non formal dan 2 orang atau 6% menjawab yang lainnya.

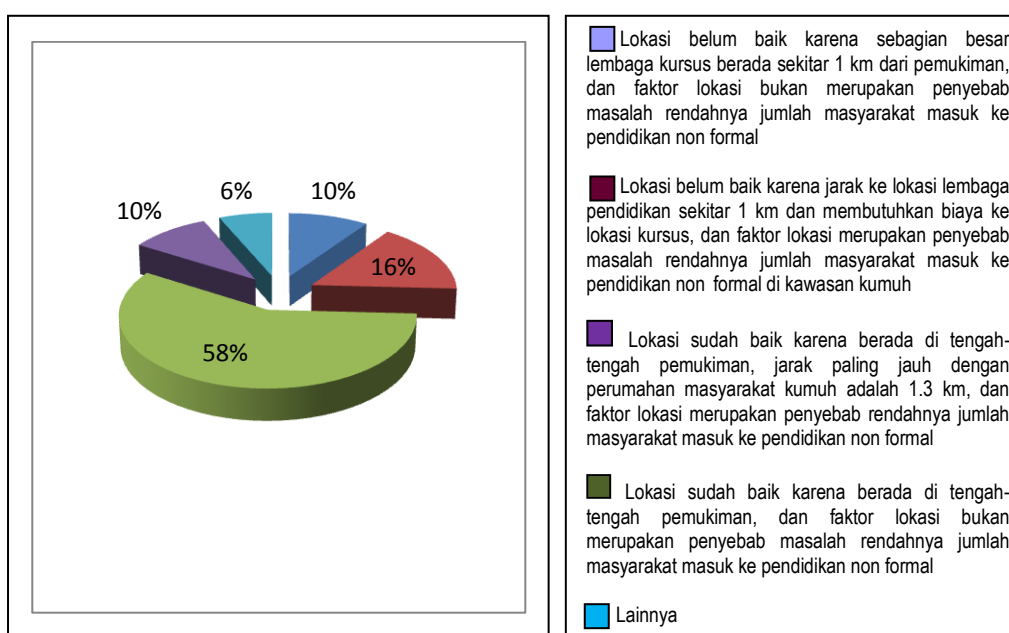
Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lokasi pendidikan non formal di kawasan kumuh sudah baik. Hal ini dapat disimpulkan karena lembaga pendidikan non formal berada di tengah-tengah pemukiman, sehingga mudah dijangkau dari tempat tinggal masyarakat. Namun dilain pihak narasumber juga menyampaikan bahwa faktor lokasi bukan merupakan penyebab masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta untuk memasuki pendidikan non formal. Hal ini terbukti masih banyaknya masyarakat pada kawasan kumuh tidak masuk ke dalam lembaga pendidikan non formal. Padahal lokasi lembaga pendidikan non formal tidak ada masalah. Seperti yang disampaikan beberapa narasumber berikut ini:

1. *Lokasi lembaga pendidikan non formal di kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat sudah cukup baik, dalam arti masyarakat dengan mudah dapat menjangkau lokasi. Karena selain jaraknya pendek, lembaga tersebut berada ditengah-tengah pemukiman (0.2).*
2. *Lokasi lembaga pendidikan non formal yang ada di kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat berada di tengah-tengah perkampungan kumuh, sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk menjangkaunya. (LK.4)*

Namun demikian, ternyata lokasi pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat bukan merupakan penyebab rendahnya jumlah warga belajar yang terdaftar di pendidikan non formal. Ini terbukti dengan tidak menjadikannya masalah lokasi pendidikan non formal, namun demikian masih minim jumlah warga belajar yang memasuki pendidikan non formal. Lebih jelasnya dapat diperhatikan dari beberapa pendapat narasumber sebagai berikut:

1. *Lokasi lembaga pendidikan non formal sebenarnya kurang berpengaruh terhadap minimnya jumlah warga belajar yang memasuki pendidikan non formal, karena lokasi lembaga sudah berada di tengah-tengah masyarakat, namun masih banyak warga yang tidak masuk ke pendidikan non formal (LK.1).*
2. *Lokasi bukan merupakan pemecahan untuk meningkatkan jumlah warga belajar di kawasan kumuh. Karena lokasi lembaga pendidikan non formal yang ada sekarang sudah berada di dalam lingkungan masyarakat. (A.3)*

Sedangkan gambar frekuensi model jawaban terhadap lokasi pendidikan non formal di kawasan kumuh Jakarta Pusat dapat dilihat pada gambar IV.4 dibawah ini.



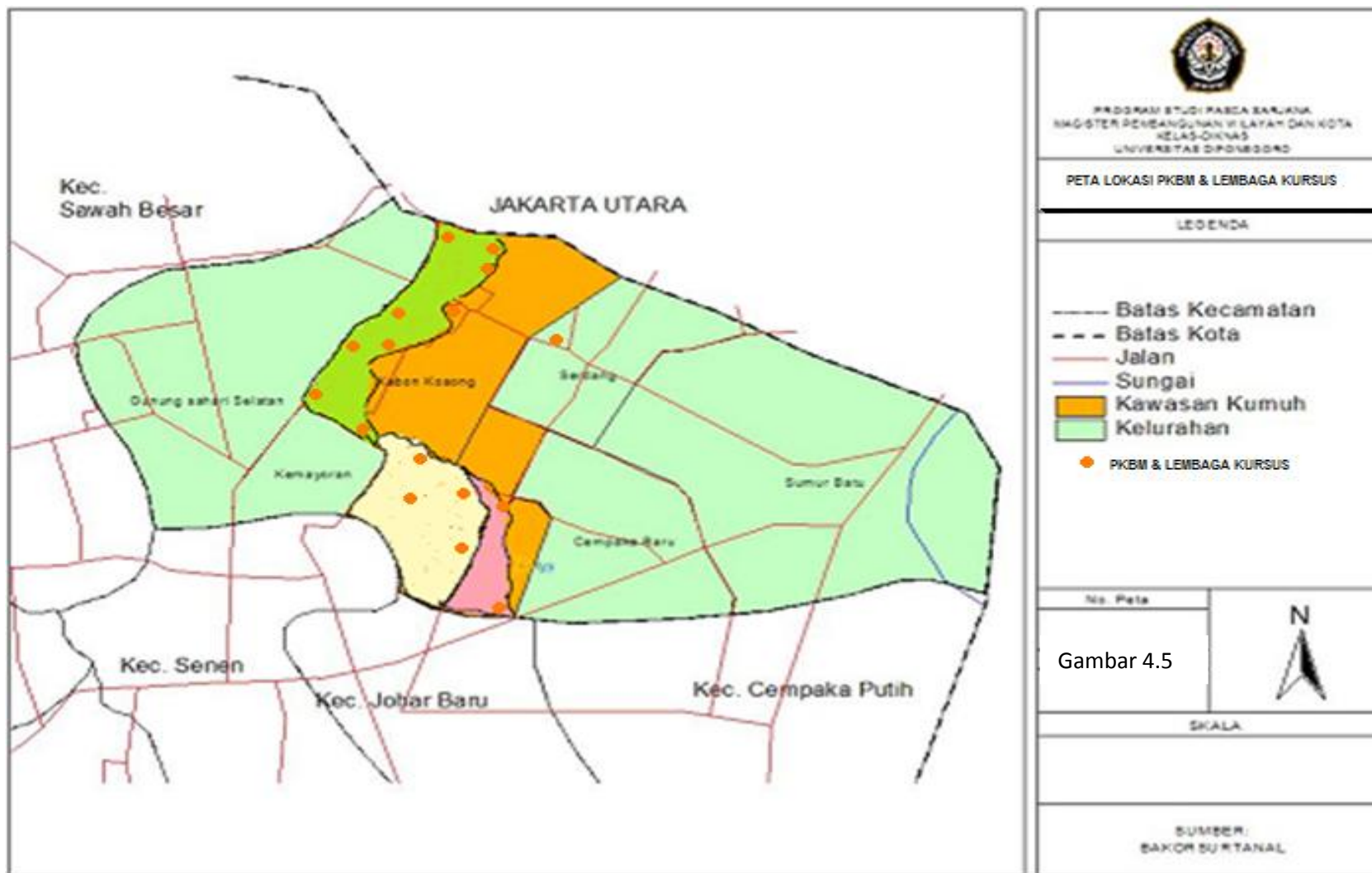
Sumber: Hasil analisis, 2008

GAMBAR 4.4

GRAFIK LOKASI DAN PENGARUH PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

Kesimpulan dari penjelasan tersebut di atas adalah, sebagian besar narasumber yaitu sejumlah 58% menyebutkan lokasi sudah baik. Hal ini dikarenakan lembaga pendidikan non formal sebagian besar berada di tengah-tengah pemukiman. Namun demikian, baik buruknya lokasi bukan merupakan

penyebab rendahnya jumlah masyarakat masuk ke pendidikan non formal. Adanya penyesuaian program pendidikan keahlian antara lain menyulam, bengkel, kerajinan barang bekas yang dianggap sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat adalah solusi untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat masuk ke pendidikan non formal.



4.5. Analisis Komponen Sistem Pendidikan Non Formal pada Masyarakat Kawasan Kumuh

Komponen sistem pendidikan non formal adalah bagian-bagian yang membentuk sebuah satu kesatuan yang akan bersama-sama mencapai tujuan pendidikan non formal. Dalam bagian ini akan dibahas tentang bagaimana kondisi komponen sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

4.5.1 Analisis Tujuan Pendidikan Non Formal Pada Kawasan Kumuh

Dalam menentukan suatu tujuan sebuah organisasi tentunya harus memperhatikan kondisi dan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Tujuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adalah mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Dalam konteks ini tujuan pendidikan non formal pada kawasan kumuh adalah tujuan dari lembaga pendidikan non formal yang berada pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

Dari hasil wawancara kepada 8 dari 13 pengelola lembaga pendidikan non formal yang ada, tujuan pendirian lembaga pendidikan non formal dapat dikelompokkan menjadi tiga tujuan besar yaitu seperti pada tabel IV.5 di bawah ini:

TABEL IV.5
FREKUENSI TUJUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA KAWASAN KUMUH DI KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

No	Model jawaban	frek	bobot
1	Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyediakan bekal keterampilan kepada masyarakat, agar dapat terserap di dunia usaha, dunia industri dan usaha mandiri.	5	62.5%
2	Membantu masyarakat miskin meningkatkan keterampilan untuk bekal hidup mandiri di masyarakat.	2	25%
3	Meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dalam menyongsong era global	1	12.5%
	JUMLAH	8	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa tujuan pendidikan non formal pada kawasan kumuh ke Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyediakan bekal keterampilan masyarakat, agar terserap di dunia usaha, dunia industri dan usaha mandiri.

Hal ini dinyatakan oleh 5 narasumber atau sekitar 62,5% , sedangkan pendapat yang menyatakan akan membantu masyarakat miskin meningkatkan keterampilan untuk bekal hidup bermasyarakat, dinyatakan oleh 2 narasumber atau sekitar 25%, sedangkan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dalam menyongsong era global dinyatakan oleh 1 narasumber.

Menurut masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan kumuh, lembaga masyarakat dan dinas terkait menunjukkan bahwa tujuan pendidikan non formal eksisting sudah sesuai dengan keinginan dan kondisi masyarakat kawasan kumuh. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan frekuensi kesesuaian tujuan kepada narasumber yang ada, seperti pada tabel IV.6 dibawah:

TABEL IV.6
FREKUENSI KESESUAIAN TUJUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA KAWASAN KUMUH DI KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

No	Model jawaban	frek	Bobot
1	Tujuan pendidikan non formal sesuai dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh dan kondisi ini berpengaruh dengan sikap masyarakat memasuki pendidikan non formal	22	71%
2	Tujuan pendidikan non formal sesuai dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh dan kondisi ini tidak berpengaruh terhadap sikap masyarakat memasuki pendidikan non formal	4	13%
3	Tujuan pendidikan non formal tidak sesuai dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh dan hal ini berpengaruh terhadap sikap masyarakat memasuki pendidikan non formal	3	10%
4	Tujuan pendidikan non formal tidak sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat kawasan kumuh dan hal ini berpengaruh terhadap sikap masyarakat memasuki pendidikan non formal	2	6%
JUMLAH		31	100%

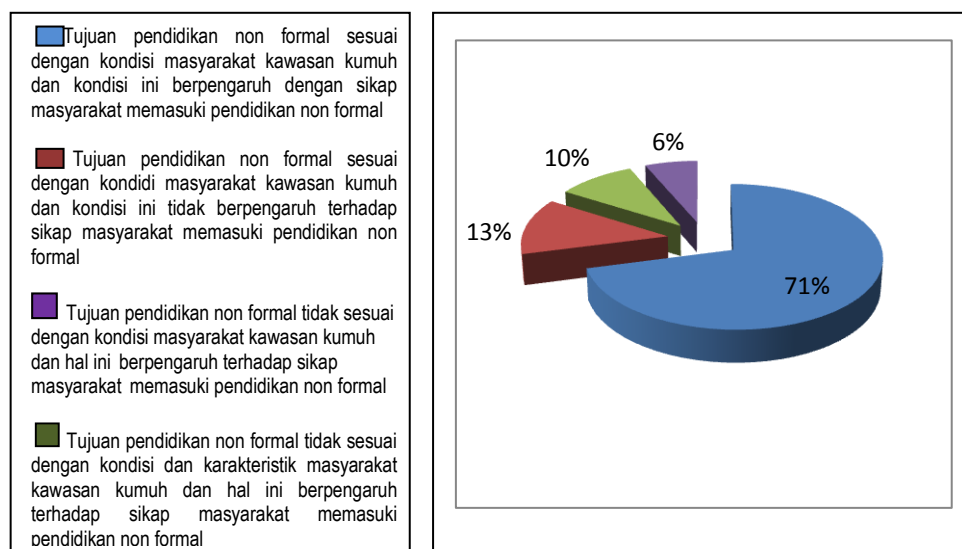
Sumber: Hasil Analisis, 2008

Dari frekuensi kesesuaian tujuan pendidikan non formal, beberapa pendapat narasumber disebutkan bahwa tujuan pendidikan non formal sudah sesuai dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh. Kondisi ini berpengaruh dengan sikap masyarakat memasuki pendidikan non formal disampaikan oleh 22 narasumber atau sekitar 71 % dari narasumber.

Hal ini menunjukkan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan karena frekuensinya lebih dari 50%. Seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber antara lain:

1. *Tujuan lembaga pendidikan non formal sudah sesuai dengan kondisi masyarakat pada kawasan kumuh, karena menginginkan mencerdaskan masyarakat (LP.2).*
2. *Tujuan lembaga pendidikan non formal sudah sesuai dengan kondisi masyarakat pada kawasan kumuh, karena tidak berorientasi pada profit atau keuntungan (D.2)*

Lebih jelasnya jumlah jawaban yang menyatakan bahwa tujuan lembaga pendidikan non formal sudah sesuai dengan kondisi masyarakat pada kawasan kumuh dapat dilihat pada gambar IV.6 dibawah ini:



Sumber: Hasil analisis, 2008

GAMBAR 4.6
GRAFIK KESESUAIAN TUJUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

Kesimpulan dari hal di atas, sebagian besar narasumber, sejumlah 71% menyebutkan tujuan pendidikan non formal pada kawasan kumuh sudah sesuai dengan kondisi masyarakat.

4.5.2 Analisis Metode Pendidikan Non Formal Pada Kawasan Kumuh

Metode atau cara penyampaian adalah cara atau teknik menyampaikan materi atau bahan pengajaran yang akan digunakan oleh sebuah lembaga pendidikan non formal untuk mencapai tujuan. Fungsinya adalah sebagai alat untuk mengkoordinasikan, mengarahkan dan menjalankan pendidikan non formal

Untuk mencapai tujuan. Dari hasil wawancara dengan 9 orang narasumber dari 13 lembaga pendidikan non formal yang ada di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dapat disampaikan bahwa, metode yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian besar seperti pada tabel IV.7 dibawah ini:

TABEL IV.7
FREKUENSI METODE PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA KAWASAN KUMUH DI KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

No	Model jawaban	frek	Bobot
1	Metode klasikal dengan prosentase praktek dan teori adalah 60:40, dengan bimbingan satu tutor	5	56%
2	Metode klasikal dengan teori tanpa praktek	1	11%
3	Metode klasikal dengan prosentase praktek dan teori adalah 40 : 60, (praktek ditempat lain)	2	33%
JUMLAH		8	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa lembaga pendidikan non formal yang penyampaian materi dengan menggunakan metode klasikal dengan prosentase praktek dan teori adalah 60:40. Dengan bimbingan satu tutor dinyatakan oleh 5 narasumber atau 55%. Sedangkan metode klasikal dengan teori tanpa praktek disampaikan oleh 1 narasumber atau 11 %. Metode klasikal dengan prosentase praktek dan teori adalah 40:60, (praktek ditempat lain) disampaikan oleh 2 narasumber atau sekitar 33% dari keseluruhan 8 narasumber lembaga pendidikan non formal di kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa metode atau penyampaian materi yang digunakan oleh lembaga pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat adalah dengan metode klasikal dengan

prosentase praktek dan teori adalah 60:40, dengan bimbingan satu tutor setiap kelas.

Sedangkan menurut masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan kumuh, bahwa metode yang digunakan oleh lembaga pendidikan non formal yang ada belum sesuai dengan keinginan dan kondisi masyarakat kawasan kumuh. Hal ini didapatkan dari hasil wawancara dari beberapa narasumber. Dari hasil wawancara tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian besar.

Pengelompokan pendapat narasumber tentang penyampaian materi dapat diperhatikan pada tabel IV.8 dibawah ini:

TABEL IV.8
FREKUENSI KESESUAIAN METODE PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA KAWASAN KUMUH DI KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

No	Model jawaban	Frek	%
1	Metode pemberian materi tidak sesuai dengan kemauan masyarakat kawasan kumuh, hal ini mempengaruhi sikap masyarakat untuk memasuki pendidikan non formal	19	61
2	Metode penyampaian materi tidak sesuai dengan kemauan masyarakat kawasan kumuh, namun hal ini tidak mempengaruhi sikap masyarakat untuk memasuki pendidikan non formal	6	19
3	Metode penyampaian materi sudah sesuai dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh, namun hal ini tidak mempengaruhi sikap masyarakat untuk memasuki pendidikan non formal	3	10
4	Metode penyampaian materi sudah sesuai dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh, hal ini mempengaruhi sikap masyarakat untuk memasuki pendidikan non formal	3	10
	JUMLAH	31	100

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Dari tabel frekuensi kesesuaian metode penyampaian materi pendidikan non formal dengan kondisi masyarakat menunjukkan bahwa metode atau cara penyampaian materi pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kemayoran

Jakarta Pusat adalah menggunakan metode klasikal dengan prosentase praktek dan teori adalah 60:40, dengan bimbingan satu tutor.

Hal ini ternyata tidak sesuai dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh. Metode yang diinginkan adalah hanya dengan metode praktek. Sedangkan teori hanya diberikan disela-sela praktek dimana setiap warga belajar mengoperasikan satu alat dengan bimbingan satu tutor. Hal ini berpengaruh terhadap kemauan masyarakat kumuh untuk memasuki pendidikan non formal.

Ini menunjukkan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan karena frekuensinya lebih dari 50%, yaitu sebesar 61%. Seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber antara lain:

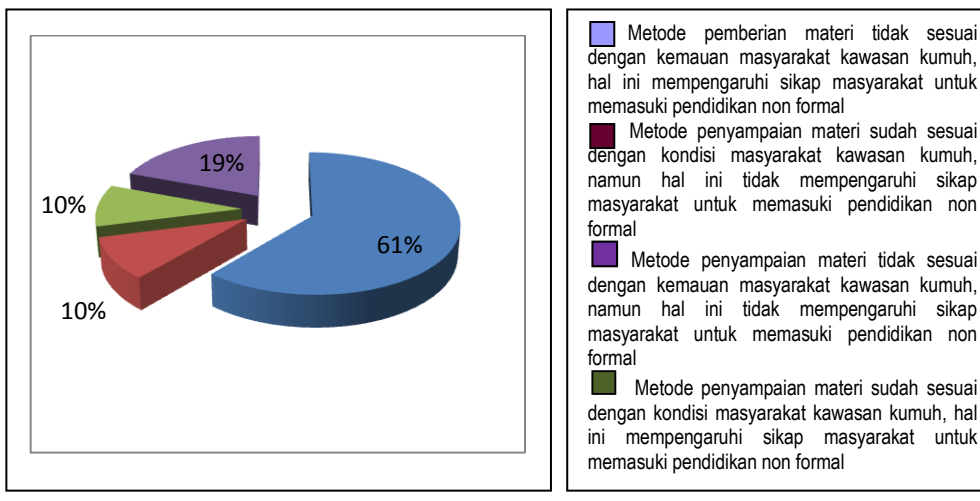
1. *Metode penyampaian materi lembaga pendidikan non formal yang ada belum sesuai dengan kondisi masyarakat pada kawasan kumuh, ini salah satu penyebab masyarakat kawasan kumuh tidak mau masuk ke pendidikan non formal yang ada (A.5).*
2. *Metode penyampaian materi kurang sesuai, karena masyarakat sudah tidak mau lagi mendengarkan teori, tetapi lebih baik jika penyampaian teori bersama-sama pada saat praktek, dan hal ini salah satu penyebab masyarakat pada kawasan kumuh tidak mau masuk ke lembaga pendidikan non formal yang ada. (W.2)*

Lebih jelasnya jumlah jawaban yang menyatakan bahwa metode lembaga pendidikan non formal belum sesuai dengan kondisi masyarakat pada kawasan kumuh dapat dilihat pada gambar IV. 7 dibawah ini:

Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang ada di kawasan kumuh kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat berjumlah 1 unit, yaitu PKBM 01 Kebon Kosong, dengan metode penyampaian materi klasikal



Salah satu kegiatan di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang melaksanakan metode klasikal dengan perbandingan antara praktek dengan teori adalah 60 : 40, dengan bimbingan satu tutor setiap kelas



Sumber: Hasil analisis, 2008

GAMBAR 4.7 **GRAFIK KESESUAIAN METODE PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH KEMAYORAN JAKARTA PUSAT**

Kesimpulan dari penjelasan tersebut di atas bahwa, sebagian besar narasumber, sejumlah 61% menyebutkan bahwa metode penyampaian materi pendidikan non formal pada kawasan kumuh yaitu dengan sistem klasikal. Perbandingan antara praktek dan teori 60:40 dengan bimbingan satu tutor tidak

sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal ini mempengaruhi kemauan masyarakat memasuki pendidikan non formal.

Sedang metode yang diharapkan oleh masyarakat pada kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat adalah dengan metode praktek langsung. Dimana penyampaian teori diberikan secara tidak terpisah dengan praktek, namun berada di antara praktek, atau pada saat praktek dilakukan.

4.5.3. Analisis Jadwal Belajar Pendidikan Non Formal Pada Kawasan Kumuh

Struktur atau jadwal pendidikan non formal adalah waktu yang digunakan oleh lembaga pendidikan non formal untuk melakukan aktivitasnya dalam rangka mencapai tujuan. Dari hasil wawancara dengan 8 orang narasumber di 13 lembaga pendidikan non formal yang ada di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dapat disampaikan bahwa, waktu atau jadwal yang digunakan oleh lembaga pendidikan non formal dalam menyampaikan materi kepada warga belajar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian besar seperti pada tabel IV.9 dibawah ini:

**TABEL IV.9
FREKUENSI WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA KAWASAN KUMUH DI KEMAYORAN JAKARTA PUSAT**

No	Model jawaban	frek	Bobot
1	Pagi hari antara jam 08.00 – 12.00 WIB	5	56%
2	Siang hari antara jam 10.00 – 14.00 WIB	1	11%
3	Pagi sampai dengan siang antara jam 08.00 – 14.00 WIB	2	33%
	JUMLAH	8	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa lembaga pendidikan non formal dalam penyampaian materi pagi hari antara pukul 08.00-12.00 WIB sebanyak lima narasumber atau sekitar 56%. Kemudian waktu pelaksanaan siang yaitu antara pukul 10.00-14.00 WIB sebanyak 1 narasumber dan pagi sampai dengan siang hari antara pukul 08.00-14.00 WIB sebanyak 2 narasumber.

Kalau diamati semua lembaga pendidikan non formal melaksanakan kegiatan belajarnya pada saat jam kerja, yaitu antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, ini berarti waktu tersebut adalah waktu produktif yang digunakan oleh masyarakat pada kawasan kumuh untuk mencari nafkah.

Sedangkan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan kumuh berpendapat bahwa, waktu atau jadwal yang digunakan oleh lembaga pendidikan non formal yang ada belum sesuai dengan keinginan dan kondisi masyarakat kawasan kumuh. Hal ini didapat dari hasil wawancara beberapa narasumber.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 4 jawaban bagian besar. Hal ini dapat diperhatikan pada tabel IV.10 frekuensi jadwal penyampaian materi dibawah ini:

TABEL IV.10
KESESUAIAN JADWAL PELAKSANAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA KAWASAN KUMUH DI KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

No	Model jawaban	Frek	Bobot
1	Waktu pelaksanaan pendidikan non formal yaitu antara jam 08.00-14.00 WIB tidak sesuai dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh, masyarakat menginginkan waktu pelaksanaan jam 16.00-22.00 WIB. mempengaruhi sikap masyarakat untuk memasuki pendidikan non formal	17	55%
2	Waktu pelaksanaan pendidikan non formal yaitu antara pukul 08.00-14.00 WIB tidak sesuai dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh, karena masyarakat kawasan kumuh menginginkan waktu pelaksanaan antara jam 16.00-22.00 WIB namun hal ini tidak mempengaruhi sikap masyarakat untuk memasuki pendidikan non formal	10	32%

No	Model jawaban	Frek	Bobot
3	Waktu pelaksanaan pendidikan non formal antara pukul 08.00-14.00 WIB sudah sesuai dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh, namun hal ini tidak mempengaruhi sikap masyarakat untuk memasuki pendidikan non formal	2	6%
4	Waktu pelaksanaan pendidikan non formal antara pukul 08.00-14.00 WIB sudah sesuai dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh, namun hal ini mempengaruhi sikap masyarakat untuk memasuki pendidikan non formal	2	6%
JUMLAH		31	100%

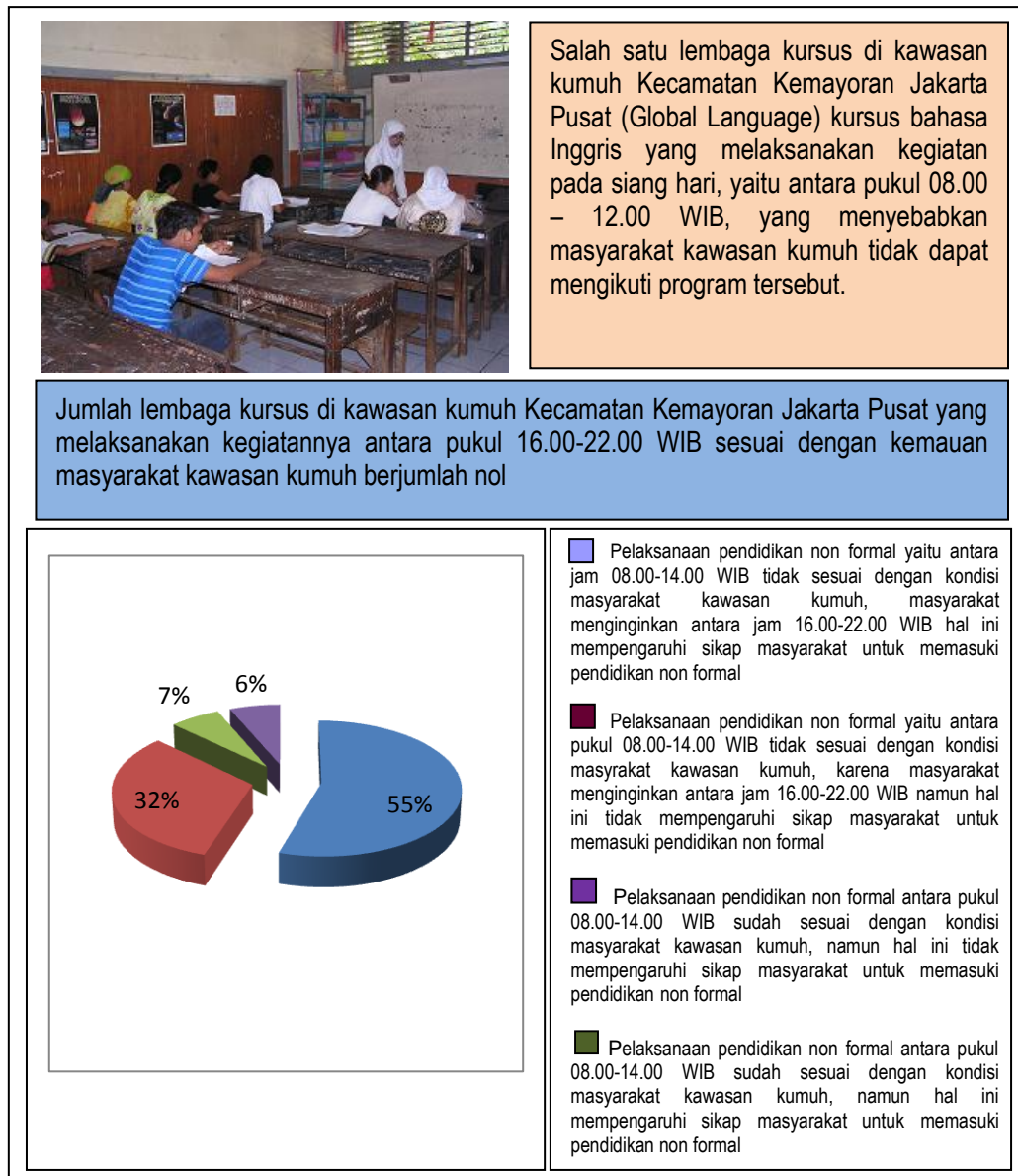
Sumber: Hasil Analisis, 2008

Dari frekuensi kesesuaian jadwal penyampaian materi pendidikan non formal yang disampaikan pada tabel diatas bahwa waktu atau jadwal penyampaian materi pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat ternyata tidak sesuai dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh. Hal ini berpengaruh terhadap minat masyarakat kawasan kumuh untuk memasuki pendidikan non formal.

Dapat disimpulkan demikian karena narasumber yang menyampaikan pendapatnya sebanyak 17 narasumber atau sekitar 55% dari narasumber. Ini menunjukkan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan karena frekuensinya lebih dari 50%. Seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber antara lain:

1. Waktu atau jadwal pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan non formal yang ada belum sesuai dengan kondisi masyarakat pada kawasan kumuh, ini salah satu penyebab masyarakat kawasan kumuh tidak mau masuk ke pendidikan non formal yang ada, seharusnya lembaga pendidikan menjadwalkan kegiatan pada sore atau malam hari, pada saat masyarakat sudah pulang kerja (O.1).
2. Jadwal pelaksanaan kegiatan kurang sesuai, karena masyarakat pada jam tersebut melakukan aktivitas mencari nafkah(karena jam efektif), seharusnya dilakukan pada saat pulang masyarakat pulang kerja atau malam hari (W.3)

Lebih jelasnya jumlah jawaban yang menyatakan waktu pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan non formal belum sesuai dengan kondisi masyarakat pada kawasan kumuh dapat dilihat pada gambar IV.8 dibawah ini:



Sumber: Dokumentasi peneliti 2008

GAMBAR 4.8
KESESUAIAN WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA KAWASAN KUMUH KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

Kesimpulan dari penjelasan tersebut di atas, sebagian besar narasumber, sejumlah 55% menyebutkan waktu pelaksanaan pendidikan non formal pada kawasan kumuh yaitu antara jam 08.00–14.00 WIB tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Seharusnya kegiatan tersebut dilaksanakan pada sore atau malam hari antara pukul 16.00-22.00 WIB, dan hal ini mempengaruhi kemauan masyarakat memasuki pendidikan non formal.

4.5.4 Analisis Isi Pendidikan Non Formal Pada Kawasan Kumuh

Isi atau bahan pengajaran pendidikan non formal adalah materi atau bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada warga belajar oleh lembaga pendidikan non formal dalam rangka untuk mencapai tujuan. Dari hasil wawancara dengan 8 orang narasumber pada 13 lembaga pendidikan non formal yang ada di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dapat disampaikan bahwa, materi atau bahan pengajaran yang disampaikan oleh lembaga pendidikan non formal kepada warga belajar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian besar seperti pada tabel IV.11 dibawah ini:

TABEL IV.11
ISI DAN BAHAN PENGAJARAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA KAWASAN KUMUH DI KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

No	Model jawaban	Frek	Bobot
1	Komputer, internet, LAN (sesuai perkembangan jaman)	4	50%
2	Kursus perkantoran dan manajemen	2	25%
3	Konstruksi bangunan dan listrik	1	13%
4	Lainnya	1	13%
	JUMLAH	8	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa isi atau bahan pengajaran lembaga pendidikan non formal yang disampaikan kepada warga belajar adalah komputer, internet, LAN (sesuai dengan perkembangan jaman) sebanyak 4 narasumber atau sekitar 50%, kemudian kursus perkantoran dan manajemen sebanyak 2 narasumber, konstruksi bangunan dan listrik sebanyak 1 narasumber dan lainnya sebanyak 1 narasumber.

Kalau kita amati paling banyak lembaga pendidikan non formal memberikan materi tentang komputer, internet, LAN. Padahal belum tentu semua masyarakat pada kawasan kumuh membutuhkan materi itu. Walaupun pasar dunia kerja dan dunia industri membutuhkan, namun kemungkinan akses ke arah bidang tersebut sangat jauh dijangkau oleh masyarakat kawasan kumuh.

Dengan demikian, menurut masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan kumuh, bahwa isi atau bahan pengajaran yang diberikan oleh lembaga pendidikan non formal yang ada belum sesuai dengan keinginan dan kondisi masyarakat kawasan kumuh. Mereka menginginkan materi tentang perbengkelan, menyulam, dan keterampilan pemanfaatan barang bekas. Dari hasil wawancara tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 4 jawaban bagian besar. Hal ini dapat diperhatikan pada tabel IV.12 frekuensi jadwal penyampaian materi dibawah ini:

TABEL IV.12
KESESUAIAN ISI PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA KAWASAN KUMUH DI KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

No	Model Jawaban	Frek	Bobot
1	Isi yang disampaikan oleh lembaga pendidikan non formal tidak sesuai dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh, karena materi yang diberikan adalah komputer, internet, LAN, hal ini mempengaruhi sikap masyarakat untuk memasuki pendidikan non formal	18	58%

No	Model Jawaban	Frek	Bobot
2	Isi yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh karena materi yang diberikan adalah komputer, internet, LAN, namun hal ini tidak mempengaruhi sikap masyarakat untuk memasuki pendidikan non formal	9	29%
3	Isi yang disampaikan sesuai dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh komputer, internet, namun hal ini tidak mempengaruhi sikap masyarakat untuk memasuki pendidikan non formal	2	6%
4	Isi yang disampaikan sesuai dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh seperti komputer, internet, hal ini mempengaruhi sikap masyarakat untuk memasuki pendidikan non formal	2	6%
JUMLAH		31	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Dari frekuensi kesesuaian penyampaian isi atau bahan pengajaran pendidikan non formal dengan kondisi masyarakat, menunjukkan bahwa isi atau bahan pengajaran materi pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat tidak sesuai dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh. Hal ini berpengaruh terhadap kemauan masyarakat kumuh untuk memasuki pendidikan non formal.

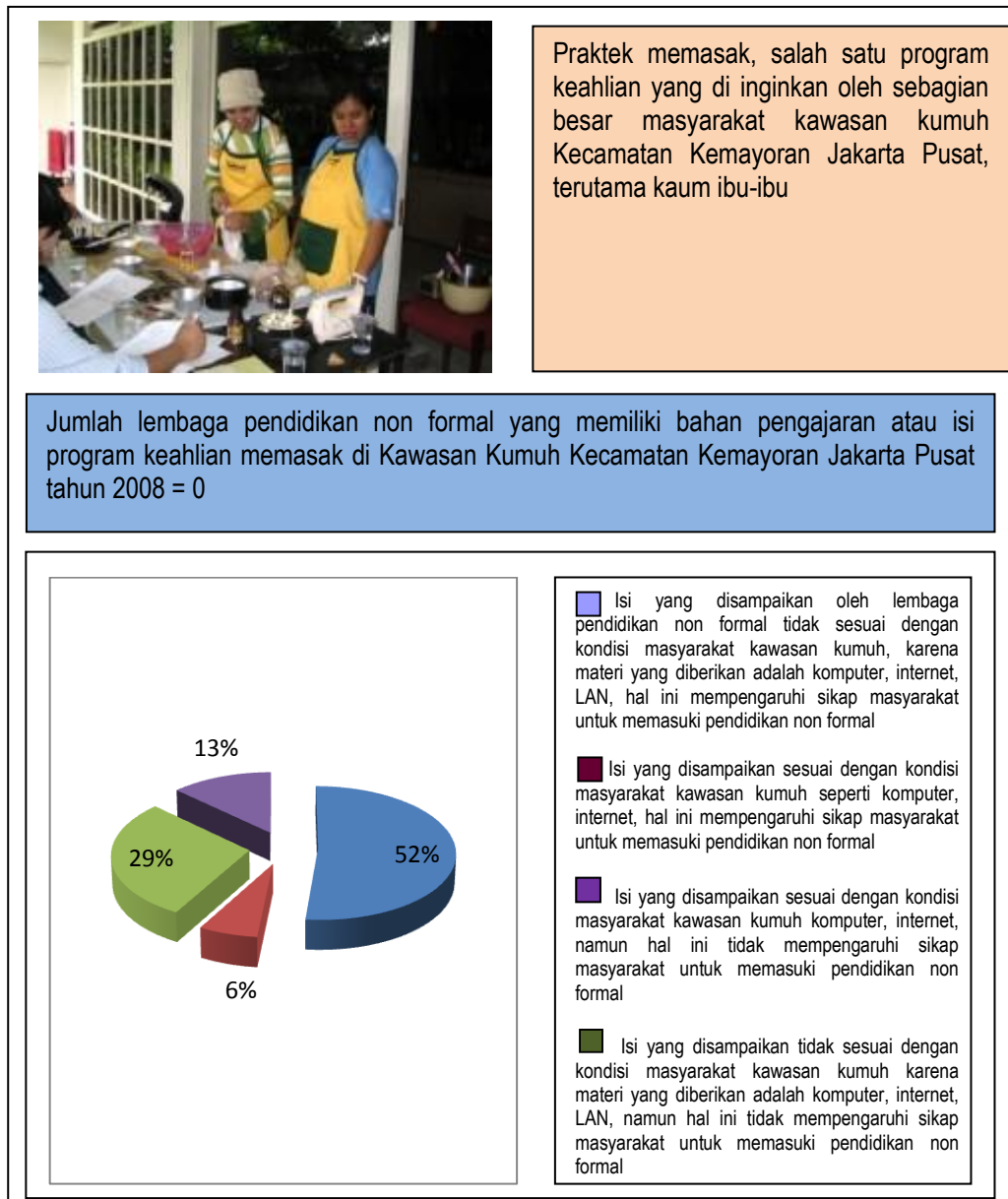
Karena masyarakat kawasan kumuh membutuhkan materi yang singkat, sederhana tetapi langsung bisa digunakan untuk mendapatkan uang misalnya perbengkelan, las, anyaman, menyulam, dan kerajinan pemanfaatan barang bekas. Keadaan ini dapat disampaikan karena narasumber yang menyampaikan pendapatnya sebanyak 18 narasumber atau sekitar 58% dari narasumber. Hal ini menunjukkan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan karena frekuensinya lebih dari 50%. Seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber antara lain:

1. *Isi atau bahan pengajaran yang disampaikan oleh lembaga pendidikan non formal yang ada belum sesuai dengan kondisi masyarakat pada kawasan kumuh, ini salah satu penyebab masyarakat kawasan kumuh tidak mau masuk ke pendidikan non*

formal yang ada, seharusnya lembaga pendidikan menyampaikan materi berdasarkan kemauan masyarakat, misalnya keterampilan yang dapat menghasilkan uang (LP.3).

2. *Materi kegiatan kurang sesuai, karena masyarakat belum tentu bisa mengikuti perkembangan teknologi, seharusnya materi yang disampaikan adalah materi yang dibutuhkan oleh masyarakat misalnya tata cara membuat prakarya yang langsung bisa dijual dan mendapatkan uang. (O.3)*

Lebih jelasnya jawaban yang menyatakan bahwa materi atau bahan pengajaran lembaga pendidikan non formal belum sesuai dengan kondisi masyarakat pada kawasan kumuh dapat dilihat pada gambar 4.8 dibawah ini:



Sumber: Hasil analisis, 2008

GAMBAR 4.9 **GRAFIK KESESUAIAN BAHAN PENGAJARAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH KEMAYORAN JAKARTA PUSAT**

Kesimpulan dari penjelasan tersebut di atas adalah, bahan pengajaran pendidikan non formal pada kawasan kumuh tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, karena sebagian besar narasumber, yaitu sejumlah 58% menyebutkan

tidak sesuai, seharusnya materi atau bahan pengajaran menyesuaikan dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh seperti bengkel, las, anyaman, sulam, kerajinan barang bekas.

4.5.5 Analisis Pelaksana Pendidikan Non Formal Pada Kawasan Kumuh

Pelaksana suatu lembaga pendidikan non formal terdiri dari tutor dan bagian administrasi. Tugas tutor dan administrasi adalah menyediakan bahan pengajaran dan menyelenggarakan proses belajar mengajar. Tutor dan pelaksana sebuah lembaga pendidikan non formal tidak membutuhkan seseorang yang memiliki kualifikasi khusus atau tertentu. Syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang tutor adalah memiliki teknik penyampaian materi yang paling gampang diterima pada saat menyampaikan materi atau bahan pengajaran.

Dari hasil wawancara kepada 9 orang narasumber dari 13 lembaga pendidikan non formal yang ada di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dapat disampaikan bahwa, teknik penyampaian materi yang digunakan oleh tutor dibagi menjadi 3 bagian. Lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel IV.13 berikut ini:

**TABEL IV.13
FREKUENSI TUROR PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA KAWASAN KUMUH DI KEMAYORAN JAKARTA PUSAT**

No	Model jawaban	frek	Bobot
1	Cukup menguasai materi tentang perbengkelan, las, anyaman, keterampilan barang bekas.	4	50%
2	Tidak menguasai materi tentang perbengkelan, las, anyaman, keterampilan barang bekas	2	25%
3	Kurang menguasai materi tentang perbengkelan, las, anyaman, keterampilan barang bekas	2	25%
JUMLAH		8	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa tutor lembaga pendidikan non formal dalam penyampaian materinya cukup menguasai materi sebanyak 50%, sedangkan tidak menguasai materi sebanyak 25%, dan kurang menguasai materi sebanyak 25%. Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa tutor dalam menyampaikan bahan pengajaran cukup menguasai materi.

Menurut masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan kumuh, bahwa kemampuan tutor di lembaga pendidikan non formal yang ada belum sesuai dengan keinginan dan kondisi masyarakatnya. Hal ini didapatkan dari hasil wawancara dari beberapa narasumber. Dari hasil wawancara tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian besar. Hal ini dapat diperhatikan pada tabel IV.14 frekuensi tutor dibawah ini:

TABEL IV.14
FREKUENSI KESESUAIAN TUTOR PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA KAWASAN KUMUH DI KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

No	Model jawaban	Frek	Bobot
1	Tutor tidak sesuai seharusnya tutor sangat menguasai materi tentang perbengkelan, las, anyaman, keterampilan barang bekas, hal ini mempengaruhi sikap masyarakat untuk memasuki pendidikan non formal	16	52%
2	Tutor tidak sesuai seharusnya tutor sangat menguasai materi tentang perbengkelan, las, anyaman, keterampilan barang bekas, namun tidak mempengaruhi sikap masyarakat untuk memasuki pendidikan non formal	2	6%
3	Tutor sudah sesuai, karena sudah cukup menguasai materi tentang perbengkelan, las, anyaman, keterampilan barang bekas namun tidak mempengaruhi sikap masyarakat untuk memasuki pendidikan non formal	9	29%
4	Tutor sudah sesuai karena sudah cukup menguasai materi tentang perbengkelan, las, anyaman, keterampilan barang bekas, hal ini mempengaruhi sikap masyarakat untuk memasuki pendidikan non formal	4	13%
	JUMLAH	31	100%

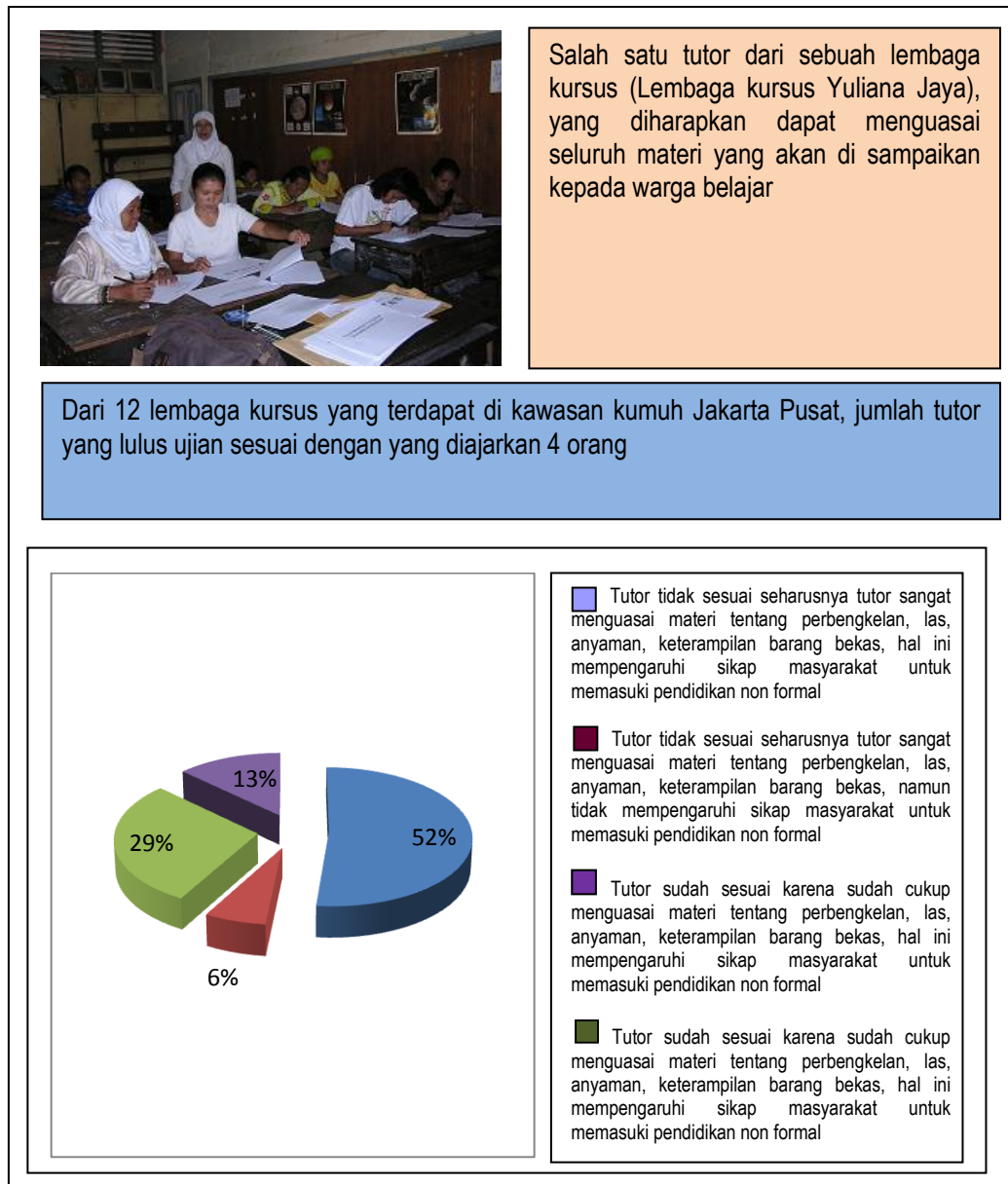
Sumber: Hasil Analisis, 2008

Dari frekuensi kesesuaian tutor pendidikan non formal dengan kondisi masyarakat pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 16 orang atau 52% menyatakan tutor pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat tidak sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Yang dibutuhkan adalah tutor yang sangat menguasai materi yang diinginkan masyarakat kumuh yaitu tentang bengkel, las, anyaman, menyulam, kerajinan barang bekas. Kondisi ini berpengaruh terhadap kemauan masyarakat kumuh untuk memasuki pendidikan non formal.

Ini menunjukkan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan karena frekuensinya lebih dari 50%. Seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber antara lain:

1. *Tutor lembaga pendidikan non formal yang ada belum sesuai dengan kondisi masyarakat pada kawasan kumuh, ini salah satu penyebab masyarakat kawasan kumuh tidak mau masuk ke pendidikan non formal yang ada, seharusnya tutor yang ada adalah membimbing terus satu-persatu dari masing-masing peserta warga belajar (O.5).*
3. *Tutor yang ada di lembaga pendidikan non formal kurang sesuaidan hal ini salah satu penyebab masyarakat pada kawasan kumuh tidak mau masuk ke lembaga pendidikan non formal yang ada, seharusnya tutor dengan sabar membimbing satu-persatu masyarakat warga belajar yang ada.(O.4)*

Lebih jelasnya mengenai jawaban yang menyatakan bahwa tutor lembaga pendidikan non formal belum sesuai dengan kondisi masyarakat pada kawasan kumuh dapat dilihat pada gambar 4.10 dibawah ini:



Sumber: Hasil analisis, 2008

GAMBAR 4.10 **KESESUAIAN TUTOR PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH KEMAYORAN JAKARTA PUSAT**

Kesimpulan dari penjelasan tersebut di atas menyatakan bahwa, sebagian besar narasumber, sejumlah 52% menyebutkan bahwa tutor lembaga pendidikan non formal pada kawasan kumuh tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

Program tersebut antara lain program ketrampilan bengkel, las, anyaman, menyulam, kerajinan barang bekas, dan mempengaruhi terhadap kemauan masyarakat memasuki pendidikan non formal.

4.5.6 Analisis Fasilitas Pendidikan Non Formal Pada Kawasan Kumuh

Fasilitas atau sarana prasarana adalah alat yang digunakan untuk menunjang proses pencapaian tujuan, termasuk didalamnya alat dan bangunan tempat proses belajar mengajar. Fungsinya adalah sebagai alat atau tempat untuk melaksanakan proses belajar mengajar pendidikan non formal.

Dari hasil wawancara dengan 8 orang narasumber dari 13 lembaga pendidikan non formal yang ada di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dapat disampaikan bahwa, dalam konteks pendidikan non formal di kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, sarana yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian besar seperti pada tabel IV.15 dibawah ini:

TABEL IV.15
FREKUENSI FASILITAS PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA KAWASAN KUMUH DI KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

No	Model jawaban	Frek	Bobot
1	Fasilitas lebih banyak kondisi baik, alat praktek maupun bangunan walaupun jenisnya sesuai dengan program keahlian yang diajarkan	2	25%
2	Fasilitas lebih banyak kondisi rusak, alat praktek maupun bangunan walaupun jenisnya sesuai dengan program keahlian yang diajarkan	5	62,5%
3	Fasilitas yang baik dan yang rusak alat praktek maupun bangunan perbandingan 50:50, dan sesuai dengan program keahlian yang diajarkan	1	12,5%
	JUMLAH	8	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Hasil perhitungan didapat bahwa lembaga pendidikan non formal yang memiliki fasilitas pendidikan dengan kondisi baik dan sesuai dengan jenis program keahlian yang diajarkan hanya 25%. Yang memiliki fasilitas lebih banyak kondisi rusak walaupun jenisnya sesuai dengan program keahlian yang diajarkan adalah 62,5%. Memiliki fasilitas 50:50 sebanyak 12,5%, dari keseluruhan 8 narasumber yang dimintai keterangan dari lembaga pendidikan non formal di kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendidikan non formal di kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat sebagian besar dalam kondisi rusak dan kurang memenuhi syarat baik alat praktek maupun sarana belajar.

Menurut masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan kumuh, menunjukkan bahwa fasilitas yang digunakan oleh lembaga pendidikan non formal yang ada belum sesuai dengan keinginan dan kondisi masyarakat kawasan kumuh. Yang diinginkan adalah fasilitas pendidikan non formal yang dapat berfungsi baik dan jenisnya sesuai dengan program keahlian yang diinginkan. Hal ini didapatkan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Dari hasil wawancara, ternyata fasilitas pendidikan non formal dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian besar. Hal ini dapat diperhatikan pada tabel IV.16 frekuensi fasilitas pendidikan non formal dibawah ini:

TABEL IV.16
FREKUENSI FASILITAS PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA KAWASAN KUMUH DI KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

No	Model jawaban	Frek	Bobot
1	Fasilitas pendidikan non formal tidak sesuai karena banyak yang rusak dan bangunannya kurang memenuhi syarat, hal ini mempengaruhi sikap masyarakat untuk memasuki pendidikan non formal	20	65%
2	Fasilitas pendidikan non formal tidak sesuai karena banyak yang rusak dan bangunannya kurang memenuhi syarat, namun tidak mempengaruhi sikap masyarakat untuk memasuki pendidikan non formal	6	19%
3	Fasilitas pendidikan non formal sudah sesuai, walaupun banyak yang rusak dan kurang memenuhi syarat, namun tidak mempengaruhi sikap masyarakat untuk memasuki pendidikan non formal	2	6%
4	Fasilitas pendidikan non formal sudah sesuai, walaupun sudah banyak yang rusak dan kurang memenuhi syarat, hal ini mempengaruhi sikap masyarakat untuk memasuki pendidikan non formal	3	10%
JUMLAH		31	100%

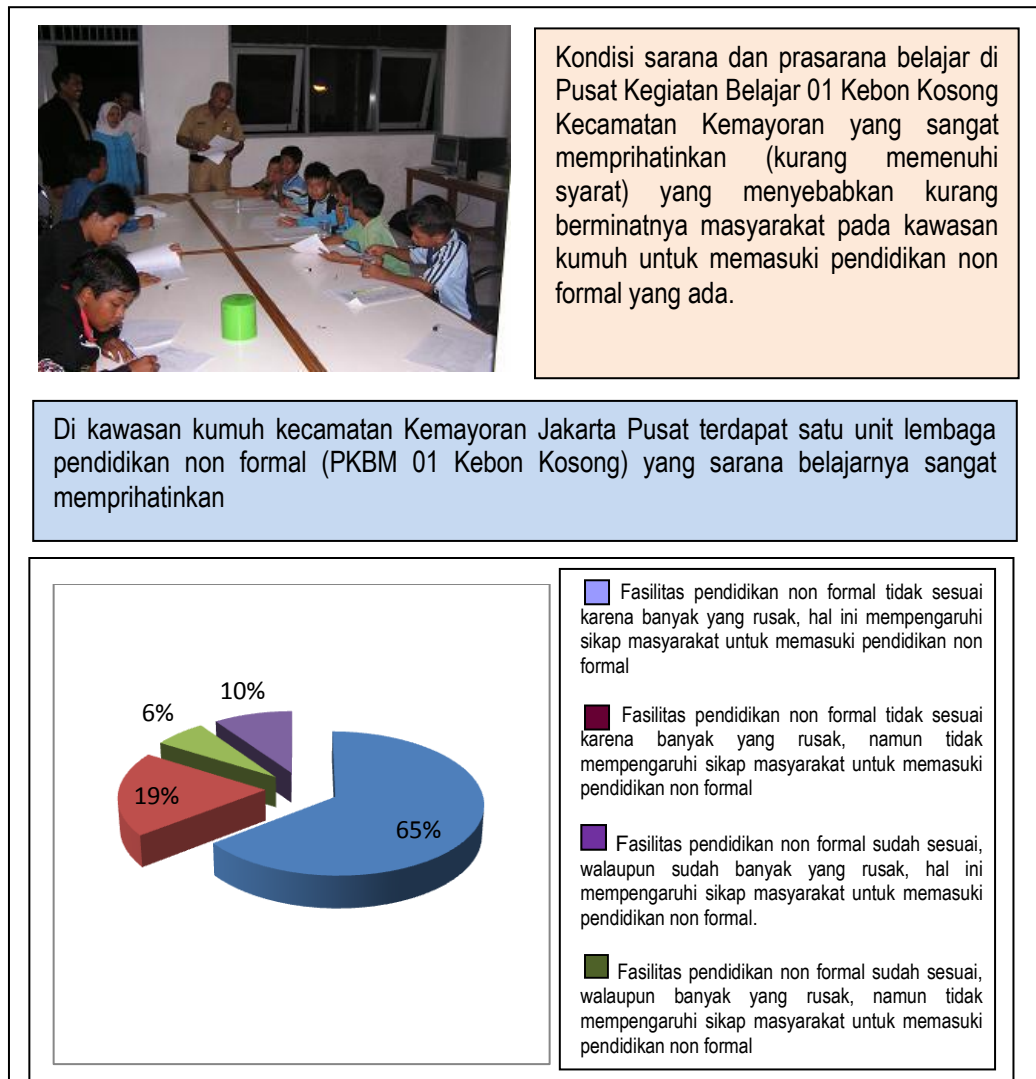
Sumber: Hasil Analisis, 2008

Dari frekuensi kesesuaian fasilitas pendidikan non formal dengan kondisi masyarakat yang disampaikan pada tabel diatas menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat tidak sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Fasilitas pendidikan banyak yang rusak, kondisi ini berpengaruh terhadap kemauan masyarakat kumuh untuk memasuki pendidikan non formal.

Hal ini dapat disimpulkan karena narasumber yang menyampaikan pendapatnya sebanyak 17 narasumber atau sekitar 55%. Kondisi yang demikian menunjukkan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan karena frekuensinya lebih dari 50%. Seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber antara lain:

1. *Fasilitas yang ada di lembaga pendidikan non formal belum sesuai dengan kondisi masyarakat pada kawasan kumuh, ini salah satu penyebab masyarakat kawasan kumuh tidak mau masuk ke pendidikan non formal yang ada (A.3).*
2. *Fasilitas pendidikan non formal yang ada kurang sesuai dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, karena sebagian besar alat prakteknya sudah usang, dan hal ini salah satu penyebab masyarakat pada kawasan kumuh tidak mau masuk ke lembaga pendidikan non formal yang ada. (O2)*

Lebih jelasnya jumlah jawaban yang menyatakan bahwa metode lembaga pendidikan non formal belum sesuai dengan kondisi masyarakat pada kawasan kumuh dapat dilihat pada gambar IV. 11 dibawah ini:



Sumber: Hasil analisis, 2008

GAMBAR 4.11 KESESUAIAN FASILITAS PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

Kesimpulan dari penjelasan tersebut di atas bahwa, sebagian besar narasumber, yaitu sejumlah 65% menyebutkan bahwa fasilitas pendidikan non formal pada kawasan kumuh tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, dan mempengaruhi minat masyarakat memasuki pendidikan non formal.

4.5.7 Rekapitulasi Analisis Komponen Sistem Pendidikan Non Formal.

Berdasarkan hasil analisis dari semua komponen sistem pendidikan non formal dan setelah di kaitkan dengan kondisi masyarakat pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, dapat disampaikan hal-hal seperti pada tabel IV.17 dibawah ini:

TABEL IV.17
REKAPITULASI ANALISIS KOMPONEN SISTEM PENDIDIKAN NON FORMAL PADA MASYARAKAT KAWASAN KUMUH DI KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

No	Obyek analisis	Tidak sesuai & berpengaruh terhadap minat memasuki pendidikan non formal	Tidak sesuai & tidak berpengaruh terhadap minat memasuki pendidikan non formal	Sesuai & berpengaruh terhadap minat memasuki pendidikan non formal	Tidak sesuai & tidak berpengaruh terhadap minat memasuki pendidikan non formal
1	Komponen tujuan			V	
2	Komponen metode	V			
3	Komponen jadwal	V			
4	Komponen isi	V			
5	Komponen pelaksana	V			
6	Komponen fasilitas	V			
	TOTAL	5	0	1	0

Sumber: Analisis Peneliti, 2008

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa pendapat yang menyatakan tidak sesuai dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat kawasan kumuh untuk memasuki pendidikan non formal adalah sebanyak 5 komponen dari 6 komponen. Sedangkan 1 komponen lainnya menganggap sesuai dan komponen tersebut berpengaruh terhadap sikap masyarakat kawasan kumuh menuntut pendidikan non formal. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan non formal yang berada di kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat tidak sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakatnya.

Hal ini akan semakin menguatkan kesimpulan bahwa sistem pendidikan yang dianggap dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat pada kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat adalah sistem pendidikan non formal yang mempunyai program keahlian bengkel, las, anyaman, sulam, kerajinan barang bekas, dengan tutor yang menguasai materi dan waktu pelaksanaan belajar antara pukul 16.00 – 22.00 WIB. Sistem pendidikan non formal yang seperti itu disebut dengan sistem pendidikan non formal yang mendasarkan pada layanan.

4.6 Sistesis Terhadap Hasil Analisis

Jika melihat pendapat narasumber, maka mayoritas narasumber menyatakan bahwa sistem pendidikan non formal yang ada tidak sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Yaitu masyarakat yang serba kekurangan secara ekonomi, dengan mata pencaharian sebagian besar adalah pemulung. Sedangkan waktu efektif antara jam 05.00–14.00 WIB, dengan pendapatan rendah yang membuat ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan non formal yang ada di kawasan tersebut. Hal ini yang mengakibatkan minimnya masyarakat kawasan kumuh yang berminat memasuki lembaga pendidikan non formal.

Untuk lebih jelas tentang kondisi pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dapat di rangkum dalam rekapitulasi tabel IV.18 di bawah ini:

KOMPONEN	TEORI	KONDISI EKSISTING PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH	KAJIAN	KONDISI PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH YANG DIINGINKAN
Tujuan Utama	Ananda: Pendidikan non formal mempunyai tujuan agar para lulusan pendidikan itu menjadi tenaga kerja produktif dan biasanya bersifat remedial	Menyediakan bekal keterampilan kepada masyarakat agar terserap didunia usaha dan dunia industri serta usaha mandiri	Tujuan sistem pendidikan non formal pada masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat adalah lebih menekankan pada keterampilan/ keahlian personal yang sifatnya instant dengan jenis program atau keahlian yang cepat mendapatkan atau menghasilkan uang, ijazah bukan sebuah tujuan utama tetapi yang utama adalah menjadi tenaga kerja yang produktif.	Menyediakan bekal keterampilan kepada masyarakat agar terserap didunia usaha dan dunia industri serta usaha mandiri
Metode	Winardi: Dalam pelaksanaannya metode yang digunakan membedakan pendidikan luar sekolah berbesa dengan pendidikan yang lain, antaranya: berkaitan dengan misi yang mendesak dan praktis, tempatnya diluar kelas, bahan pelajaran lebih besar keterampilan, bersifat sukarela, aktivitas sampingan, biaya murah, syarat penerimaan mudah	Metode pelaksanaan pembelajaran adalah klasikal dengan prosentase perbandingan antara praktek dengan teori adalah 60:40.	Sesuai dengan metode yang tepat dilakukan pada pendidikan non formal yaitu mendesak dan praktis, dan sesuai dengan sifat masyarakat kawasan kumuh yang tidak mau terikat, maka metode yang digunakan dalam poses belajar tidak harus selalu berada dalam sebuah ruang kusus, namun lebih mengena jika dilakukan di luar kelas dengan memperbanyak praktek dibanding teori. Masyarakat kawasan kumuh biasanya segan membaca dan belajar.	Metode individual atau semi private, dengan memberikan teori 10 % di sela-sela waktu belajar praktek, dan dilaksanakan tidak harus dalam ruang kelas

KOMPONEN	TEORI	KONDISI EKSISTING PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH	KAJIAN	KONDISI PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH YANG DIINGINKAN
Tutor	<p>Joesoef: Pendidikan non formal bersifat efektif oleh karena program pendidikan non formal bisa spesifik sesuai dengan kebutuhan dan tidak memerlukan syarat-syarat (guru, metode fasilitas lain) secara ketat, dan tempat penyelenggaraan dimana saja seperti di sawah, bengkel, rumah, pasar, tempat kerja dll;</p>	Tutor cukup menguasai satu program keahlian	Pendidikan pada masyarakat kawasan kumuh tidak mengutamakan diploma atau kualitas keluaran tertentu, tetapi lebih memfokus pada keahlian yang sederhana dan dapat dicerna. Oleh sebab itu pendidikan non formal pada kawasan kumuh tidak memerlukan seorang tutor yang memiliki keahlian atau kecakapan tertentu, tidak perlu tutor yang ahli atau bersertifikasi tertentu pada program keahlian tertentu. Tetapi lebih dituntut untuk bisa dalam banyak jenis keterampilan.	Tutor dituntut untuk menguasai banyak program keahlian
Isi	<p>Sukmadinata: Pendidikan non formal harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Materi pengajaran berasal dari pengalaman peserta didik yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya.</p>	Program keahlian yang cepat terkena dampak teknologi, komputer, LAN, internet (broadband), hand phone, garmen	Isi atau materi program keahlian yang disampaikan tidak tergantung pada trend, booming atau perkembangan teknologi. Namun masyarakat kawasan kumuh dengan segala keterbatasan dan ketidakmampuannya isi atau materi pendidikan non formal lebih ditekankan pada keterampilan yang cepat mendapatkan uang tanpa memandang trend atau perkembangan teknologi.	Program keahlian yang cepat menghasilkan uang dan bersifat instant, bengkel, las, anyaman, kerajinan barang bekas

KOMPONEN	TEORI	KONDISI EKSISTING PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH	KAJIAN	KONDISI PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH YANG DIINGINKAN
Waktu Pelaksanaan	Joesoef: Waktu penyelenggaraan disesuaikan dengan kesempatan yang ada artinya dapat beberapa bulan, beberapa tahun atau beberapa hari saja, bahkan jam belajarnya pun menyesuaikan dengan kesempatan yang ada.	Fleksibel diantara pukul 08.00 – 14.00, dan biasanya waktu penyampaian program 3 bulan	Kondisi masyarakat kawasan kumuh sebagian besar bermata pencaharian tidak menentu. Tetapi lebih banyak menggunakan waktu mencari mata pencaharian pada pagi sampai sore hari. Oleh karena itu waktu efektif belajar yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan pada pagi sampai siang hari tidak dapat diikutinya. Disamping belajar bukan merupakan kebutuhan utama mereka. Maka dari itu, waktu belajar yang paling efektif bagi masyarakat kawasan kumuh adalah pada saat waktu senggang, yaitu waktu setelah mereka mencari mata pencaharian. Selain itu, karena ijazah bukan merupakan sebuah tujuan, maka pelaksanaan belajar bisa dilakukan dalam waktu singkat.	Setelah melakukan aktivitas, antara pukul 16.00-22.00, penyampaian program sampai peserta didik memahami (maksimal 1 bulan)
Fasilitas	Sudarmadi: Lembaga pendidikan non formal bertujuan untuk melayani masyarakat sekitarnya baik program, tujuan, metode, waktu pelaksanaan, fasilitas dan	Sejenis, dalam satu lembaga hanya satu jenis sarana yang dibutuhkan, misalnya mesin jahit, kecantikan dll	Masyarakat pada kawasan kumuh memiliki sifat heterogen, yang berakibat setiap individu memiliki kemauan masing-masing. Seperti yang disampaikan Sudarmadi bahwa fungsi pendidikan non formal adalah melayani masyarakat, untuk	Berbagai jenis dalam satu lembaga kursus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya alat bengkel, alat las,

KOMPONEN	TEORI	KONDISI EKSISTING PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH	KAJIAN	KONDISI PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH YANG DIINGINKAN
	tutor sesuai dengan kemauan, kemampuan, kenyamanan, karakteristik dan kondisi masyarakat.		itu dibutuhkan fasilitas atau sarana belajar yang bermacam-macam, terutama alat praktek kerja sesuai dengan banyaknya kebutuhan dan jenis keterampilan yang diinginkan.	
Lokasi	Daldjoeni Jangkauan barang adalah berapa jauh jarak yang mampu ditempuh untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga tertentu.	Lokasi lembaga pendidikan berada pada daerah kumuh, dengan jarak terjauh 1.3 km, biaya yang diperlukan untuk ke lokasi Rp.5.000 pp. Dan berada di pinggir jalan raya utama.	Kondisi sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh adalah memiliki mata pencaharian sebagai pemulung dengan penghasilan yang sangat minim dan terbatas. Oleh karena itu diperlukan lokasi lembaga pendidikan non formal yang mudah dijangkau, dalam arti tidak mengeluarkan biaya	Lokasi lembaga pendidikan non formal berada pada lingkungan kawasan kumuh dengan jarak 1 km, sehingga tidak perlu mengeluarkan ongkos
Layanan	Criss Konsep layanan 1. Accessibility 2. Convenient 3. Comfort 4. Safety and security 5. Reliability	Kenyamanan, keamanan, kemudahan akses terhadap lembaga pendidikan non formal yang ada belum maksimal, karena berada di pinggir jalan raya, sering terjadi kejahatan, dan merupakan kawasan padat sehingga sering macet, ruangan sempit rata-rata 3x4 m	Sifat ketidakmampuan dan kekurangan masyarakat pada kawasan kumuh, maka diperlukan kemudahan akses, kenyamanan, keamanan agar mereka dapat dengan mudah mengakses fasilitas tersebut	Mudah diakses, berada bukan pada jalan raya, ruangan luas 6 x 10 m, tidak berada di jalan raya.

KOMPONEN	TEORI	KONDISI EKSISTING PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH	KAJIAN	KONDISI PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH YANG DIINGINKAN
Biaya	Winardi: Dalam pelaksanaannya metode yang digunakan membedakan pendidikan luar sekolah berbesa dengan pendidikan yang lain, antaranya: berkaitan dengan misi yang mendesak dan praktis, tempatnya diluar kelas, bahan pelajaran lebih besar keterampilan, bersifat sukarela, aktivitas sampingan, biaya murah, syarat penerimaan lebih mudah	Biaya kursus antara Rp. 300.000 – Rp. 1.500.000	Masyarakat kawasan kumuh belum pada tataran memandang pendidikan dari kualitas. Yang diperlukan dari sebuah pendidikan adalah sebuah keahlian atau keterampilan yang langsung dapat menghasilkan uang. Tidak memerlukan sebuah program keterampilan yang memerlukan biaya banyak	Biaya kursus paling mahal Rp.150.000, dengan pertimbangan penghasilan rata-rata masyarakat adalah Rp. 750.000

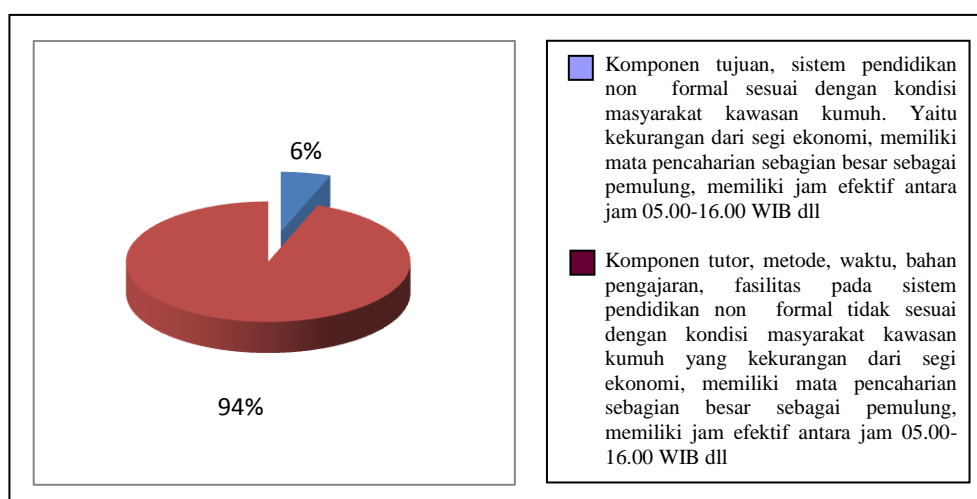
Sumber: Analisis peneliti, 2008

TABEL. IV.18
REKAPITULASI PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH DI KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

Dari hasil rekapitulasi terhadap komponen sistem pendidikan non formal dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan non formal pada masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat adalah sistem pendidikan non formal yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kemampuan dan keadaan

masyarakat baik fisik maupun non fisik sangat menentukan jenis sistem pendidikan apa yang diterapkan.

Kondisi yang dapat diperhatikan bahwa hanya satu komponen sistem pendidikan non formal yang sesuai dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, sedangkan sisanya menyatakan ketidaksesuaian. Hal ini disebabkan karena kemauan masyarakat kawasan kumuh di kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat adalah pendidikan non formal yang memiliki program bengkel, las, anyaman, keterampilan barang bekas, dengan waktu pelaksanaan antara pukul 16.00-22.00 WIB, dengan tutor yang sangat menguasai materi dan fasilitas yang berfungsi baik untuk digunakan bahan praktek. Jenis sistem pendidikan yang seperti ini disebut dengan sistem pendidikan non formal yang mendasarkan pada pelayanan. Secara jelasnya dapat diperhatikan gambar IV.16 dibawah ini:



Sumber: Hasil analisis, 2008

GAMBAR 4.12
PENDAPAT NARA SUMBER TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH

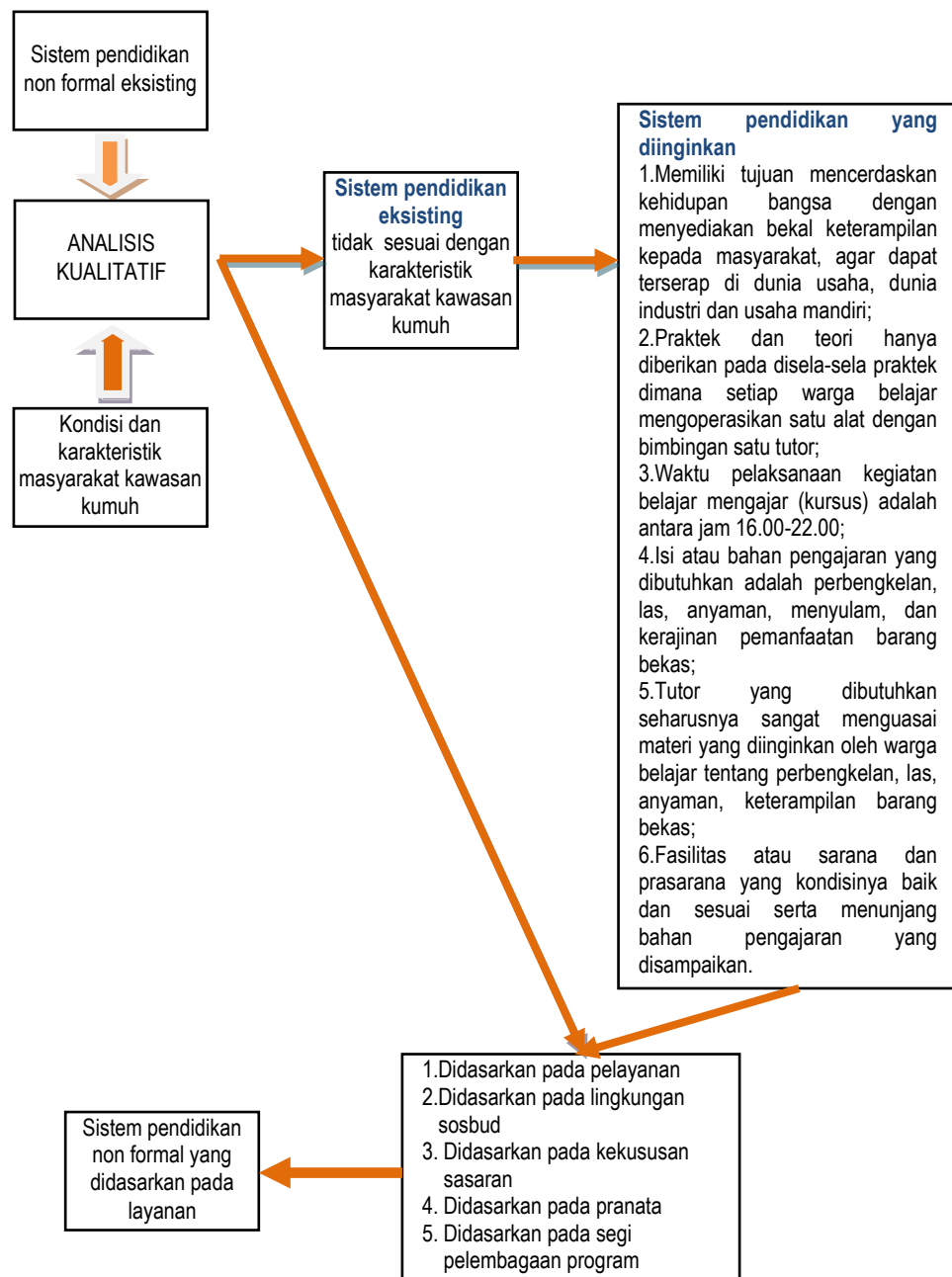
Dari gambar diatas, jelas dapat disimpulkan bahwa 94% komponen sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat eksisting tidak sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakatnya. Sistem pendidikan non formal eksisting masyarakat kawasan kumuh adalah sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada kondisi sosial budaya. Sedangkan kondisi dan karakteristik masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang kekurangan dari segi ekonomi, memiliki mata pencaharian sebagian besar sebagai pemulung, memiliki jam efektif antara jam 05.00-16.00 WIB dll. Sedangkan masyarakat yang menyatakan sesuai hanya 6%.

Mengacu pada landasan teori yang ada, dan permasalahan masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dalam bidang pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan non formal yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat adalah sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada pelayanan. Artinya adalah sistem pendidikan non formal yang program-programnya benar-benar melayani kondisi masyarakat, yaitu menyesuaikan dengan kemauan masyarakat kawasan kumuh dengan segala macam kemajemukannya. Dalam hal ini pelayanan yang diinginkan adalah:

1. Memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyediakan bekal keterampilan kepada masyarakat, agar dapat terserap di dunia usaha, dunia industri dan usaha mandiri;
2. Teori hanya diberikan pada disela-sela praktek dimana setiap warga belajar mengoperasikan satu alat dengan bimbingan satu tutor;

3. Waktu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (kursus) adalah antara jam 16.00-22.00 WIB;
4. Isi atau bahan pengajaran yang dibutuhkan adalah perbengkelan, las, anyaman, menyulam, dan kerajinan pemanfaatan barang bekas;
5. Tutor yang dibutuhkan seharusnya sangat menguasai materi yang diinginkan oleh warga belajar tentang perbengkelan, las, anyaman, keterampilan barang bekas;
6. Fasilitas atau sarana dan prasarana yang kondisinya baik dan sesuai serta menunjang bahan pengajaran yang disampaikan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.12 bagan sistem pendidikan di bawah ini:



GAMBAR IV.13
BAGAN SINTESIS HASIL ANALISIS

Sumber: Hasil analisis peneliti 2008

Sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada layanan adalah sistem pendidikan non formal yang bersifat melayani. Artinya lembaga pendidikan non formal tersebut bertujuan untuk melayani masyarakat sekitarnya baik program,

tujuan, metode, waktu pelaksanaan, kenyamanan, karakteristik dan kondisi masyarakat. Hal ini sangat mungkin untuk dilakukan, karena pemerintah telah membuat kebijakan yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah, dimana sekolah diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk mengelola lembaga pendidikannya sendiri sesuai dengan kemampuan dan kepatutannya sendiri, dengan tetap berpedoman pada aturan yang ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Permasalahan utama masyarakat pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta pusat dalam bidang pendidikan non formal terdiri dari 5 masalah utama yang memerlukan pemecahan serius, berturut-turut yaitu (1) Belum tersedia, lembaga pendidikan non formal yang memiliki program yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, (2) Sebagian besar lembaga pendidikan non formal yang ada di kawasan kumuh, membuka program yang berhubungan dengan perkembangan teknologi, (3) Waktu pelaksanaan proses belajar mengajar tidak sesuai dengan waktu senggang masyarakat pada kawasan kumuh, sehingga masyarakat tidak bisa mengikuti program tersebut, (4) Kurang kesiapan lembaga pendidikan untuk membuka program sekaligus menyesuaikan waktu pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tingginya biaya kursus yang diminta oleh lembaga pendidikan non formal yang ada, (5) Lembaga pendidikan non formal yang mempunyai program sesuai dengan kebutuhan masyarakat kawasan kumuh berada jauh dari pemukiman kumuh. Sedangkan minimnya jumlah warga belajar yang masuk ke dalam pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat merupakan akibat dari timbulnya permasalahan utama tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap komponen sistem pendidikan non formal yang ada di kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, ternyata sebagian besar pelaksanaan komponen pendidikan non formal yang ada di kawasan kumuh belum sesuai dengan kondisi masyarakatnya, yang berakibat masyarakat kawasan kumuh kesulitan mengakses pendidikan non formal tersebut.

Sistem pendidikan non formal yang ada di kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat adalah, sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada lingkungan sosial budaya, yaitu suatu sistem pendidikan non formal yang programnya disesuaikan dengan lingkungan sosial budayanya. Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat adalah lokasi yang berada di kota, maka program yang diberikan adalah program diarahkan pada program-program yang cepat terkena dampak perkembangan ilmu dan teknologi. Padahal dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh yang serba kekurangan, tidak memungkinkan untuk mengikuti program tersebut. Masyarakat kawasan kumuh lebih dapat mengakses lembaga pendidikan non formal yang programnya selalu mengikuti kebutuhan dan kemauan masyarakat kawasan kumuh.

Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk sistem pendidikan non formal yang paling sesuai adalah sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada pelayanan. Yaitu suatu sistem pendidikan non formal yang bersifat melayani. Lembaga pendidikan non formal tersebut bertujuan untuk melayani masyarakat sekitarnya baik program, tujuan, metode, waktu pelaksanaan. Berdirinya lembaga pendidikan non formal harus menyesuaikan dengan kebutuhan, kemauan dan kondisi masyarakat.

Masyarakat kawasan kumuh adalah masyarakat yang lemah untuk melakukan bergaining, sehingga diperlukan sesuatu kemudahan atau katalisator untuk menjangkau fasilitas atau sistem yang ada. Dalam konteks pendidikan non formal, posisi lembaga pendidikan non formal yang lebih kuat seharusnya yang melakukan penyesuaian dengan kondisi masyarakat yang ada di kawasan tersebut, sehingga akan terjadi titik temu antara kedua faktor.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

A. Bagi instansi pemerintah terkait Dinas Pendidikan Jakarta Pusat;

1. Untuk mengatasi permasalahan yang ada pada masyarakat kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, bisa ditempuh melalui pembuatan kebijakan yang diarahkan kepada lembaga pendidikan non formal yang ada, seyogyanya merubah sistem pendidikan yang selama ini dipakai dengan sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada pelayanan;
2. Melakukan pembinaan (*suporting*) kepada lembaga pendidikan non formal yang ada agar kiranya lembaga tersebut mampu dan sanggup untuk melaksanakan sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada pelayanan, karena mesti membutuhkan sumber daya yang sangat besar.

B. Bagi pelaksana atau lembaga pendidikan non formal

1. Dalam jangka pendek, menerapkan sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada pelayanan dengan kemampuan yang ada;

2. Dalam jangka panjang membuat persiapan untuk melaksanakan sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada pelayanan secara menyeluruh, dengan harapan semua masyarakat usia sekolah di kawasan kumuh dapat tertampung semua di lembaga pendidikan non formal.

C. Bagi peneliti lain:

Studi ini hanya mengidentifikasi keadaan atau analisis situasi serta mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dalam kaitannya dengan struktur ruang dimana masyarakat kawasan kumuh berada. Tahap ini hanya merupakan langkah pertama dari penyusunan kebijakan. Untuk menyusun kebijakan mengenai sistem pendidikan yang sesuai dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat pada kawasan kumuh secara komprehensif sebagai suatu arahan pengembangan pendidikan di Jakarta, diperlukan studi lanjutan yang mengkaji peluang dan tantangan berkaitan dengan kebutuhan pengembangan sistem pendidikan tersebut, kemudian menetapkan alternatif pencapaian tujuan, identifikasi kebijakan atau kegiatan serta penetapan rencana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ahmadi, Abu dan Uhbiyanti, Nur. 2003. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Arikunto. 1998. *Teknik Penulisan Ilmiah*, Yogyakarta : Penerbit Gajah Mada Press.
- Ananda, 2005. *Konsep Pendidikan Seumur Hidup*. Jakarta : Penerbit Kencana.
- Bintarto. 1984. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Bintarto. 1987. *Urbanisasi dan Permasalahannya*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Bourne, Larry S. 1982. *Urban Transport Spatial Structure* , In Larry S. Bourne (ed). *Interna Structure Of The City*. New York : Oxford University Press.
- Budihardjo, Eko. 1997a. *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- _____. 1997b. *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung : Penerbit Alumni.
- _____. 1998a. *Percikan Masalah Arsitektur Perumahan Perkotaan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- _____. (penyunting), 1998b. *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Penerbit Kencana.
- Chandrakirana, Sadoko. 1994. *Dari Batavia ke Jakarta*. Jakarta : Penerbit Gunung Agung.
- Criss, Manning dan Efendy Tadjudin Nur. 1985. “*Urbanisasi dan Sektor Informal*”. Jakarta : Penerbit Gramedia.
- Daldjoeni. 1997. *Seluk Beluk Masyarakat Kota (Pusparagam Sosiologi Kota dan Ekologi Sosial)*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Danim, S. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Penerbit CV Pustaka Setia.
- Dwidjowijono, Riant Nugroho. 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Dye, R, Thomas. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Gajah Mada University Press.

- Hardjosudarmo, Soedigdo. 1981. *Pendidikan Non Formal dalam Rangka Pengembangan Sumber Tenaga Usia Muda*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- Hamalik, Omar. 2005. *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Harold, Bathell. 1993. *Rural Community Development*. New York:Rinahart and Company
- Hasan, Fuad. 2005. *Pendidikan Non Formal di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- Herlianto. 2002. *Urbanisasi Pembangunan, dan Kerusakan Kota*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hoogerwerf. 1994. *Forest Policy in Charles B. Howe (eds.) Managing Renewable Natural Resources in Developing Country*. Colorado : Westview Press/Boulder.
- Idris, Zahara. 1987. *Dasar-dasar Kependidikan*, Bandung : Penerbit Angkasa
- Jacob. 2002. *Konstruksi Sosial Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Jayadinata, J.T. 1999. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Edisi Ketiga. Bandung : Penerbit ITB.
- Joesoef, Soelaiman. 2004. *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung : Penerbit CV. Niandar Jaya.
- Kusmayadi, Endar Sugiarto. 2000. *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisata*. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Manurung, Hendra. 2000. *Hakekat Pendidikan Sosial*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2005-2009*. Jakarta: Penerbit Depdiknas
- Rushton. 1979. *Regions in Questions .- Space, Development Theory and Regional Policy*. London : Penerbit Methuen
- Santoso, Jo. 2002. *Perkembangan Kawasan Kumuh di Perkotaan*. Jakarta : Penerbit LP3ES.
- Santoso, RA. 2003. *Pendidikan Sosial dan Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Shoji, Masako. 1993. *Acknowledgement, Education in Japan*. Miscico
- Siagian. 2003. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Sudarmadi, S. 1993. "Pendidikan Non Formal Dalam Rangka Pembangunan

- Sumber Daya Manusia*". Jakarta : Penerbit Prisma
- Sugiyono. 2008. "*Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*". Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Sudjana, Djuju. 1992. "*Pendidikan Non Formal dan Penerapannya*". Bandung : Penerbit Alumni.
- Sukmadinata. 1997. *Teknologi Pendidikan*. Jakarta : Penerbit LP3ES.
- Suparlan, Parsudi (penyunting), 1996. *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan untuk Antropologi Perkotaan*. Jakarta : Penerbit Yayasan Obor Indonesia (YOI).
- Suprpto. 1995. *Pendidikan Kontemporer*. Jakarta : Penerbit LP3ES.
- Surbakti, A. Ramlan. 1984. " *Kemiskinan di Kota dan Program Perbaikan Kampung*". Prisma, No. 6, tahun 1984. Jakarta : Penerbit LP3ES..
- Tarigan, Robert Valentino. 2008. "*Konsep Pendidikan Luar Sekolah, Sebuah Alternatif Menekan Angka Pengangguran*". Jakarta : Penerbit LP3ES.
- Tasmian. 1994. *Dinamika Ekonomi Informal*. Jakarta : Penerbit Bhatara Karya Aksara.
- Todaro. 1998. *Development Theory and Regional Policy*. Muncen.
- Wahab. 2002. *culture and social science*, Sixth edition, alih bahasa oleh Haris Munandar. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Winardi. 2002. *Jalur-jalur di Luar Pendidikan Formal*, Jakarta : Penerbit Bharata.
- Wirartha, 2006, *Teknis Menulis Ilmiah*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia.

SKRIPSI TESIS / DISERTASI

- Aryati. 2001. "Kajian Karakteristik Permukiman Kumuh dalam Upaya Peremajaan. (Studi Kasus: Kampung Pahandut Kota Palangkaraya)". Tesis Program Magister Teknik Arsitektur. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ridlo, M, Agung, 2002. "Karakteristik Kemiskinan Perkotaan Pada Permukiman Kumuh dan Liar Kota Semarang". Tesis Program Magister Teknik Arsitektur. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Widyonindito, Sigit. 2003. Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Rejowinangun Selatan Kota Magelang. Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang"

TERBITAN TERBATAS

Badan Perencanaan Kota Administrasi Jakarta Pusat. 2007. *Data Pokok Jakarta Pusat Tahun 2007*. Jakarta : Penerbit Bapekodya Jakarta Pusat.

Biro Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat. 2007. *Jakarta Pusat Dalam Angka*. Jakarta : Penerbit Biro Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Biro Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat. 2007. *Survei Fisik Perkotaan Tahun 2007*. Jakarta : Penerbit Biro Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 1984. *Kebijakan Pendidikan Nasional*. Departemen Pendidikan Nasional.

Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. 2007. *Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Pendidikan Luar Sekolah tahun 2007*. Departemen Pendidikan Nasional

Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Pusat. 2007. *Rangkuman Data Rinci SMA dan SMK se Jakarta Pusat* . Jakarta Pusat: Penerbit Sudin Dikmenti Kota Administrasi Jakpus.

Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Pusat. 2008. *Data Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta Pusat : Penerbit Sudin Dikmenti Kota Administrasi Jakpus.

Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Pusat. 2007. *Data Pokok Pendidikan Jakarta Pusat*. Jakarta Pusat : Penerbit Sudin Dikmenti Kota Administrasi Jakpus.

Undang-undang No. 2 Tahun 1989. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 1989 Jakarta

SURAT KABAR / MAJALAH

Kompas, 27 November 2007

RIWAYAT HIDUP



BUDIYONO dilahirkan di Trenggalek, Jawa Timur pada tanggal 17 Oktober 1968, sebagai anak ke dua dari tiga bersaudara keluarga Subari dan Marinah alm. Masa kecil dilaluinya dengan berpindah-pindah tempat tinggal sebanyak enam kali karena aktivitas dan keadaan orangtua, sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kini setelah berkeluarga tinggal di Jakarta Timur - Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Masa pendidikan diawali di pendidikan dasar, SD Negeri Karangsoke I, Kabupaten Trenggalek lulus pada tahun 1982. Pendidikan Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri I Trenggalek lulus pada tahun 1985, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri I Trenggalek pada jurusan A1/Fisika lulus tahun 1988. Kemudian menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Negeri Jember Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan MIPA Program Pendidikan Matematika lulus tahun 1993. Pada tahun 1993 pernah mengikuti lomba inovatif produktif antar kampus seluruh Indonesia di ITB dan Universitas Pajajaran Bandung. Pada tahun 2006 penulis memperoleh beasiswa unggulan dari Departemen Pendidikan Nasional untuk melanjutkan pendidikan S2 pada Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, konsentrasi Perencanaan Prasarana Pendidikan Universitas Diponegoro Semarang.

Pengalaman kerja diawali sejak tahun 1995 setelah lulus sarjana, sebagai eksekutif analisis PT. Graha Trada Abadi, kemudian akhir tahun 1995 pindah ke PT. Frank Small Associates Indonesia sebagai Data Processing hingga tahun 1996. Selanjutnya pada tahun 1996 bekerja pada PT. Bank Papan Sejahtera sebagai Card Management Support sampai dengan tahun 1998, dimana pada tahun tersebut Bank Papan Sejahtera di likuidasi. Selanjutnya karir di pemerintahan dimulai sejak diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Oktober tahun 1998 sebagai staf pengajar bidang studi Matematika di SMAN 4 Jakarta Pusat. Namun penulis bekerja di SMAN 4 Jakarta sejak Januari 1999 sampai dengan bulan September tahun 2003, selanjutnya pada tahun yang sama dipindah tugaskan di kantor Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai pembantu pimpinan pada seksi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, belum sampai sebulan bertugas di seksi tersebut, penulis kembali dipindah tugaskan ke seksi Perencanaan Penyusunan Program Pelaporan dan Akreditasi, kemudian dipindah tugaskan kembali ke Subbag Tata Usaha sampai sekarang.

Dari pernikahan dengan Anggun Cahyani, S.Psi pada tanggal 18 November tahun 2004, kini telah dikaruniai seorang buah hati bernama, Elang Arka Manggala yang lahir pada tanggal 19 September 2007.

LAMPIRAN 1. PEMECAHAN MASALAH MASYARAKAT PADA KAWASAN KUMUH TENTANG PENDIDIKAN NON FORMAL

No.	Pemecahan Masalah	Frekuensi	Bobot (%)
1	Diperlukan suatu lembaga pendidikan non formal yang dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat, baik program, waktu pelaksanaan, metode, tutor, sarana prasarana.	15	71
2	Adanya bantuan dana kepada masyarakat yang berada di kawasan kumuh, sehingga masyarakat dapat membayar biaya pendidikan non formal yang ada.	5	24
3	Lembaga pendidikan non formal yang ada, seharusnya menurunkan biaya kursus atau memberikan potongan kepada masyarakat miskin, atau kalau memungkinkan memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat miskin di wilayahnya.	3	14
4	Waktu pelaksanaan kegiatan pendidikan non formal yang ada di lingkungan tersebut di lakukan pada malam hari, sehingga tidak terjadi bentrok dengan waktu masyarakat bekerja pada siang hari.	4	5
5	Memberikan penyuluhan kepada orang tua anak didik untuk menimbulkan kesadaran masyarakat tentang perlunya pendidikan non formal	1	5
6	Adanya sanksi kepada masyarakat yang tidak mau menyekolahkan anaknya ke pendidikan non formal	1	5
7	Usaha peningkatan pendapatan kepada masyarakat pada kawasan kumuh, sehingga masyarakat dapat mengalokasikan anggarannya ke anggaran pendidikan.	2	10
8	Pemerintah mendirikan lembaga pendidikan non formal berada dikawasan kumuh ini, sehingga masyarakat dapat langsung mengikuti program – programnya dengan tidak memungut biaya sepeserpun.	2	10

Sumber: Data primer

Keterangan: Frekuensi = tingkat keseringan solusi disebutkan oleh responden

Bobot = $(\text{Frekuensi} / \text{jumlah responden}) \times 100\%$

LAMPIRAN 2. PENGHITUNGAN SKALA PRIORITAS PERMASALAHAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NO	PERMASALAHAN UMUM	Urutan Prioritas Menurut Responden																								score	%								
		O 1	O 2	O 3	O 4	O 5	O 6	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	L P 1	L P 2	L P 3	W 1	W 2	W 3	W 4	P 1	L K 1	L K 2	L K 3	L K 4	L K 5			L K 6	L K 7	L K 8	D 1	D 2	D 3	D 4	
1	Belum tersedia, lembaga pendidikan non formal yang memiliki program yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat seperti anyaman, menyulam, bengkel, kerajinan dari barang bekas.	1	3	2	5	4	3	2	0	5	1	3	2	5	4	4	5	0	1	1	2	4	0	5	5	4	5	3	4	5	5	3	96	61,9	
2	Lembaga pendidikan non formal yang mempunyai program sesuai dengan kebutuhan masyarakat kawasan kumuh (terutama untuk ibu-ibu PKK) seperti menyulam, anyaman, bengkel, kerajinan dari barang bekas berada jauh dari pemukiman kumuh.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,9	
3	Waktu pelaksanaan proses belajar mengajar tidak sesuai dengan waktu senggang masyarakat pada kawasan kumuh, yaitu antar jam 16.00-22.00 wib sehingga masyarakat tidak bisa mengikuti program tersebut.	0	1	1	5	3	4	4	2	5	5	5	4	2	2	2	5	5	2	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	2	3	0	68	43,9	
4	Kurang kesiapan lembaga pendidikan untuk membuka program sekaligus menyesuaikan waktu pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,	1	2	5	0	1	0	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	1	0	2	3	0	1	1	2	2	2	1	0	1	1	1	36	23.2	
5	Tingginya biaya kursus yang diminta oleh lembaga pendidikan non formal yang ada (satu program keahlian berkisar antara Rp.300.000 – Rp.1.500.000).	1	1	0	0	4	0	4	3	3	3	0	0	1	1	5	1	2	5	2	2	3	3	1	2	0	0	2	3	2	3	2	59	38.1	
6	Belum tersedia, lembaga pendidikan non formal yang memiliki program yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat seperti anyaman, menyulam, bengkel, kerajinan dari barang bekas	5	4	4	5	4	3	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	3	4	5	5	4	3	5	4	5	4	4	4	4	5	4	133	85,8

Keterangan:

Urutan prioritas:

I
II
III
IV
V

Bobot

Score

5 - Tertinggi : $5 \times 31 = 155$

4 - Terendah : $0 \times 31 = 0$

Bobot masalah (%) = $(\text{score}/155) \times 100$

Tidak tahu atau bukan sebagai masalah

0

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pemecahan masalah masyarakat pada kawasan kumuh tentang pendidikan non formal
- Lampiran 2 Perhitungan skala prioritas permasalahan pendidikan non formal
- Lampiran 3 Riwayat hidup.

